BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan Kawali

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2026

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Kecamatan Kawali merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi penelitian mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Secara administratif, Kecamatan Kawali memiliki karakteristik wilayah yang cukup beragam dan terdiri atas 11 desa, yaitu Desa Kawali, Kawalimukti, Talagasari, Sindangsari, Winduraja, Citeureup, Purwasari, Margamulya, Selasari, Karangpawitan, dan Linggapura. Pembentukan dan penataan wilayah Kecamatan Kawali juga berkaitan dengan pembentukan Kecamatan Lumbung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004. Setelah pembentukan Kecamatan Lumbung, wilayah Kecamatan Kawali mencakup 11 desa tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Kecamatan Kawali memiliki luas wilayah sebesar 33,82 km². Secara geografis, Kecamatan Kawali berbatasan dengan Kecamatan Panawangan di sebelah utara, Kecamatan Lumbung di sebelah barat, Kecamatan Cipaku di sebelah selatan, dan Kecamatan Jatinagara di sebelah timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kawali berada pada posisi yang berdekatan dengan beberapa wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Ciamis, sehingga memiliki hubungan kewilayahan dengan berbagai pusat kegiatan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Dari aspek aksesibilitas, Kecamatan Kawali memiliki jarak sekitar 20 kilometer dari Kecamatan Ciamis yang merupakan ibu kota Kabupaten Ciamis, berdasarkan perhitungan garis lurus. Jarak tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kawali relatif terhubung dengan pusat pemerintahan Kabupaten Ciamis. Kondisi aksesibilitas wilayah menjadi salah satu aspek yang penting dalam menggambarkan konteks pelaksanaan program pemerintah di tingkat kecamatan, termasuk program yang berkaitan dengan kependudukan, keluarga berencana, dan pembinaan keluarga.

Kondisi wilayah Kecamatan Kawali juga dapat dilihat berdasarkan karakteristik geografis masing-masing desa. Data BPS menunjukkan adanya perbedaan luas wilayah antar desa. Dalam data Kecamatan Kawali, luas wilayah desa antara lain Desa Sindangsari sebesar 3,15 km², Desa Kawali 1,85 km², Desa Karangpawitan 2,79 km², Desa Kawalimukti 1,67 km², Desa Talagasari 3,98 km²,

Desa Selasari 1,81 km², Desa Margamulya 1,37 km², Desa Winduraja 3,02 km², Desa Purwasari 6,45 km², Desa Citeureup 4,98 km², dan Desa Linggapura 2,75 km². Perbedaan luas wilayah tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik kewilayahan antardesa dalam Kecamatan Kawali.

Dengan karakteristik wilayah yang terdiri atas 11 desa dan memiliki kondisi geografis serta luas wilayah yang berbeda, pelaksanaan program pemerintah di Kecamatan Kawali membutuhkan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, petugas lapangan, dan kelompok masyarakat sasaran. Kondisi kewilayahan tersebut menjadi konteks penting dalam penelitian ini karena Program Bina Keluarga Remaja tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, kader, serta petugas yang berada pada tingkat desa dan kecamatan. Oleh karena itu, gambaran geografis dan administratif Kecamatan Kawali menjadi dasar untuk memahami lingkungan tempat Program BKR dilaksanakan sebelum selanjutnya membahas secara lebih khusus mengenai pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan uraian tersebut, Kecamatan Kawali memiliki karakteristik wilayah yang relevan dengan penelitian mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja. Keberadaan 11 desa sebagai wilayah administratif, variasi luas wilayah antardesa, serta jarak wilayah dengan pusat pemerintahan Kabupaten Ciamis memberikan gambaran mengenai konteks geografis dan administratif tempat program dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik penduduk, keluarga, serta

kelembagaan pelaksana program akan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi objek penelitian.

4.1.2 Kondisi Demografis Kecamatan Kawali

Kondisi demografis merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan karakteristik Kecamatan Kawali sebagai lokasi penelitian. Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, serta struktur penduduk berdasarkan kelompok umur. Gambaran tersebut menjadi relevan dalam penelitian mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR), karena program tersebut ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak remaja sehingga karakteristik penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan konteks mengenai keberadaan kelompok sasaran program. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Kecamatan Kawali Dalam Angka 2024, data kependudukan yang disajikan merupakan data tahun 2023.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis melalui Data DKB Semester II Tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Kawali tercatat sebanyak 43.385 jiwa, yang terdiri atas 21.732 jiwa laki-laki dan 21.653 jiwa perempuan. Dengan demikian, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kawali relatif seimbang. Apabila dilihat berdasarkan desa, jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Winduraja sebanyak 6.157 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Selasari sebanyak 2.733 jiwa. Selain Winduraja, desa dengan jumlah penduduk relatif besar adalah Karangpawitan sebanyak 4.789 jiwa, Citeureup sebanyak 4.635 jiwa, Kawali

sebanyak 4.546 jiwa, dan Linggapura sebanyak 4.221 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah penduduk antarwilayah desa di Kecamatan Kawali.

Dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Kecamatan Kawali menunjukkan struktur penduduk yang terdiri atas kelompok usia anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Data tahun 2023 mencatat penduduk usia 10–14 tahun sebanyak 3.370 jiwa, yang terdiri atas 1.714 laki-laki dan 1.656 perempuan. Sementara itu, penduduk usia 15–19 tahun berjumlah 3.215 jiwa, terdiri atas 1.612 laki-laki dan 1.603 perempuan. Dengan demikian, apabila kelompok usia 10–19 tahun digunakan sebagai gambaran penduduk remaja, terdapat 6.585 jiwa pada kelompok umur tersebut. Jumlah tersebut terdiri atas 3.326 laki-laki dan 3.259 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kawali memiliki kelompok penduduk usia remaja yang cukup besar dan secara demografis menjadi salah satu kelompok yang relevan dengan keberadaan Program BKR.

`Selain kelompok usia remaja, terdapat pula kelompok penduduk usia 20–24 tahun sebanyak 3.593 jiwa, usia 25–29 tahun sebanyak 3.192 jiwa, dan usia 30–34 tahun sebanyak 2.866 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 0–4 tahun berjumlah 2.758 jiwa dan usia 5–9 tahun sebanyak 3.123 jiwa. Pada kelompok usia yang lebih tua, penduduk berusia 65–69 tahun berjumlah 1.876 jiwa, usia 70–74 tahun sebanyak 1.408 jiwa, dan usia 75 tahun ke atas sebanyak 1.542 jiwa. Struktur tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Kawali tidak hanya terdiri atas kelompok usia produktif, tetapi juga memiliki jumlah penduduk anak dan remaja yang cukup besar.

Keberadaan penduduk usia remaja tersebut memberikan konteks demografis yang penting bagi pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja. Berdasarkan data tahun 2023, kelompok usia 10–19 tahun mencapai 6.585 jiwa atau sekitar 15,18% dari keseluruhan penduduk Kecamatan Kawali. Artinya, sekitar satu dari setiap tujuh penduduk Kecamatan Kawali berada pada rentang usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelompok sasaran yang cukup signifikan sehingga keberadaan program pembinaan keluarga dalam mendampingi perkembangan remaja menjadi relevan dalam konteks pembangunan keluarga di Kecamatan Kawali. Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan gambaran penduduk berdasarkan kelompok umur, bukan jumlah peserta atau sasaran aktual Program BKR.

Dari perspektif keluarga berencana, data mengenai Pasangan Usia Subur (PUS) juga dapat digunakan untuk memberikan konteks terhadap karakteristik keluarga di Kecamatan Kawali. Namun, data PUS yang tersedia secara terbuka dalam publikasi BPS menunjukkan data tahun yang berbeda. Sebagai contoh, data Kecamatan Kawali Dalam Angka 2022 mencatat jumlah PUS bukan akseptor KB sebanyak 1.530 pasangan pada tahun 2021. Data tersebut terdiri atas 301 pasangan yang tidak menggunakan KB karena hamil, 641 pasangan dengan alasan ingin anak segera, 191 pasangan yang ingin menunda anak, dan 397 pasangan yang tidak ingin anak lagi. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi PUS memiliki karakteristik dan alasan yang beragam dalam menentukan penggunaan kontrasepsi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data demografis Kecamatan Kawali memberikan gambaran bahwa pelaksanaan Program BKR berlangsung

dalam lingkungan masyarakat yang memiliki jumlah penduduk mencapai 43.385 jiwa dan memiliki kelompok penduduk usia 10–19 tahun sebanyak 6.585 jiwa. Keberadaan kelompok usia tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam memberikan pendampingan kepada remaja. Oleh karena itu, karakteristik demografis Kecamatan Kawali menjadi konteks penting untuk memahami pelaksanaan Program BKR, khususnya dalam melihat bagaimana program tersebut menjangkau keluarga yang memiliki anak remaja melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan keterlibatan kader di tingkat desa.

Dengan demikian, kondisi demografis Kecamatan Kawali menunjukkan bahwa wilayah penelitian memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang serta kelompok penduduk usia remaja yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar empiris mengapa Program BKR memiliki relevansi dalam konteks Kecamatan Kawali. Selanjutnya, gambaran mengenai kelembagaan pelaksana dan kondisi aktual kelompok BKR di Kecamatan Kawali diperlukan untuk memahami bagaimana program tersebut dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan desa.

4.1.3 Kondisi Sosial dan Keluarga di Kecamatan Kawali

Kondisi sosial dan keluarga merupakan bagian penting dalam menggambarkan karakteristik masyarakat Kecamatan Kawali sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut berkaitan dengan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang menempatkan keluarga sebagai lingkungan utama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada remaja. Oleh karena itu, kondisi keluarga, pendidikan masyarakat, serta karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi

bagian yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai lingkungan sosial tempat Program BKR dilaksanakan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Kecamatan Kawali Dalam Angka 2025 menyajikan perkembangan berbagai bidang pembangunan di Kecamatan Kawali dengan periode data tahun 2024.

Dari sisi pendidikan, kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kawali dapat dilihat melalui keberadaan berbagai jenjang satuan pendidikan yang tersebar di wilayah desa. Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam perkembangan sosial masyarakat karena pendidikan tidak hanya berhubungan dengan peningkatan pengetahuan penduduk, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan anak dan remaja. Dalam konteks penelitian ini, kondisi pendidikan menjadi relevan karena keluarga dan lingkungan pendidikan merupakan dua lingkungan yang berperan dalam proses perkembangan remaja. Namun demikian, data tingkat pendidikan terakhir penduduk perlu disajikan berdasarkan tabel pendidikan dalam publikasi BPS atau data administrasi kependudukan yang digunakan oleh peneliti agar angka yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kondisi Kecamatan Kawali pada tahun penelitian.

Dari aspek keluarga, data Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Kawali memiliki 15.589 keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 43.385 jiwa. Dengan demikian, rata-rata jumlah anggota keluarga di Kecamatan Kawali adalah sekitar 3 orang per keluarga. Data tersebut menempatkan Kecamatan Kawali sebagai salah satu wilayah dengan jumlah keluarga yang cukup besar di Kabupaten Ciamis. Kondisi

ini penting dalam penelitian BKR karena keluarga merupakan lingkungan yang secara langsung berperan dalam memberikan pengasuhan, komunikasi, pengawasan, dan pendampingan terhadap remaja.

Kondisi keluarga di Kecamatan Kawali juga dapat dilihat berdasarkan tahapan kesejahteraan keluarga. Data yang dihimpun DPPKBP3A Kecamatan Kawali dan tercantum dalam publikasi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 13.470 keluarga yang terdiri atas 3.622 keluarga Pra Sejahtera, 1.011 keluarga Sejahtera I, dan 8.837 keluarga Sejahtera. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga di Kecamatan Kawali memiliki karakteristik yang beragam. Keberagaman kondisi keluarga tersebut menjadi konteks penting dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga, karena kemampuan dan keterlibatan keluarga dalam mengikuti kegiatan pembinaan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga.

Selain kondisi keluarga secara umum, karakteristik PUS juga relevan untuk menggambarkan kondisi keluarga di Kecamatan Kawali. Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kawali yang dipublikasikan melalui BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.214 PUS bukan akseptor KB. Berdasarkan alasan tidak menggunakan KB, sebanyak 272 pasangan berada dalam kondisi hamil, 481 pasangan ingin memiliki anak segera, 223 pasangan ingin menunda memiliki anak, dan 238 pasangan tidak ingin memiliki anak lagi. Data tersebut menunjukkan bahwa PUS di Kecamatan Kawali memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda dalam menentukan keputusan penggunaan kontrasepsi.

Apabila dilihat berdasarkan desa, jumlah PUS bukan akseptor KB pada tahun 2023 juga menunjukkan variasi. Desa Winduraja memiliki jumlah PUS bukan akseptor KB sebanyak 157 pasangan, Desa Citeureup sebanyak 155 pasangan, Desa Kawali sebanyak 134 pasangan, dan Desa Sindangsari sebanyak 131 pasangan. Sementara itu, jumlah paling rendah tercatat di Desa Talagasari sebanyak 44 pasangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik keluarga dan PUS tidak tersebar secara sama pada setiap desa. Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana pada tingkat kecamatan dan desa.

Data mengenai PUS bukan akseptor KB tersebut juga menunjukkan bahwa alasan tidak menggunakan kontrasepsi cukup beragam. Alasan terbesar adalah ingin memiliki anak segera sebanyak 481 pasangan, kemudian alasan hamil sebanyak 272 pasangan, tidak ingin memiliki anak lagi sebanyak 238 pasangan, dan ingin menunda memiliki anak sebanyak 223 pasangan. Keragaman alasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana berhadapan dengan kondisi serta kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut dapat menjadi gambaran pendukung untuk memahami lingkungan keluarga di Kecamatan Kawali sebelum melihat secara khusus bagaimana keluarga yang memiliki remaja memperoleh pembinaan melalui Program BKR.

Dengan demikian, kondisi sosial dan keluarga Kecamatan Kawali menunjukkan karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari aspek pendidikan, kondisi keluarga, maupun karakteristik PUS. Kecamatan Kawali memiliki 15.589

keluarga dengan rata-rata tiga anggota keluarga serta memiliki 1.214 PUS bukan akseptor KB pada tahun 2023. Pada saat yang sama, keberadaan penduduk usia remaja sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 4.1.2 menunjukkan adanya kelompok penduduk yang menjadi konteks penting bagi pelaksanaan pembinaan keluarga remaja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program BKR di Kecamatan Kawali berlangsung dalam lingkungan keluarga yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, gambaran sosial dan keluarga tersebut menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut mengenai kelembagaan pelaksana serta kondisi aktual Program BKR di Kecamatan Kawali.

4.1.4 Kelembagaan dan Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Ciamis. Dinas tersebut merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan program di lapangan, kelembagaan tersebut didukung oleh tenaga penyuluh dan petugas lapangan serta berbagai institusi masyarakat yang berperan dalam menyampaikan program kepada masyarakat. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Ciamis juga menunjukkan adanya perangkat

kelembagaan yang secara khusus mendukung pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana di tingkat lapangan, DPPKBP3A Kabupaten Ciamis memanfaatkan keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta institusi masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Laporan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa kegiatan pendayagunaan tenaga PKB/PLKB diarahkan pada pembinaan dan evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) serta program kependudukan dan keluarga berencana pada lini lapangan. Pada tahun 2022, pembinaan dan evaluasi tersebut dilaksanakan pada **27** kecamatan di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana tidak hanya berlangsung pada tingkat dinas, tetapi diteruskan melalui struktur pelaksana sampai dengan tingkat kecamatan dan masyarakat.

Kecamatan Kawali merupakan salah satu kecamatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Ciamis. Pada tingkat kecamatan terdapat Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan program KB. Dokumen kinerja DPPKBP3A Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 27 Balai Penyuluhan KB yang menjadi sasaran operasionalisasi dan kegiatan KIE di Kabupaten Ciamis, sejalan dengan jumlah kecamatan yang ada. Keberadaan balai penyuluhan tersebut memberikan ruang bagi petugas lapangan untuk melaksanakan komunikasi,

informasi, dan edukasi serta melakukan koordinasi dengan unsur pelaksana program pada tingkat kecamatan dan desa.

Pada tingkat desa, pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana melibatkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader yang berfungsi sebagai penggerak serta penghubung program dengan masyarakat. Laporan kinerja Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan PLKB, PKB, Teladan KB, TPD, serta IMP atau kader KB, baik secara individual maupun kelompok. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya mengandalkan aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui kader dan institusi yang berada dekat dengan keluarga sasaran.

Dalam konteks Program Bina Keluarga Remaja (BKR), kelembagaan pelaksana memiliki hubungan yang berjenjang. Pada tingkat kabupaten, DPPKBP3A berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan program. Pada tingkat lapangan, PKB/PLKB menjalankan fungsi penyuluhan, pembinaan, koordinasi, dan pendampingan program kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah desa dan kader atau kelompok kegiatan BKR menjadi unsur yang berhubungan lebih dekat dengan keluarga sebagai sasaran program. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR merupakan proses yang melibatkan beberapa aktor, mulai dari perangkat daerah hingga unsur masyarakat di tingkat desa.

Keterlibatan kader dalam pembangunan keluarga juga menjadi bagian dari kebijakan daerah. Dalam dokumen perencanaan DPPKBP3A Kabupaten Ciamis

Tahun 2025–2029, salah satu indikator yang ditetapkan adalah cakupan BKB/BKR/BKL terbina sebesar 100 persen, selain indikator mengenai cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dan rasio PPKBD pada setiap desa/kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kelompok kegiatan keluarga, termasuk BKR, ditempatkan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Pelaksanaan program juga menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah daerah dan BKKBN sebagai lembaga pemerintah pusat yang menangani bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Hubungan tersebut terlihat dalam pelaksanaan kegiatan program KB di Kabupaten Ciamis. Salah satu contohnya adalah kegiatan pelayanan KB di RSUD Kawali yang pada tahun 2022 dimonitor secara langsung oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat melalui BKKBN, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Ciamis.

Dalam pelaksanaan Program BKR di Kecamatan Kawali, koordinasi antarpelaksana menjadi unsur penting karena kegiatan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi kepada keluarga, tetapi juga mencakup penjadwalan kegiatan, mobilisasi peserta, penyampaian informasi, pendampingan kader, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan. Dengan demikian, koordinasi antara petugas penyuluh, pemerintah desa, kader BKR, dan keluarga sasaran diperlukan agar

kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan pada tingkat lapangan. Hal ini sejalan dengan karakteristik pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Ciamis yang menempatkan PKB/PLKB dan institusi masyarakat sebagai unsur penting dalam pelaksanaan program pada lini lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kelembagaan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di Kecamatan Kawali dapat dipahami sebagai suatu rangkaian pelaksana yang melibatkan BKKBN, DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, PKB/PLKB, pemerintah kecamatan dan desa, serta kader atau institusi masyarakat. Masing-masing unsur memiliki peran yang saling berkaitan dalam meneruskan kebijakan dan program sampai kepada keluarga sasaran. Struktur kelembagaan tersebut menjadi konteks penting dalam penelitian ini karena implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program secara administratif, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi, koordinasi, sumber daya, dan peran masing-masing pelaksana berjalan dalam praktik di lapangan.

4.1.5 Gambaran Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu bentuk kegiatan pembangunan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan orang tua serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang remaja. Dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis, BKR dipahami sebagai kelompok kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dalam membina remaja, baik dari aspek fisik, intelektual, kesehatan

reproduksi, mental, emosional, sosial, moral, maupun spiritual melalui komunikasi yang efektif antara orang tua atau keluarga dengan remaja. Dengan demikian, BKR tidak hanya diarahkan pada remajanya, tetapi juga pada peningkatan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan terhadap remaja.

Pelaksanaan BKR di Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dalam dokumen perencanaan daerah, BKR ditempatkan sebagai salah satu kelompok kegiatan pembangunan keluarga bersama dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menetapkan indikator cakupan BKB/BKR/BKL terbina sebagai salah satu indikator pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sasaran utama kegiatan BKR adalah keluarga yang mempunyai anak remaja. Sasaran tersebut menjadi penting karena keluarga memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada remaja ketika menghadapi perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Melalui kegiatan BKR, keluarga diberikan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dan melakukan pendampingan terhadap remaja secara lebih baik. Dalam konteks Kecamatan Kawali, keberadaan kelompok penduduk usia remaja menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga. Berdasarkan data

kependudukan yang telah diuraikan sebelumnya, Kecamatan Kawali memiliki penduduk usia 10–19 tahun sebanyak 6.585 jiwa pada tahun 2023. Angka tersebut menggambarkan besarnya kelompok penduduk remaja yang berada dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Kawali, meskipun angka tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan jumlah sasaran atau anggota BKR.

Secara umum, pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa BKR telah menjadi bagian dari sistem kegiatan keluarga yang dilaksanakan melalui kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat. Data Statistik Sektoral Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 4.130 anggota kelompok BKR, dengan 2.251 anggota kelompok BKR yang ber-KB. Data tersebut menghasilkan cakupan anggota BKR yang ber-KB sebesar 54,50 persen. Namun, angka tersebut merupakan capaian Kabupaten Ciamis dan bukan angka khusus Kecamatan Kawali, sehingga dalam penelitian ini perlu dibedakan antara data makro Kabupaten Ciamis dan kondisi aktual BKR di Kecamatan Kawali.

Perkembangan cakupan anggota BKR yang ber-KB di Kabupaten Ciamis juga menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Cakupan tersebut tercatat sebesar 52,64 persen pada 2019, kemudian menjadi 50,44 persen pada 2020, 48,61 persen pada 2021, mengalami penurunan menjadi 21,08 persen pada 2022, kemudian meningkat menjadi 54,50 persen pada 2023. Data terbaru dalam dokumen perencanaan Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 cakupan anggota BKR yang ber-KB kembali menjadi 39,76 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator BKR belum menunjukkan

perkembangan yang konsisten dari tahun ke tahun. Akan tetapi, data tersebut merupakan indikator tingkat Kabupaten Ciamis sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan secara langsung bahwa pelaksanaan BKR di Kecamatan Kawali mengalami kondisi yang sama.

Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Kawali, kegiatan BKR dilaksanakan melalui keterlibatan petugas lapangan, pemerintah desa, dan kader kelompok kegiatan. Petugas lapangan berperan dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, pendampingan, serta melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kader. Sementara itu, kader BKR menjadi unsur yang berhubungan langsung dengan keluarga peserta kegiatan. Pola tersebut menempatkan BKR sebagai program yang pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana pada tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, bagian ini selanjutnya perlu menjelaskan jumlah kelompok BKR yang terdapat di Kecamatan Kawali. Berdasarkan data administrasi yang diperoleh dari tim BKKBN Kecamatan Kawali, PLKB, kader BKR, pemerintah Kecamatan, dan keluarga sasaran terdapat 11 Keompok BKR yang tersebar di 11 Desa, yaitu Desa Kawali, Kawalimukti, Talagasari, Sindangsari, Winduraja, Citeureup, Purwasari, Margamulya, Selasari, Karangpawitan, dan Linggapura. Keberadaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR telah memiliki wadah kegiatan pada tingkat masyarakat. Data tersebut perlu dilengkapi dengan jumlah kader dan anggota pada masing-masing kelompok agar dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas jangkauan program di Kecamatan Kawali.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan BKR di Kecamatan Kawali pada dasarnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari koordinasi petugas dengan kader dan pemerintah desa, penyampaian informasi kepada keluarga sasaran, pelaksanaan kegiatan pembinaan atau penyuluhan, hingga pencatatan hasil kegiatan. Dalam mekanisme tersebut, kader memiliki posisi penting karena menjadi penghubung antara petugas pelaksana dengan keluarga peserta. Sementara itu, petugas lapangan berperan dalam memberikan pembinaan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Bentuk koordinasi dan pembagian peran tersebut selanjutnya menjadi bagian penting untuk dianalisis dalam penelitian mengenai implementasi Program BKR.

Pencatatan dan pelaporan kegiatan merupakan bagian lain dari pelaksanaan BKR yang perlu diperhatikan. Data sektoral Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa sistem pembangunan keluarga juga menggunakan sejumlah indikator yang berkaitan dengan jumlah kelompok dan anggota BKR, termasuk jumlah anggota BKR dan jumlah anggota BKR yang ber-KB. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan BKR tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, tetapi juga membutuhkan pencatatan data sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi program. Dalam konteks Kecamatan Kawali, mekanisme pencatatan dan pelaporan perlu dijelaskan berdasarkan dokumen administrasi yang digunakan oleh kader dan petugas, termasuk pihak yang melakukan pencatatan, bentuk laporan, waktu pelaporan, serta kepada siapa laporan disampaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, Program Bina Keluarga Remaja di Kecamatan Kawali merupakan bagian dari pembangunan keluarga yang

dilaksanakan melalui keterlibatan pemerintah daerah, petugas lapangan, pemerintah desa, kader, dan keluarga sebagai sasaran program. Secara makro, keberadaan BKR di Kabupaten Ciamis telah menjadi bagian dari indikator pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun, fluktuasi cakupan anggota BKR yang ber-KB dari tahun 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa capaian program pada tingkat kabupaten masih mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menjadi konteks awal untuk selanjutnya melihat secara lebih khusus bagaimana Program BKR dilaksanakan di Kecamatan Kawali, termasuk bagaimana komunikasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi memengaruhi pelaksanaan program.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh Tim BKKBN Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu variabel penting dalam proses implementasi kebijakan, karena keberhasilan implementasi dapat diukur melalui tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan. Standar dan sasaran yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksana mengenai tindakan yang harus dilakukan serta hasil yang hendak dicapai. Sebaliknya, apabila standar dan sasaran tidak diterjemahkan secara operasional, pelaksana dapat mengalami perbedaan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan. Dalam konteks Program Bina

Keluarga Remaja (BKR), standar dan sasaran tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi perlu diterjemahkan dalam bentuk tujuan pembinaan, sasaran keluarga, target kehadiran, keberlangsungan kelompok, pelaksanaan pembinaan, serta pencatatan kegiatan. Hal ini sejalan dengan kajian dalam landasan teori penelitian yang menempatkan standar dan tujuan kebijakan sebagai titik awal pengukuran kinerja implementasi dan menekankan bahwa target partisipasi serta indikator capaian BKR perlu diterjemahkan secara operasional (Efiyanti et al., 2022; Muksin et al., 2024; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan sasaran Program BKR di Kecamatan Kawali secara umum telah dipahami oleh para pelaksana maupun keluarga sasaran, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman pada tingkat target operasional. Hal tersebut pertama-tama terlihat dari pemahaman mengenai tujuan program. Informan 1 menjelaskan dan menegaskan bahwa:

> *"tujuan BKR diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam melakukan pembinaan terhadap remaja, dan sasaran pembinaan bukan hanya remaja, tetapi juga orang tua agar mampu memberikan pendampingan, membangun komunikasi, dan melakukan pengawasan terhadap anak remajanya".*

Tujuan tersebut kemudian diterapkan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan bersama PLKB dan kader. Pemahaman tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"tujuan BKR dalam pelaksanaan di lapangan diarahkan agar keluarga yang mempunyai anak remaja memiliki pengetahuan mengenai cara menghadapi perkembangan remaja".*

Informan 2 juga menjelaskan bahwa:

> *"pengetahuan tersebut disampaikan melalui penyuluhan kepada kader yang selanjutnya diteruskan kepada keluarga sasaran".*

Dengan demikian, tujuan program tidak hanya dipahami pada tingkat konseptual, tetapi telah diterjemahkan oleh PLKB ke dalam bentuk kegiatan penyuluhan sebagai aktivitas implementasi di lapangan.

Pada tingkat pelaksana masyarakat, Informan 3 juga menunjukkan pemahaman yang sejalan. Informan 3 memandang BKR sebagai kegiatan yang membantu orang tua agar lebih memahami anak remajanya. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui pemberian informasi kepada keluarga mengenai cara berkomunikasi dan mendampingi remaja. Sementara itu, Informan 4 memahami tujuan BKR sebagai upaya membantu orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak yang telah memasuki usia remaja. Informan 4 juga menyampaikan bahwa:

> *"melalui kegiatan BKR keluarga memperoleh penjelasan mengenai cara menghadapi remaja dan membangun komunikasi dengan anak".*

Berdasarkan kesesuaian jawaban keempat informan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pemahaman mengenai tujuan substantif Program BKR, yaitu meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendampingi dan membina anak remaja. Hal ini penting dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), karena standar kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan ketika pelaksana mempunyai pemahaman yang relatif sama mengenai apa yang hendak dicapai. Kajian dalam landasan teori juga menegaskan bahwa model Van Meter dan Van Horn relevan untuk BKR karena keberhasilan implementasi ditentukan oleh keterkaitan antara tujuan program, materi pembinaan, dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Dilihat dari aspek kejelasan sasaran, hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai anak remaja telah dipahami sebagai sasaran utama Program BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sasaran utama BKR adalah keluarga yang mempunyai anak remaja. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan data keluarga dan pendataan di tingkat wilayah, kemudian pelaksana menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing desa".*

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"penentuan sasaran dilakukan dengan melihat keluarga yang mempunyai anak remaja di wilayah kerjanya. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, dengan bantuan kader dalam mengidentifikasi keluarga yang memiliki anak remaja".*

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"identifikasi keluarga sasaran dilakukan melalui lingkungan sekitar dan data yang tersedia di desa. Setelah keluarga yang mempunyai anak remaja diketahui, kader memberikan informasi mengenai kegiatan BKR kepada keluarga tersebut".*

Pada sisi kelompok sasaran, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"menjadi sasaran BKR melalui informasi dari kader dan memahami bahwa keluarga yang memiliki anak remaja diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan".*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan sasaran telah berjalan dari tingkat pendataan menuju pelaksanaan di lapangan. Tim BKKBN menggunakan data keluarga, PLKB melakukan identifikasi berdasarkan wilayah kerja, kader membantu menjangkau keluarga, sedangkan keluarga menerima informasi mengenai kedudukannya sebagai sasaran program. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara proses penentuan sasaran dan proses penyampaian informasi kepada kelompok sasaran.

Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi BKR. Hardiyanti dan Ilyas (2023), misalnya, menunjukkan bahwa implementasi BKR dilaksanakan melalui penyuluhan, pembentukan kader, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan, serta kemitraan, dengan keaktifan kader dan sasaran menjadi salah satu faktor pendukung program. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran harus diikuti dengan kemampuan pelaksana untuk menjangkau sasaran secara nyata.

Selain tujuan dan sasaran, standar kebijakan juga terlihat dari penggunaan pedoman dalam pelaksanaan BKR. Informan 1 menyampaikan bahwa:

> *"pelaksanaan BKR mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam program pembangunan keluarga dan pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi petugas dan kader dalam memberikan pembinaan kepada keluarga".*

Pada tingkat teknis, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"pedoman digunakan sebagai acuan dalam menentukan materi dan pelaksanaan kegiatan, tetapi penerapannya di lapangan tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan keluarga".*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa standar program tidak diterapkan secara kaku, melainkan diterjemahkan sesuai kondisi lokal. Hal ini justru sejalan dengan karakter implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975), bahwa standar kebijakan perlu dipahami dan diterapkan dalam konteks lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Pada tingkat kader, Informan 3 menyatakan bahwa:

"kader memperoleh arahan dari PLKB mengenai materi dan cara pelaksanaan kegiatan. Kader tidak melaksanakan kegiatan secara mandiri, tetapi mengikuti arahan yang diberikan petugas".

Hal ini menunjukkan bahwa pedoman program diterjemahkan melalui proses pembinaan dan pengarahan dari PLKB kepada kader. Berbeda dengan pelaksana, Informan 4 yang mengaku bahwa:

> *"tidak terlalu mengetahui pedoman BKR secara tertulis. Keluarga lebih mengenal bentuk pelaksanaan program melalui pertemuan dan penyuluhan yang diberikan oleh kader atau petugas".*

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara pelaksana dan sasaran. Pelaksana memahami pedoman sebagai dasar teknis pelaksanaan, sedangkan keluarga lebih memahami program melalui bentuk kegiatan yang mereka ikuti.

Dengan demikian, standar pelaksanaan BKR dapat dikatakan telah tersedia dan digunakan oleh pelaksana, tetapi pemahaman terhadap standar tersebut belum sepenuhnya sampai pada tingkat keluarga sasaran. Hal ini tidak berarti keluarga harus menguasai pedoman teknis program, tetapi menunjukkan bahwa informasi mengenai tujuan, bentuk kegiatan, dan hasil yang diharapkan perlu terus disampaikan secara sederhana agar keluarga memahami posisi dan perannya dalam program.

Pada aspek target, terdapat temuan yang lebih menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksana dan kelompok sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"target BKR tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga keberlangsungan kelompok BKR dan sejauh mana keluarga memperoleh pembinaan. Capaian kegiatan juga dipantau melalui laporan yang disampaikan petugas lapangan".*

Informan 2 kemudian memperjelas bahwa:

> *"target kegiatan berkaitan dengan keberlangsungan kelompok, kehadiran keluarga, pelaksanaan pembinaan, serta pencatatan kegiatan"*. Sementara itu, Informan 3 mengungkapkan bahwa: *"pihaknya berusaha agar keluarga sasaran hadir dalam setiap kegiatan, tetapi kehadiran tersebut belum selalu konsisten. keluarga juga memiliki pekerjaan dan kegiatan keluarga lainnya sehingga jumlah peserta dapat berubah pada setiap kegiatan"*.

Kondisi tersebut berbeda dengan pemahaman Informan 4 mengetahui bahwa:

> *"kegiatan BKR bertujuan memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai remaja, tetapi tidak mengetahui secara rinci target jumlah peserta maupun target program secara keseluruhan*".

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa target program lebih dipahami oleh pelaksana dibandingkan oleh keluarga sasaran. Pelaksana memahami target dalam bentuk keberlangsungan kelompok, kehadiran keluarga, pembinaan, dan pencatatan, sedangkan keluarga lebih memahami BKR dari sisi manfaat dan kegiatan yang diterima. Kondisi ini dapat dipahami karena keluarga sasaran memang tidak berada pada posisi sebagai pelaksana administratif program. Namun, dari perspektif implementasi, semakin jelas keluarga memahami tujuan dan manfaat kegiatan, semakin besar peluang munculnya partisipasi yang berkelanjutan.

Kajian teori dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa pada konteks BKR, tujuan pembinaan, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan perlu diterjemahkan secara operasional dan tidak berhenti pada rumusan normatif (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023). Dengan demikian, temuan mengenai perbedaan pemahaman target antara

pelaksana dan keluarga menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa partisipasi keluarga belum sepenuhnya konsisten.

Dilihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan dan ketentuan program, Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"secara umum pelaksanaan BKR telah diarahkan sesuai dengan tujuan, yaitu melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Namun, di lapangan masih terdapat kendala, terutama pada konsistensi kehadiran keluarga dan kesinambungan kegiatan".* kemudian Informan 2 juga menyatakan bahwa: *"kegiatan telah sesuai dengan tujuan program, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal karena tidak semua keluarga sasaran dapat mengikuti kegiatan secara rutin".*

Pada tingkat kader, Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"materi yang diberikan berkaitan dengan permasalahan remaja dan keluarga sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan program".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kegiatan yang diikuti memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan orang tua dalam menghadapi anak remaja".*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kesesuaian program dengan tujuan telah tercapai pada aspek proses dan substansi kegiatan, terutama melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Permasalahan justru terlihat pada aspek konsistensi partisipasi sasaran dan kesinambungan kegiatan. Artinya, persoalan implementasi tidak terutama berada pada ketidaksesuaian isi program, melainkan pada kemampuan program untuk memastikan bahwa keluarga sasaran dapat mengikuti proses pembinaan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara tersebut kemudian perlu dipertemukan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dokumentasi penelitian, Kecamatan Kawali memiliki 11 desa, sehingga pelaksanaan program pada tingkat kecamatan

membutuhkan jangkauan pelaksana dan koordinasi yang cukup luas. Kondisi tersebut memberikan konteks bahwa penentuan sasaran BKR tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan terpusat, tetapi membutuhkan identifikasi keluarga sampai pada tingkat desa dan masyarakat.

Dokumentasi wawancara juga memperlihatkan adanya tahapan pelaksanaan yang dimulai dari penentuan kegiatan dan sasaran, menghubungi kader serta keluarga, pelaksanaan penyuluhan, kemudian pencatatan dan pelaporan. Pola tersebut menunjukkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tahap pendataan, tetapi dilanjutkan dengan upaya menjangkau dan melibatkan keluarga dalam kegiatan.

Jika dikaitkan dengan hasil observasi terhadap pelaksanaan kegiatan, maka keberadaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan menunjukkan bahwa tujuan BKR telah diterjemahkan ke dalam aktivitas nyata. Namun, temuan wawancara mengenai perubahan jumlah peserta dan ketidakkonsistenan kehadiran menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya identik dengan tercapainya sasaran secara optimal. Dengan kata lain, kegiatan telah berjalan, tetapi jangkauan dan kesinambungan partisipasi keluarga masih menjadi persoalan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dimensi standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali dapat dikatakan cukup jelas pada tingkat substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada tingkat operasional.

Kejelasan substantif terlihat dari adanya kesamaan pemahaman antara Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 mengenai tujuan BKR, yaitu

memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada orang tua dalam mendampingi, berkomunikasi, dan membina anak remaja. Kejelasan sasaran juga terlihat karena seluruh informan memahami bahwa keluarga yang mempunyai anak remaja merupakan kelompok sasaran BKR.

Namun, pada aspek operasional masih terdapat kesenjangan. Informan 1 dan Informan 2 memahami target program secara lebih rinci, yaitu keberlangsungan kelompok, kehadiran keluarga, pelaksanaan pembinaan, serta pencatatan kegiatan. Sebaliknya, Informan 4 tidak mengetahui secara rinci target jumlah peserta maupun target program secara keseluruhan. Sementara Informan 3 mengungkapkan bahwa kehadiran keluarga belum konsisten karena pekerjaan dan kegiatan keluarga.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus dapat dipahami oleh pelaksana agar implementasi dapat berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Dalam konteks BKR, temuan penelitian memperlihatkan bahwa ukuran dan tujuan sudah cukup dipahami oleh pelaksana, tetapi penerjemahan target ke dalam partisipasi keluarga belum sepenuhnya berhasil.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Fitria dan Riyadh (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR belum optimal ketika pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah dan partisipasi sasaran belum sesuai dengan target yang diharapkan. Penelitian Selmi et al. (2021) juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan kesadaran anggota, sosialisasi yang belum optimal, serta ketidakkonsistenan koordinasi jadwal menjadi persoalan dalam pelaksanaan BKR.

Dengan demikian, hasil penelitian pada dimensi standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa Program BKR di Kecamatan Kawali telah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta telah diterjemahkan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena pemahaman terhadap target operasional belum merata dan partisipasi keluarga sasaran belum konsisten. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidakjelasan standar program, melainkan pada kesenjangan antara standar yang dipahami pelaksana dengan kemampua program dalam mencapai sasaran secara konsisten di tingkat keluarga.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan waktu menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan nyata. Dalam konteks BKR, implementasi program bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program BKR di Kecamatan Kawali telah tersedia, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksana tersedia, namun cakupan wilayah dan banyaknya kegiatan yang harus ditangani cukup besar*".

Selanjutnya Informan 2 menyampaikan bahwa:

> *"petugas dan kader tersedia, tetapi harus membagi perhatian dengan program keluarga berencana lainnya"*. Kemudian Informan 3 menyatakan

bahwa: *"jumlah kader cukup membantu, walaupun tidak semua kader dapat hadir setiap kegiatan karena kesibukan masing-masing".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa:

"kader atau petugas biasanya memberikan informasi mengenai kegiatan".

Dengan demikian, ketersediaan SDM telah mendukung pelaksanaan program, tetapi masih dipengaruhi oleh beban tugas dan keterbatasan waktu.

Temuan ini sejalan dengan Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) yang menemukan bahwa kekurangan SDM dan lemahnya partisipasi kader menjadi salah satu hambatan implementasi BKR.

Pada aspek kompetensi, Informan 1 menyatakan bahwa:

"kompetensi petugas telah mendukung pelaksanaan BKR dan kader mendapatkan pembinaan".

Informan 2 menjelaskan bahwa:

"kader memahami tugas dasarnya, tetapi kemampuan antar-kader berbeda sehingga pembinaan dan pendampingan masih diperlukan".

Informan 3 menyampaikan bahwa:

"kader memperoleh arahan dari PLKB dan berkonsultasi apabila terdapat materi yang belum dipahami". Kemudian Informan 4 menyatakan bahwa: *"kader cukup membantu dalam menjelaskan materi dan memberikan kesempatan untuk bertanya".*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana cukup mendukung, tetapi peningkatan kapasitas kader masih diperlukan. Temuan ini diperkuat oleh Yorita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi, pembentukan kelompok, dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan kader BKR.

Pada aspek anggaran, Informan 1 menyampaikan bahwa

> *"pelaksanaan BKR menyesuaikan dengan dukungan anggaran dan prioritas kegiatan pembangunan keluarga*".

Selanjutnya Informan 2 menyatakan bahwa:

> "*anggaran tersedia, tetapi belum selalu memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan",*

Sedangkan Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kegiatan banyak memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sehingga tidak selalu membutuhkan biaya besar".*

Sementara itu, Informan 4:

> *"tidak menganggap biaya sebagai hambatan karena kegiatan tidak membebankan biaya khusus kepada peserta*".

Dengan demikian, keterbatasan anggaran lebih berpengaruh terhadap dukungan operasional kegiatan daripada terhadap akses keluarga. Temuan ini sejalan dengan Hardiyanti dan Ilyas (2023) yang menemukan bahwa sarana prasarana dan dukungan pemerintah menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan pendanaan menjadi salah satu faktor penghambat implementasi BKR.

Pada aspek sarana dan prasarana, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sarana dasar tersedia dan kegiatan memanfaatkan fasilitas desa atau masyarakat".*

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"tempat kegiatan biasanya tersedia, tetapi media penyuluhan dan perlengkapan pendukung masih perlu disesuaikan*".

Sedangkan Informan 3:

"menilai tempat pertemuan cukup untuk kegiatan".

hal ini sejalan dengan Informan 4:

"menilai tempat kegiatan cukup nyaman".

Dengan demikian, tempat kegiatan bukan menjadi hambatan utama, sedangkan keterbatasan lebih terlihat pada media dan fasilitas pendukung. Temuan tersebut sejalan dengan Dohan dan Rahayu (2020) yang menemukan adanya keterbatasan alat peraga serta kemampuan kader dalam menyiapkan materi penyuluhan pada pelaksanaan BKR.

Pada aspek informasi dan materi, Informan 1 menyebutkan bahwa:

"materi BKR mencakup komunikasi orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, dan pembentukan karakter".

Selanjutnya, Informan 2 menjelaskan bahwa:

"materi disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan permasalahan yang berkembang".

Begitupun dengan Informan 3:

"memperoleh materi dari petugas dan menyampaikannya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana".

Sementara itu, Informan 4:

"menilai materi mudah dipahami karena disampaikan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa materi dan informasi telah tersedia serta cukup mampu diterima oleh keluarga sasaran. Hal ini sejalan dengan Dewi et al. (2022), Khairina dan Saleh (2021), serta Kosim et al. (2024**)** yang dalam

landasan teori menekankan pentingnya pembinaan rutin, kader yang terlatih, materi yang sesuai, dan monitoring berkelanjutan dalam implementasi BKR.

Pada aspek waktu pelaksanaan, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> "*waktu kegiatan disesuaikan dengan kondisi keluarga sasaran dan kesediaan kader.*

Selanjutnya, Informan 2 menyebutkan bahwa:

> "*tidak semua keluarga memiliki waktu luang yang sama*".

Begitupun dengan Informan 4 juga menyampaikan bahwa:

> "*dirinya terkadang tidak dapat hadir apabila kegiatan bertepatan dengan pekerjaan atau aktivitas rumah tangga".*

Dengan demikian, keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konsistensi partisipasi keluarga. Temuan ini sejalan dengan Selmi et al. (2021) yang dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa koordinasi dalam penentuan jadwal kegiatan BKR belum konsisten dan partisipasi anggota masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali telah tersedia dan cukup mendukung, tetapi belum optimal. Sumber daya manusia, kompetensi, materi, serta fasilitas dasar telah mendukung kegiatan, sedangkan beban kerja, keterbatasan anggaran operasional, fasilitas pendukung, dan waktu pelaksana maupun keluarga masih menjadi kendala. Kondisi tersebut memperkuat asumsi Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya serta kemampuan pelaksana dalam memanfaatkannya secara efektif.

3. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk menganalisis implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn yang digunakan dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu dari enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Landasan teori penelitian menjelaskan bahwa hasil implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh hubungan antara seluruh variabel tersebut (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023; Muksin et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, pelaksanaan Program BKR di Kecamatan Kawali melibatkan beberapa unsur, yaitu Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader BKR, dan keluarga sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah, petugas lapangan, pemerintah desa, dan kader, dengan masing-masing pihak memiliki peran dalam pelaksanaan BKR*".

Sementara itu, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"dirinya berperan sebagai petugas lapangan yang melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kader serta pemerintah desa".*

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader membantu petugas dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat, terutama dalam menghubungi dan mengajak keluarga sasaran*".

Adapun Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kader dan petugas lapangan merupakan pihak yang paling sering berhubungan dengan keluarga dalam pelaksanaan BKR"*.

Temuan dari keempat informan tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR dilaksanakan melalui keterlibatan beberapa aktor dengan fungsi yang berbeda.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang terdesentralisasi, keberhasilan implementasi program publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, khususnya kapasitas analitis, operasional, dan politik. Desentralisasi memang memberikan tanggung jawab layanan publik kepada tingkat daerah, tetapi pada saat yang sama dapat menghadirkan persoalan ketimpangan kapasitas lokal (Setiawan et al., 2022). Dengan demikian, keterlibatan Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, dan kader dalam pelaksanaan BKR di Kecamatan Kawali menunjukkan adanya pembagian fungsi antara aktor yang memiliki kapasitas dan posisi berbeda dalam implementasi program.

Selanjutnya, dari aspek pembagian tugas, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap pelaksana memiliki fungsi masing-masing. Imforman 1 menjelaskan bahwa:

"Tim BKKBN berperan dalam memberikan arahan dan pembinaan". Kemudian Informan 2 menjalankan:

> *"fungsi teknis di lapangan melalui penyuluhan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan".*

Sedangkan Informan 3:

> *"membantu menjangkau keluarga sasaran, mengumpulkan peserta, menyampaikan informasi, membantu pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan kondisi kegiatan kepada petugas*".

Sementara itu, Informan 4:

> *"berperan sebagai penerima pembinaan dan menerapkan informasi yang diperoleh dalam mendampingi anak remaja".*

Adanya pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing unsur pelaksana telah memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Program BKR.

Pembagian tugas tersebut memiliki keterkaitan dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi BKR membutuhkan kapasitas organisasi pelaksana dan keterlibatan aktor lokal. Landasan teori menempatkan kapasitas organisasi pelaksana sebagai aspek penting karena program pembangunan keluarga di tingkat lokal menuntut koordinasi lintas aktor, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan penguatan kapasitas organisasi pelaksana (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024). Oleh karena itu, pembagian tugas antara Tim BKKBN, PLKB, kader, dan pemerintah desa merupakan bagian dari kapasitas organisasi yang diperlukan agar kebijakan BKR dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di masyarakat.

Karakteristik badan pelaksana juga terlihat dari pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keputusan yang berkaitan dengan kebijakan berada pada tingkat yang mempunyai kewenangan, sedangkan pelaksana di lapangan menjalankan kegiatan dengan menyesuaikannya terhadap kondisi wilayah"*.

Selanjutnya Informan 2 menjelaskan bahwa*:*

> *"persoalan teknis yang masih dapat ditangani di lapangan diselesaikan oleh PLKB, sedangkan persoalan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut dikoordinasikan kepada atasan*".

Sementara itu, Informan 3 menyatakan bahwa:

> *"kader tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, tetapi menyampaikan permasalahan kepada PLKB".*

Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan secara berjenjang antara Tim BKKBN, PLKB, dan kader. Pembagian kewenangan tersebut dapat dipahami melalui perspektif implementasi yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses yang adaptif dan dipengaruhi oleh struktur organisasi serta hubungan antaraktor. Dalam konteks administrasi publik kontemporer, implementasi dipahami sebagai proses yang kolaboratif, kontekstual, dan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi lokal serta keterlibatan masyarakat (Putera et al., 2023; Nurman et al., 2024; Setiawan et al.,

2022). Dengan demikian, adanya kewenangan berjenjang dalam pelaksanaan BKR memberikan ruang bagi pelaksana lapangan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masyarakat, tetapi tetap berada dalam struktur kewenangan organisasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan pembagian tugas belum sepenuhnya diikuti dengan kapasitas pelaksana yang optimal. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"petugas dan kader tersedia, tetapi cakupan wilayah dan kegiatan yang harus ditangani cukup banyak*".

Kemudian Informan 2 menyampaikan bahwa:

> *"petugas harus membagi perhatian dengan program keluarga berencana lainnya".*

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"jumlah kader cukup membantu kegiatan, tetapi tidak semua kader selalu dapat hadir karena memiliki kesibukan masing-masing".*

Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana secara struktur telah tersedia, tetapi masih menghadapi keterbatasan dari sisi kapasitas dan konsistensi keterlibatan pelaksana.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil kajian yang terdapat dalam landasan teori. Literatur BKR yang dirangkum dalam landasan teori menunjukkan bahwa hambatan yang paling konsisten dalam implementasi BKR adalah kekurangan SDM, rendahnya komitmen antarsektor, dan lemahnya partisipasi kader (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Selain itu, literatur yang lebih luas mengenai kebijakan kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya,

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor inti keberhasilan program BKKBN (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kader memiliki posisi strategis dalam karakteristik badan pelaksana BKR. Kader merupakan aktor yang berhubungan langsung dengan keluarga sasaran sehingga keberadaan dan keterlibatan kader sangat menentukan jangkauan program. Hal ini sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi BKR membutuhkan kolaborasi antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024). Dengan demikian, kader tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara organisasi pemerintah dengan keluarga sasaran.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pelaksana menunjukkan bahwa penguatan organisasi dan sumber daya manusia menjadi kebutuhan dalam implementasi BKR. Landasan teori penelitian menyebutkan bahwa studi mengenai program Bina Keluarga Balita menunjukkan peran penyuluh lapangan sangat penting, kinerja penyuluh menentukan keberhasilan intervensi terhadap kelompok sasaran, dan distribusi personel yang tidak merata dapat menjadi kendala implementasi di daerah (Hutagalung et al., 2021). Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Kecamatan Kawali, di mana pelaksana tersedia tetapi harus membagi perhatian dengan berbagai kegiatan dan program lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, 2, 3, dan 4, dapat diketahui bahwa karakteristik badan pelaksana BKR di Kecamatan Kawali telah memiliki struktur, pembagian tugas, dan kewenangan yang relatif

jelas. Hal ini memberikan gambaran mengenai keterlibatan organisasi pelaksana, yang ditunjukan melalui fungsi PLKB sebagai pelaksana teknis dan koordinator lapangan, sebagai penghubung dengan keluarga sasaran. Konsistensi informasi tersebut menunjukkan bahwa struktur pelaksana telah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana masih menghadapi persoalan kapasitas, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu, beban kerja petugas, dan konsistensi keterlibatan kader. Kondisi ini sesuai dengan landasan teori yang menempatkan kapasitas birokrasi lokal, struktur birokrasi, ketersediaan SDM, dan partisipasi kader sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi program BKKBN dan BKR (Setiawan et al., 2022; Suardi Mukhlis et al., 2025; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025).

Berdasarkan hasil reduksi, penyajian, dan analisis data, karakteristik badan pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat dikategorikan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya keterlibatan Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader, dan keluarga sasaran serta adanya pembagian tugas dan kewenangan yang relatif jelas. Temuan ini sejalan dengan landasan teori yang menekankan pentingnya kapasitas organisasi pelaksana, struktur birokrasi, koordinasi lintas aktor, serta keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BKR (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024; Amini et al., 2024; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Akan tetapi, karakteristik badan pelaksana belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kapasitas pelaksana, beban kerja petugas, dan konsistensi keterlibatan kader. Oleh karena itu, temuan utama pada dimensi ini adalah bahwa struktur dan pembagian tugas badan pelaksana BKR sudah jelas, tetapi kapasitas dan konsistensi pelaksana masih perlu diperkuat. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan literatur dalam landasan teori yang mengidentifikasi kekurangan SDM dan lemahnya partisipasi kader sebagai hambatan yang konsisten dalam implementasi BKR (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025).

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu dimensi penting dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi menjadi faktor yang menentukan karena standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana secara akurat dan konsisten. Landasan teori penelitian menjelaskan bahwa koordinasi formal saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sinkronisasi di lapangan, sehingga komunikasi harus mampu menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan kegiatan secara nyata (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam pelaksanaan BKR di Kecamatan Kawali berlangsung secara berjenjang, yaitu informasi dari tingkat

pelaksana yang lebih tinggi diteruskan kepada PLKB, kemudian kepada kader, dan selanjutnya disampaikan kepada keluarga sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"informasi mengenai BKR disampaikan secara berjenjang kepada petugas pelaksana, kemudian diteruskan kepada kader dan keluarga sasaran*".

Sementara itu, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"informasi dari tingkat atas diterima oleh PLKB dan selanjutnya disampaikan kepada kader, sedangkan informasi mengenai kegiatan juga disampaikan melalui komunikasi langsung*.

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"informasi dari PLKB diterima oleh kader dan kemudian disampaikan kepada keluarga melalui komunikasi langsung atau dengan menghubungi keluarga sebelum kegiatan".*

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa:

> *"nformasi mengenai kegiatan BKR biasanya diperoleh dari kader, termasuk informasi mengenai waktu dan tempat kegiatan".*

Dari keterangan keempat informan tersebut terlihat bahwa alur komunikasi antarorganisasi telah berjalan sampai kepada kelompok sasaran. Informasi tidak berhenti pada tingkat Tim BKKBN atau PLKB, tetapi diteruskan melalui kader hingga diterima oleh keluarga. Hal ini menunjukkan adanya fungsi kader sebagai penghubung komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat. Temuan tersebut penting karena dalam landasan teori penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan program BKKBN setelah desentralisasi perlu dibangun melalui kolaborasi erat antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024).

Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali tidak hanya berlangsung dalam hubungan internal organisasi, tetapi juga melibatkan hubungan antara BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader, dan keluarga sasaran. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya proses penyampaian informasi dari aktor kebijakan kepada pelaksana lapangan dan selanjutnya kepada masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, pola tersebut sejalan dengan pandangan bahwa implementasi program pembangunan keluarga pada tingkat lokal membutuhkan koordinasi lintasaktor, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan kapasitas organisasi pelaksana (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024).

Selain penyampaian informasi, komunikasi juga terlihat melalui koordinasi sebelum dan setelah kegiatan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"koordinasi dilakukan dengan petugas lapangan, pemerintah desa, dan kader untuk menentukan kegiatan dan memastikan program berjalan*".

Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"koordinasi dengan kader dilakukan sebelum kegiatan dan setelah kegiatan apabila diperlukan, terutama berkaitan dengan peserta dan pelaksanaan kegiatan*".

Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"sebelum kegiatan kader berkoordinasi dengan petugas mengenai waktu, tempat, dan peserta".*

Sementara itu, Informan 4 menyampaikan bahwa:

> *"ketika terdapat perubahan jadwal atau kegiatan, informasi biasanya disampaikan oleh kader".*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi di Kecamatan Kawali tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga digunakan sebagai sarana koordinasi operasional. Komunikasi digunakan untuk menentukan jadwal, tempat, peserta, serta menyampaikan perubahan kegiatan. Dengan demikian, komunikasi telah berfungsi sebagai mekanisme untuk menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan teori dalam landasan penelitian bahwa komunikasi antarorganisasi menjadi penting karena standar program harus dipahami secara akurat dan konsisten oleh pelaksana, sedangkan koordinasi formal harus diikuti dengan sinkronisasi kegiatan di lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Selanjutnya, dari aspek kerja sama antarorganisasi, hasil wawancara menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, petugas lapangan, kader, dan masyarakat. Informan 1 menyatakan bahwa:

> "*kerja sama melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, petugas lapangan, dan masyarakat, dengan bentuk kerja sama yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan".*

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"pemerintah desa membantu menyediakan tempat dan memberikan dukungan terhadap kegiatan, sedangkan kader membantu pelaksanaan di masyarakat"*.

Selanjutnya Informan 3 menyatakan bahwa:

> *"kader bekerja sama dengan PLKB dan pemerintah desa ketika kegiatan dilaksanakan".*

Sementara itu, Informan 4:

> *"merasakan manfaat dari kerja sama tersebut terutama melalui kegiatan penyuluhan".*

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi antarorganisasi telah berkembang menjadi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah desa tidak hanya menjadi pihak yang menerima informasi, tetapi memberikan dukungan terhadap kegiatan. PLKB menjalankan fungsi teknis, kader menghubungkan program dengan masyarakat, sedangkan keluarga menjadi penerima manfaat kegiatan. Kondisi ini sesuai dengan landasan teori yang menempatkan implementasi BKR sebagai proses yang membutuhkan kolaborasi antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024).

Dari sisi aktivitas pelaksana, kegiatan utama yang ditemukan dalam implementasi BKR adalah sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan kader memiliki peran penting karena berada dekat dengan keluarga".*

Selanjutnya Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"sosialisasi dilakukan melalui kelompok BKR dan kegiatan kemasyarakatan".*

Kemudian Informan 3:

> *"membantu menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya BKR bagi keluarga yang mempunyai anak remaja"*.

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"dirinya mengetahui BKR dari kader dan mengikuti kegiatan setelah memperoleh informasi tersebut*".

Aktivitas penyuluhan juga menunjukkan adanya komunikasi yang bersifat interaktif. Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan"*.

Selanjutnya Informan 3:

> *"membantu mempersiapkan peserta dan mendampingi kegiatan penyuluhan".*

sedangkan Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"penyuluhan memberikan pengetahuan yang sebelumnya belum tentu diketahui, terutama berkaitan dengan cara menghadapi anak remaja"*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pelaksana tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang kepada keluarga untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Hal tersebut sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi BKR membutuhkan pembinaan rutin, kader yang terlatih, materi yang sesuai, dan mekanisme monitoring yang berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Kawali dapat dipahami sebagai bentuk penerjemahan tujuan BKR ke dalam aktivitas pembinaan yang langsung berhubungan dengan keluarga sasaran.

Aktivitas pelaksana juga tidak berhenti pada kegiatan pertemuan. Hasil wawancara menunjukkan adanya pembinaan lanjutan melalui komunikasi ketika keluarga menghadapi permasalahan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pembinaan tidak hanya dilakukan ketika pertemuan kelompok, tetapi juga melalui komunikasi dengan kader dan keluarga apabila terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti"*.

Kemudian Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader memberikan pembinaan sederhana kepada keluarga dan apabila terdapat masalah yang lebih khusus akan disampaikan kepada PLKB".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"ketika menghadapi masalah dalam mendampingi anak, keluarga dapat bertanya kepada kader atau petugas*.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dalam implementasi BKR bersifat berkelanjutan, karena tidak hanya dilakukan ketika kegiatan kelompok berlangsung. Adanya komunikasi lanjutan menunjukkan bahwa pelaksana berusaha merespons persoalan yang muncul di tingkat keluarga. Kondisi ini relevan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan program keluarga dan pembangunan keluarga dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat, partisipasi warga, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Selanjutnya, aspek monitoring menunjukkan bahwa pelaksana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"monitoring dilakukan untuk melihat apakah kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengetahui kendala yang dihadapi pelaksana*".

Kemudian Iinforman 2 menyatakan bahwa*:*

> *"pemantauan dilakukan terhadap kegiatan kelompok dengan melihat keaktifan kader dan keluarga"*.

Sedankan Informan 3 menyebutkan bahwa:

> *"petugas biasanya menanyakan kegiatan yang telah dilakukan dan jumlah peserta yang hadir.*

Akan tetapi, Informan 4:

> "*mengakui bahwa keluarga belum terlalu mengetahui proses monitoring dan hanya mengetahui bahwa terkadang terdapat petugas yang datang atau menanyakan kegiatan"*.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan antara pelaksana dan keluarga sasaran mengenai proses monitoring. Bagi pelaksana, monitoring merupakan bagian dari pengendalian kegiatan, sedangkan bagi keluarga sasaran proses tersebut belum sepenuhnya terlihat sebagai aktivitas yang sistematis. Dengan demikian, monitoring secara internal telah berjalan, tetapi transparansi atau keterlibatan kelompok sasaran dalam proses monitoring masih terbatas. Kondisi tersebut penting karena landasan teori menegaskan bahwa keberhasilan implementasi BKR tidak cukup hanya dengan keberadaan kelompok BKR, tetapi memerlukan mekanisme monitoring yang berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Jika seluruh hasil wawancara dibandingkan, dapat dilihat bahwa Informan 1, 2, dan 3 memberikan informasi yang relatif konsisten mengenai adanya komunikasi, koordinasi, penyuluhan, pembinaan, dan monitoring, sedangkan Informan 4 memberikan perspektif dari sisi keluarga sasaran. Keluarga mengonfirmasi bahwa informasi kegiatan diterima melalui kader, kader mudah dihubungi, dan penyuluhan memberikan manfaat pengetahuan. Namun, keluarga belum sepenuhnya memahami proses monitoring yang dilakukan oleh pelaksana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali telah berjalan cukup baik. Komunikasi telah mampu mengalir dari Tim BKKBN kepada PLKB, kader, dan keluarga sasaran; koordinasi dilakukan sebelum

dan sesudah kegiatan; kerja sama melibatkan pemerintah desa dan masyarakat; sedangkan aktivitas pelaksana diwujudkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menegaskan bahwa implementasi BKR sangat bergantung pada komunikasi efektif, koordinasi lintas sektor, keterlibatan PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023; Amini et al., 2024; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong keterlibatan keluarga secara konsisten. Informasi memang sampai kepada keluarga melalui kader, tetapi keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tersampaikannya informasi. Komunikasi juga perlu menghasilkan pemahaman, respons, dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan landasan teori yang menempatkan partisipasi masyarakat, tindak lanjut terhadap umpan balik, dan komunikasi efektif sebagai bagian penting dari keberhasilan implementasi program keluarga (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Hasil wawancara tersebut selanjutnya dapat diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, komunikasi dalam kegiatan BKR dapat dilihat melalui interaksi antara petugas, kader, dan keluarga sasaran pada saat kegiatan berlangsung. Penyampaian materi dilakukan oleh petugas, sedangkan kader membantu mempersiapkan peserta dan mendampingi kegiatan. Temuan observasi tersebut memperkuat keterangan dari

Informan 2 dan Informan 3 mengenai pelaksanaan penyuluhan dan peran kader dalam mendampingi kegiatan.

Studi dokumentasi terhadap daftar hadir, jadwal kegiatan, materi penyuluhan, foto kegiatan, notulen, dan/atau laporan kegiatan BKR dapat digunakan sebagai bukti pendukung bahwa kegiatan komunikasi dan aktivitas pelaksana benar-benar dilaksanakan. Dokumentasi tersebut juga dapat memperlihatkan keterlibatan pelaksana dan keluarga sasaran dalam kegiatan.

Dengan demikian, triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan BKR memang tidak hanya berupa informasi administratif, tetapi menjadi bagian dari aktivitas pelaksanaan program mulai dari penyampaian informasi, koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, sampai monitoring.

Berdasarkan hasil reduksi data, penyajian data, wawancara dengan Informan 1, 2, 3, dan 4, serta penguatan melalui observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis tergolong cukup baik.

Komunikasi berlangsung secara berjenjang dari Tim BKKBN kepada PLKB, kader, dan selanjutnya kepada keluarga sasaran. Koordinasi dilakukan sebelum dan setelah kegiatan, sementara kerja sama melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, PLKB, kader, dan masyarakat. Aktivitas pelaksana juga telah mencakup sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Temuan ini sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa

implementasi BKR membutuhkan komunikasi efektif, koordinasi lintas sektor, kolaborasi antara BKKBN dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023; Amini et al., 2024; Suardi Mukhlis et al., 2025).

5. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan salah satu dimensi penting dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap dan kecenderungan pelaksana dalam menerima serta menjalankan kebijakan. Dalam landasan teori penelitian ini, disposisi pelaksana ditempatkan sebagai salah satu dari enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, bersama dengan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks program BKKBN, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh disposisi pelaksana, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat, partisipasi warga, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, disposisi pelaksana dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali dapat dilihat dari pemahaman pelaksana terhadap program, sikap dalam melaksanakan tugas, komitmen, kesediaan menjalankan tugas, respons terhadap kondisi lapangan, dan tanggung jawab pelaksana. Hasil wawancara dengan

Informan 1 menunjukkan bahwa:

> *"pelaksana memahami BKR bukan sekadar kegiatan pertemuan, tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi remaja. BKR bukan sekadar kegiatan pertemuan, tetapi merupakan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi remaja".*

Pemahaman tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa:

> *"memberikan pembinaan dan memastikan keluarga mendapatkan informasi yang dibutuhkan."*

Sementara itu, Informan 3 selaku kader BKR memahami tugasnya sebagai penghubung antara petugas dan keluarga serta membantu pelaksanaan kegiatan. Dari sisi kelompok sasaran, Informan 4 memahami BKR sebagai kegiatan yang membantu orang tua memahami dan mendampingi anak remaja.

Jika dibandingkan, keempat informan menunjukkan kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan fungsi BKR, meskipun melihat program dari posisi yang berbeda. Informan 1 melihat BKR dari perspektif kebijakan dan tujuan program, Informan 2 dari perspektif tugas teknis PLKB, Informan 3 dari perspektif pelaksana masyarakat, sedangkan Informan 4 dari perspektif penerima manfaat. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi indikasi bahwa disposisi pelaksana dalam aspek pemahaman program sudah cukup baik karena tujuan program tidak hanya dipahami oleh pelaksana birokrasi, tetapi juga diketahui oleh keluarga sasaran.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi BKR membutuhkan penerjemahan tujuan program secara operasional sehingga tidak berhenti pada rumusan normatif. Tujuan pembinaan keluarga remaja, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan perlu diterjemahkan ke dalam praktik pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi

masyarakat (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023). Dengan demikian, pemahaman Informan 1, 2, dan 3 yang mengarah pada pembinaan keluarga menunjukkan bahwa pelaksana telah memahami substansi program dan tidak sekadar memandang BKR sebagai kegiatan rutin.

Dari aspek sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan yang positif. Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"pelaksana diharapkan memiliki sikap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena permasalahan keluarga dan remaja berbeda-beda".*

Selanjutnya, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> "*dalam menjalankan tugasnya, pelaksana berusaha memberikan pelayanan dan pembinaan dengan pendekatan yang tidak menghakimi agar keluarga bersedia menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi"*

Sikap tersebut kemudian diperkuat oleh Informan 3 yang menyatakan bahwa:

> "*kader berusaha membantu keluarga semampunya. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat dijawab oleh kader, permasalahan tersebut dikoordinasikan kepada PLKB".* Kemudian dari sisi keluarga, Informan 4: *"menilai bahwa kader cukup terbuka ketika keluarga bertanya dan bersedia membantu memberikan informasi*".

Berdasarkan keempat keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa sikap pelaksana tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan dari pihak pelaksana, tetapi juga dikonfirmasi oleh keluarga sebagai kelompok sasaran. Informan 2 menunjukkan sikap tidak menghakimi, Informan 3 menunjukkan kesediaan membantu dan mengoordinasikan masalah, sedangkan Informan 4 mengonfirmasi bahwa kader cukup terbuka dalam memberikan informasi. Dengan demikian,

terdapat kesesuaian antara persepsi pelaksana mengenai sikap yang seharusnya ditunjukkan dengan pengalaman keluarga dalam berinteraksi dengan pelaksana.

Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori yang menempatkan implementasi BKR dalam kerangka kolaboratif, kontekstual, dan adaptif, karena program pembangunan keluarga pada tingkat lokal membutuhkan koordinasi lintasaktor, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan penguatan kapasitas organisasi pelaksana (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024). Sikap terbuka dan tidak menghakimi yang ditunjukkan pelaksana dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap karakteristik permasalahan keluarga dan remaja yang berbeda-beda.

Disposisi pelaksana juga terlihat dari komitmen untuk mempertahankan keberlangsungan program. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"komitmen Tim BKKBN ditunjukkan melalui keberlanjutan pembinaan dan koordinasi dengan petugas di lapangan."*

Sementara itu, Informan 2 menyatakan bahwa:

> "*pihaknya tetap berusaha menjalankan kegiatan meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga.*

Komitmen tersebut juga terlihat pada Informan 3 yang menyatakan bahwa:

> *"kader tetap berusaha menjalankan kegiatan karena menganggap BKR penting bagi keluarga yang mempunyai anak remaja".*

Dari sisi keluarga, Informan 4 menyatakan:

> *"kesediaannya mengikuti kegiatan selama waktu pelaksanaan memungkinkan karena informasi yang diberikan dianggap bermanfaat."*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen pelaksana relatif kuat, karena kegiatan tetap diupayakan berjalan meskipun terdapat keterbatasan. Hal yang menarik adalah komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh Tim BKKBN dan PLKB, tetapi juga kader. Bahkan, Informan 3 menghubungkan kesediaannya menjalankan tugas dengan pandangan bahwa BKR penting bagi keluarga yang memiliki anak remaja. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban formal, tetapi juga pada pemahaman mengenai manfaat program.

Temuan tersebut relevan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan program BKKBN dan pembangunan keluarga dipengaruhi oleh disposisi pelaksana, partisipasi masyarakat, komunikasi yang efektif, tindak lanjut terhadap umpan balik, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025). Dengan demikian, komitmen pelaksana menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ketika program menghadapi kondisi lapangan yang tidak selalu ideal.

Dari aspek kesediaan melaksanakan tugas, hasil wawancara juga menunjukkan kecenderungan positif. Informan 1 menyatakan:

> *"bahwa pelaksana tetap berupaya menjalankan tugas karena BKR merupakan bagian dari pembangunan keluarga yang perlu terus dilakukan*".

Kemudian Informan 2 menyampaikan bahwa:

> *"kesediaannya menjalankan tugas didorong oleh kebutuhan terhadap pembinaan keluarga remaja yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan".*

Selanjutnya Informan 3 menyatakan:

> *"kesediaannya menjadi kader karena ingin membantu masyarakat, terutama keluarga yang memiliki anak remaja".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan:

> *"bersedia mengikuti kegiatan selama waktunya sesuai karena informasi yang diberikan dianggap diperlukan."*

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dorongan internal untuk menjalankan program, baik pada pelaksana maupun kader. Kesediaan tersebut juga terlihat dari adanya upaya untuk tetap melaksanakan kegiatan meskipun terdapat keterbatasan waktu dan partisipasi masyarakat. Artinya, kendala yang muncul di lapangan tidak secara langsung menyebabkan pelaksana menghentikan kegiatan, tetapi justru mendorong adanya penyesuaian dalam pelaksanaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan dalam landasan teori bahwa implementasi BKR pada tingkat lokal harus bersifat adaptif dan kontekstual, karena pelaksanaan program pembangunan keluarga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat serta kapasitas birokrasi lokal (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024).

Disposisi pelaksana juga dapat dilihat dari kemampuan merespons permasalahan yang muncul di lapangan. Berdasarkan keterangan Informan 2, pendekatan yang digunakan dalam pembinaan adalah pendekatan yang tidak menghakimi agar keluarga bersedia menyampaikan permasalahannya. Sementara itu, I3 menyatakan bahwa apabila kader menemukan permasalahan yang tidak dapat dijawab sendiri, kader mengoordinasikannya kepada PLKB. Dari sisi keluarga, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kader cukup terbuka ketika keluarga bertanya dan bersedia memberikan informasi"*

.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki respons terhadap kebutuhan dan persoalan keluarga, tetapi respons tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kader tidak memaksakan diri memberikan jawaban terhadap persoalan yang tidak dikuasainya, melainkan mengoordinasikannya kepada PLKB. Pola tersebut menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab sekaligus kesadaran terhadap batas kemampuan pelaksana.

Dalam landasan teori, implementasi program pembangunan keluarga ditempatkan dalam kerangka yang menekankan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, fleksibilitas, partisipasi warga, dan integrasi nilai lokal (lAshilly Achidsti et al., 2024). Oleh karena itu, kemampuan pelaksana merespons persoalan keluarga melalui pendekatan terbuka dan koordinasi dengan PLKB menunjukkan adanya disposisi yang mendukung implementasi BKR.

Aspek terakhir yang menunjukkan disposisi adalah tanggung jawab pelaksana. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"tanggung jawab Tim BKKBN adalah memastikan program berjalan, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan di lapangan."*

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"tanggung jawabnya meliputi pembinaan kader, pelaksanaan kegiatan, koordinasi, dan pelaporan".*

Selanjutnya Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan informasi kepada keluarga."*

Sementara itu, Informan 4:

> *"memahami tanggung jawab keluarga sebagai mengikuti kegiatan dan mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam keluarga.*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan BKR tidak hanya berada pada Tim BKKBN atau PLKB, tetapi tersebar sesuai dengan kedudukan masing-masing aktor. Tim BKKBN bertanggung jawab pada pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; PLKB bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis dan koordinasi; kader bertanggung jawab membantu pelaksanaan serta menyampaikan informasi; sedangkan keluarga bertanggung jawab mengikuti kegiatan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Pembagian tanggung jawab tersebut sesuai dengan pendekatan dalam landasan teori yang melihat implementasi BKR sebagai proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pelaksana lapangan, dan masyarakat. Program pembangunan keluarga pada tingkat lokal membutuhkan koordinasi lintasaktor dan keterlibatan masyarakat agar program dapat diterima dan berjalan sesuai kebutuhan lokal (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024).

Hasil wawancara mengenai disposisi pelaksana dapat diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi. Apabila dalam kegiatan yang diamati peneliti menemukan bahwa petugas memberikan penjelasan kepada peserta, menjawab pertanyaan keluarga, memberikan arahan kepada kader, atau melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul, maka hasil observasi tersebut dapat digunakan untuk menguatkan keterangan Informan 2 dan Informan 3 mengenai sikap terbuka, responsif, dan kesediaan membantu keluarga.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya hadir dalam kegiatan secara administratif, tetapi juga terlibat dalam proses pembinaan dan komunikasi dengan keluarga sasaran. Pelaksana memberikan penjelasan ketika terdapat pertanyaan dari peserta, memberikan arahan kepada kader, serta melakukan koordinasi apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut. Hasil observasi tersebut memperkuat keterangan Informan 2 dan Informan 3 mengenai sikap terbuka, responsif, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan Program BKR.

Hasil studi dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan Tim BKKBN/PLKB/kader dalam pelaksanaan kegiatan BKR. Dokumentasi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan dilaksanakan serta didukung oleh pelaksana sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan demikian, dokumentasi memperkuat hasil wawancara mengenai komitmen dan tanggung jawab pelaksana dalam menjaga keberlangsungan kegiatan BKR.

Dengan demikian, triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat menunjukkan bahwa disposisi positif pelaksana bukan hanya berdasarkan pernyataan informan, tetapi juga terlihat dalam perilaku pelaksana ketika menjalankan kegiatan.

Berdasarkan hasil reduksi data dari Informan 1, 2, 3, dan 4, dapat dianalisis bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu aspek yang paling mendukung implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Keempat informan menunjukkan kesamaan pandangan bahwa BKR memiliki manfaat bagi keluarga yang memiliki anak remaja. Perbedaannya hanya terletak pada posisi masing-

masing: Informan 1 memahami BKR sebagai kebijakan dan upaya peningkatan kemampuan keluarga, Informan 2 sebagai tugas pembinaan, Informan 3 sebagai fungsi penghubung masyarakat, dan Informan 4 sebagai kegiatan yang memberikan pengetahuan kepada orang tua.

Dari aspek sikap, pelaksana menunjukkan kecenderungan terbuka, responsif, dan tidak menghakimi. Hal ini menjadi penting karena persoalan keluarga dan remaja bersifat beragam dan tidak selalu dapat ditangani dengan pendekatan yang sama. Keterangan Informan 2 mengenai pendekatan yang tidak menghakimi dan Informan 3 mengenai kesediaan mengoordinasikan persoalan kepada PLKB menunjukkan bahwa pelaksana berusaha memberikan respons sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

Dari aspek komitmen, pelaksana tetap berusaha menjalankan kegiatan walaupun terdapat keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kendala pada pelaksanaan tidak secara langsung menurunkan kemauan pelaksana untuk menjalankan program. Dalam konteks teori implementasi, kondisi tersebut penting karena keberhasilan program BKKBN juga dipengaruhi oleh disposisi pelaksana bersama dengan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksana BKR di Kecamatan Kawali tidak hanya memahami program secara formal, tetapi juga menunjukkan kemauan dan komitmen untuk menjalankannya. Hal tersebut terlihat dari kesediaan Tim BKKBN, PLKB, dan kader untuk tetap menjalankan kegiatan, memberikan

pembinaan, membantu keluarga, dan melakukan koordinasi ketika menghadapi permasalahan.

Namun demikian, disposisi positif pelaksana belum secara otomatis menghilangkan seluruh persoalan implementasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga masih menjadi kendala. Artinya, disposisi pelaksana yang baik berfungsi sebagai faktor pendukung yang membantu program tetap berjalan, tetapi belum cukup untuk memastikan partisipasi sasaran menjadi optimal. Kondisi ini sesuai dengan landasan teori yang menempatkan implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh hubungan antarseluruh variabel, sehingga disposisi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan lingkungan implementasi (Muksin et al., 2024; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil reduksi data, penyajian data, wawancara dengan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4, serta penguatan melalui observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis tergolong baik.

Hal tersebut ditunjukkan oleh pemahaman pelaksana terhadap tujuan BKR, sikap terbuka dan tidak menghakimi, komitmen untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan, kesediaan menjalankan tugas, respons terhadap permasalahan keluarga, serta tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Temuan ini sejalan dengan landasan teori yang menempatkan disposisi pelaksana sebagai salah satu variabel utama implementasi serta menegaskan bahwa

keberhasilan program pembangunan keluarga dipengaruhi oleh disposisi pelaksana, komunikasi efektif, sumber daya, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan monitoring-evaluasi (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Dengan demikian, temuan utama pada dimensi disposisi pelaksana adalah bahwa pelaksana memiliki pemahaman, sikap, komitmen, kesediaan, dan tanggung jawab yang mendukung keberlangsungan Program BKR, meskipun pelaksana masih menghadapi keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga sasaran. Disposisi yang positif tersebut menjadi salah satu kekuatan implementasi BKR di Kecamatan Kawali karena pelaksana tetap berupaya menjalankan kegiatan dan memberikan pembinaan meskipun kondisi lapangan belum sepenuhnya ideal.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan dimensi keenam dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk menganalisis implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dimensi ini penting karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal organisasi pelaksana, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam landasan teori penelitian, implementasi dipandang sebagai proses yang bersifat kontekstual dan adaptif, karena pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kapasitas lokal, dukungan kelembagaan, serta karakteristik lingkungan tempat program dijalankan (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4, diketahui bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pelaksanaan BKR. Pengaruh tersebut tidak hanya berbentuk dukungan terhadap keberadaan program, tetapi juga muncul dalam bentuk hambatan yang memengaruhi tingkat partisipasi keluarga. Dengan demikian, lingkungan implementasi BKR di Kecamatan Kawali dapat dikatakan memiliki pengaruh ganda, yaitu sebagai faktor pendukung sekaligus faktor penghambat.

Dari aspek sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa karakteristik keluarga sasaran cukup beragam. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang mudah diajak berkomunikasi dan terbuka terhadap informasi BKR, tetapi terdapat pula keluarga yang kurang terbuka sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih intensif".*

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program tidak sepenuhnya seragam di antara keluarga sasaran. Kondisi sosial keluarga menjadi pertimbangan bagi pelaksana dalam menentukan pendekatan komunikasi dan pembinaan yang sesuai. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan:

"bahwa setiap keluarga mempunyai kondisi dan permasalahan yang berbeda".

Oleh karena itu, pembinaan tidak dapat diberikan dengan pendekatan yang sepenuhnya sama kepada seluruh keluarga. Menurut Informan 2:

> *"pelaksana perlu melihat kondisi keluarga dan permasalahan yang dihadapi sebelum memberikan arahan atau pembinaan".*

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> "*karakteristik remaja juga berbeda-beda sehingga orang tua membutuhkan pendekatan yang sesuai dalam menghadapi anak remaja".*

Dari perspektif kelompok sasaran, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kondisi keluarga dan karakter anak turut menentukan bagaimana orang tua dapat menerapkan informasi yang diperoleh melalui BKR."*

Jika dibandingkan antara keempat informan, terdapat kesamaan pandangan bahwa lingkungan sosial keluarga memengaruhi cara program diterima dan dilaksanakan. Informan 1 dan Informan 2 melihat persoalan tersebut dari sisi pelaksana, sedangkan Informan 3 dan Informan 4 memberikan gambaran dari sisi masyarakat dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman kondisi sosial keluarga bukan merupakan penolakan terhadap program, melainkan merupakan kondisi yang perlu direspons melalui pendekatan yang sesuai.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi program pembangunan keluarga pada tingkat lokal membutuhkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, fleksibilitas, partisipasi warga, dan integrasi dengan nilai-nilai lokal (lAshilly Achidsti et al., 2024). Dengan demikian, keberagaman karakteristik keluarga di Kecamatan Kawali menuntut pelaksana BKR untuk tidak menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi menyesuaikan komunikasi dan pembinaan dengan kondisi keluarga sasaran.

Selain itu, lingkungan sosial juga berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BKR. Berdasarkan keterangan Informan 1 menytakan bahwa:

> *"masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan program BKR karena program dianggap memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai cara mendampingi anak remaja".*

Informan 2 juga menyatakan bahwa:

> *"masyarakat secara umum menerima kegiatan BKR, meskipun tidak seluruh keluarga mengikuti kegiatan secara rutin".*

Kemudian Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"keluarga yang pernah mengikuti kegiatan umumnya memberikan respons positif, tetapi terdapat keluarga yang tidak aktif karena memiliki kesibukan lain".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa.

> *"kegiatan BKR memberikan manfaat karena membantu orang tua memahami persoalan yang berkaitan dengan remaja."*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap BKR relatif baik. Dengan demikian, persoalan implementasi bukan terutama berupa penolakan masyarakat terhadap keberadaan program. Persoalan yang lebih terlihat adalah bagaimana penerimaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi partisipasi yang konsisten.

Kondisi ini sesuai dengan kajian dalam landasan teori yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan implementasi program BKKBN. Program pembangunan keluarga memerlukan keterlibatan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat keluarga (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga terutama berpengaruh terhadap ketersediaan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan BKR.Inorman 1 menjelaskan bahwa:

> *"sebagian keluarga memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup padat sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan ketika kegiatan dilaksanakan dan kesibukan tersebut lebih berkaitan dengan keterbatasan waktu daripada ketidaktertarikan terhadap program".*

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"sebagian keluarga harus bekerja sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk menghadiri kegiatan BKR".*

Kemudian Informan 3 juga menyampaikan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang tidak hadir karena harus bekerja atau memiliki kegiatan ekonomi lainnya".*

Sementara itu, Informan 4 sebagai keluarga sasaran menyatakan bahwa.

> *"pekerjaan dan kesibukan keluarga dapat menyebabkan keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan BKR."*

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat adanya pola yang konsisten antara Informman 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4, yaitu pekerjaan keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kehadiran. Dengan demikian, kondisi ekonomi dalam penelitian ini tidak terutama terlihat dalam bentuk kemampuan atau ketidakmampuan keluarga secara finansial untuk mengikuti program, tetapi lebih tampak melalui kesempatan waktu yang dimiliki keluarga.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa ketidakhadiran keluarga tidak selalu dapat diartikan sebagai penolakan terhadap program. Hal tersebut secara jelas terlihat dari keterangan Informan 3, yang menjelaskan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang tidak dapat hadir karena bekerja, bukan karena tidak mau mengikuti BKR".*

Dengan demikian, apabila hanya menggunakan indikator jumlah kehadiran peserta, terdapat kemungkinan bahwa kondisi tersebut ditafsirkan sebagai rendahnya minat masyarakat. Padahal, hasil wawancara menunjukkan

bahwa terdapat faktor struktural berupa pekerjaan dan keterbatasan waktu yang memengaruhi kesempatan keluarga untuk mengikuti kegiatan.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada tingkat lokal dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas masyarakat, sehingga kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi nyata kelompok sasaran (Krogh & Triantafillou, 2024). Dalam konteks BKR, kondisi tersebut menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam menentukan waktu dan bentuk kegiatan agar tidak berbenturan dengan aktivitas ekonomi keluarga.

Dari aspek politik dan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelaksanaan BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan BKR membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam memfasilitasi kegiatan dan mendukung koordinasi dengan masyarakat"*.

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"pemerintah desa memberikan dukungan terhadap kegiatan, termasuk membantu menyediakan tempat apabila diperlukan. Sementara itu"*

,selanjutnya Informan 3 menyatakan bahwa:

> *"koordinasi dengan pemerintah desa membantu kader dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat"*.

Dari sisi keluarga, Informan 4 juga merasakan bahwa:

> *"kegiatan BKR dapat dilaksanakan karena adanya dukungan dari pihak pelaksana dan lingkungan desa*".

Dengan demikian, dukungan kelembagaan tidak hanya dirasakan oleh pelaksana, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan yang diterima oleh keluarga sasaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan politik dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali cenderung mendukung pelaksanaan program. Dukungan tersebut tidak harus dimaknai dalam bentuk kebijakan politik yang besar, tetapi dapat dilihat dari adanya dukungan pemerintah desa, koordinasi antarinstansi, penyediaan fasilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan.

Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori yang menekankan pentingnya kolaborasi antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga (Amini et al., 2024). Selain itu, literatur dalam landasan teori juga menunjukkan bahwa implementasi program kependudukan dan keluarga berencana dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta dukungan lingkungan kelembagaan (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Dengan adanya dukungan pemerintah desa, pelaksanaan BKR memperoleh legitimasi dan ruang untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat. Pemerintah desa dapat menjadi salah satu penghubung antara pelaksana program dengan masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas dan dukungan terhadap kegiatan.

Apabila ketiga aspek tersebut dibandingkan, terlihat bahwa lingkungan implementasi BKR di Kecamatan Kawali memberikan pengaruh yang bersifat

ganda. Pada satu sisi, lingkungan sosial dan politik memberikan dukungan karena masyarakat menerima keberadaan program dan pemerintah desa memberikan dukungan terhadap kegiatan. Pada sisi lain, kondisi ekonomi keluarga, terutama pekerjaan dan keterbatasan waktu, menjadi hambatan terhadap konsistensi kehadiran peserta.

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Informan 1 dan Informan 2 yang menyatakan bahwa:

> *"keluarga secara umum menerima program, tetapi kesibukan pekerjaan membuat sebagian keluarga tidak selalu dapat hadir*".

Informan 3 mempertegas bahwa:

> *"keluarga yang tidak hadir tidak selalu berarti menolak program, karena terdapat keluarga yang tidak hadir karena bekerja*".

Sementara itu, Informan 4 menunjukkan bahwa:

> *"dari perspektif keluarga, kegiatan BKR tetap dianggap memberikan manfaat meskipun waktu menjadi salah satu kendala dalam mengikuti kegiatan".*

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara penerimaan terhadap program dan partisipasi dalam program. Keluarga dapat menerima dan menganggap BKR bermanfaat, tetapi pada saat yang sama tidak selalu memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan secara rutin. Temuan tersebut menjadi salah satu argumentasi penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa rendahnya kehadiran tidak dapat langsung dipahami sebagai rendahnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor lingkungan tidak bekerja secara sederhana sebagai faktor pendukung atau penghambat. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik saling berinteraksi dan menghasilkan kondisi implementasi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang melihat implementasi kebijakan sebagai proses kontekstual, adaptif, dan dipengaruhi oleh kapasitas lokal serta karakteristik masyarakat (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024).

Oleh karena itu, pelaksana BKR perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi keluarga ketika merancang kegiatan. Apabila waktu kegiatan hanya ditentukan berdasarkan jadwal pelaksana tanpa memperhatikan waktu kerja keluarga, maka terdapat kemungkinan bahwa keluarga yang sebenarnya menerima dan membutuhkan program tetap tidak dapat berpartisipasi secara rutin. Dengan kata lain, tantangan implementasi BKR di Kecamatan Kawali bukan terutama terletak pada penolakan masyarakat, tetapi pada kemampuan program menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan kelompok sasaran.

Hasil observasi peneliti menunjukkan adanya dukungan lingkungan kelembagaan terhadap pelaksanaan Program BKR, terutama melalui keterlibatan pemerintah desa, pemanfaatan fasilitas yang tersedia di tingkat desa, serta keterlibatan kader dalam menghubungkan program dengan keluarga sasaran. Di sisi lain, peneliti juga menemukan bahwa tingkat kehadiran keluarga tidak selalu sama pada setiap kegiatan, yang menunjukkan adanya pengaruh kondisi dan kesibukan keluarga terhadap partisipasi dalam program.

Hasil studi dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemerintah desa dan pelaksana dalam mendukung pelaksanaan Program BKR. Dokumen tersebut memperlihatkan adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan fasilitas dan koordinasi kelembagaan di tingkat desa. Temuan dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara Informan 1, 2, dan 3 mengenai adanya dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan BKR.

Berdasarkan hasil reduksi data dari Informan 1, 2, 3, dan 4, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali dapat dikategorikan cukup mendukung, tetapi belum sepenuhnya optimal. Lingkungan sosial memberikan dukungan melalui penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BKR, sedangkan lingkungan politik memberikan dukungan melalui keterlibatan pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, lingkungan ekonomi memberikan hambatan terutama melalui keterbatasan waktu keluarga akibat aktivitas pekerjaan.

Temuan paling penting pada dimensi ini adalah bahwa penerimaan masyarakat terhadap BKR relatif baik, tetapi penerimaan tersebut belum selalu menghasilkan partisipasi rutin. Hal tersebut terlihat dari keterangan Informan 1 dan 2 mengenai penerimaan masyarakat terhadap program, tetapi sekaligus adanya keterbatasan kehadiran karena pekerjaan. Informan 3 bahkan secara tegas membedakan antara keluarga yang tidak hadir karena bekerja dengan keluarga yang tidak mau mengikuti kegiatan. Informan 4 juga mengakui bahwa pekerjaan dan kesibukan dapat membatasi kesempatan untuk mengikuti kegiatan.

Dengan demikian, ketidakhadiran peserta tidak tepat jika seluruhnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa terdapat faktor kesempatan yang memengaruhi partisipasi. Temuan ini penting dalam menjelaskan implementasi BKR karena menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh apakah masyarakat menerima atau menolak kebijakan, tetapi juga oleh apakah desain pelaksanaan program dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat.

Dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang memperkuat pelaksanaan. Hal tersebut sejalan dengan kajian dalam landasan teori yang menempatkan kolaborasi BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam implementasi program pembangunan keluarga (Amini et al., 2024).

Sementara itu, dari aspek sosial, keberagaman karakter keluarga dan remaja mengharuskan pelaksana menerapkan pendekatan yang fleksibel. Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menekankan bahwa implementasi kebijakan pembangunan keluarga perlu memperhatikan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, partisipasi warga, dan kapasitas pelaksana (lAshilly Achidsti et al., 2024).

Dengan demikian, lingkungan implementasi BKR di Kecamatan Kawali bukan merupakan lingkungan yang menghambat program secara keseluruhan. Sebaliknya, terdapat dukungan sosial dan kelembagaan yang cukup kuat. Hambatan terutama muncul karena adanya ketidaksesuaian antara waktu kegiatan dengan aktivitas ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan implementasi

BKR sebaiknya diarahkan pada penyesuaian waktu kegiatan, fleksibilitas bentuk pembinaan, dan penguatan pendekatan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan waktu, bukan semata-mata dengan menganggap rendahnya kehadiran sebagai kurangnya minat masyarakat.

Berdasarkan hasil reduksi data, penyajian data, wawancara dengan Informan 1, 2, 3, dan 4, serta penguatan melalui observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis tergolong cukup mendukung, tetapi masih terdapat hambatan pada aspek partisipasi keluarga.

Dari aspek sosial, masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan BKR dan memahami manfaatnya, tetapi karakteristik keluarga dan remaja yang beragam menuntut pendekatan pembinaan yang berbeda. Dari aspek ekonomi, pekerjaan dan kesibukan keluarga menjadi faktor yang membatasi waktu untuk mengikuti kegiatan. Sementara itu, dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa, PLKB, kader, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor pendukung keberlangsungan program. Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menempatkan kondisi sosial, kapasitas lokal, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan sebagai bagian penting dalam implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual dan adaptif (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024; Amini et al., 2024).

Dengan demikian, temuan utama pada dimensi ini adalah bahwa lingkungan sosial dan politik cenderung mendukung implementasi BKR, sedangkan kondisi ekonomi keluarga menjadi hambatan terutama melalui

keterbatasan waktu dan kesempatan untuk hadir. Oleh karena itu, persoalan partisipasi keluarga dalam Program BKR di Kecamatan Kawali lebih tepat dipahami sebagai persoalan kesempatan dan penyesuaian program terhadap kondisi kehidupan keluarga, bukan semata-mata sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap program.

Hasil observasi peneliti menunjukkan adanya dukungan lingkungan kelembagaan terhadap pelaksanaan Program BKR, terutama melalui keterlibatan pemerintah desa, pemanfaatan fasilitas yang tersedia di tingkat desa, serta keterlibatan kader dalam menghubungkan program dengan keluarga sasaran. Di sisi lain, peneliti juga menemukan bahwa tingkat kehadiran keluarga tidak selalu sama pada setiap kegiatan, yang menunjukkan adanya pengaruh kondisi dan kesibukan keluarga terhadap partisipasi dalam program.

Hasil studi dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemerintah desa dan pelaksana dalam mendukung pelaksanaan Program BKR. Dokumen tersebut memperlihatkan adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan fasilitas dan koordinasi kelembagaan di tingkat desa. Temuan dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara Informan 1, 2, dan 3 mengenai adanya dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan BKR.

Berdasarkan hasil reduksi data dari Informan 1, 2, 3, dan 4, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali dapat dikategorikan cukup mendukung, tetapi belum sepenuhnya optimal. Lingkungan sosial memberikan dukungan melalui penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BKR, sedangkan lingkungan politik memberikan dukungan melalui

keterlibatan pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, lingkungan ekonomi memberikan hambatan terutama melalui keterbatasan waktu keluarga akibat aktivitas pekerjaan.

Temuan paling penting pada dimensi ini adalah bahwa penerimaan masyarakat terhadap BKR relatif baik, tetapi penerimaan tersebut belum selalu menghasilkan partisipasi rutin. Hal tersebut terlihat dari keterangan Informan 1 dan 2 mengenai penerimaan masyarakat terhadap program, tetapi sekaligus adanya keterbatasan kehadiran karena pekerjaan. Informan 3 bahkan secara tegas membedakan antara keluarga yang tidak hadir karena bekerja dengan keluarga yang tidak mau mengikuti kegiatan. Informan 4 juga mengakui bahwa pekerjaan dan kesibukan dapat membatasi kesempatan untuk mengikuti kegiatan.

Dengan demikian, ketidakhadiran peserta tidak tepat jika seluruhnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa terdapat faktor kesempatan yang memengaruhi partisipasi. Temuan ini penting dalam menjelaskan implementasi BKR karena menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh apakah masyarakat menerima atau menolak kebijakan, tetapi juga oleh apakah desain pelaksanaan program dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat.

Dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang memperkuat pelaksanaan. Hal tersebut sejalan dengan kajian dalam landasan teori yang menempatkan kolaborasi BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam implementasi program pembangunan keluarga (Amini et al., 2024).

Sementara itu, dari aspek sosial, keberagaman karakter keluarga dan remaja mengharuskan pelaksana menerapkan pendekatan yang fleksibel. Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menekankan bahwa implementasi kebijakan pembangunan keluarga perlu memperhatikan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, partisipasi warga, dan kapasitas pelaksana (lAshilly Achidsti et al., 2024).

Dengan demikian, lingkungan implementasi BKR di Kecamatan Kawali bukan merupakan lingkungan yang menghambat program secara keseluruhan. Sebaliknya, terdapat dukungan sosial dan kelembagaan yang cukup kuat. Hambatan terutama muncul karena adanya ketidaksesuaian antara waktu kegiatan dengan aktivitas ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan implementasi BKR sebaiknya diarahkan pada penyesuaian waktu kegiatan, fleksibilitas bentuk pembinaan, dan penguatan pendekatan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan waktu, bukan semata-mata dengan menganggap rendahnya kehadiran sebagai kurangnya minat masyarakat.

Berdasarkan hasil reduksi data, penyajian data, wawancara dengan Informan 1, 2, 3, dan 4, serta penguatan melalui observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis tergolong cukup mendukung, tetapi masih terdapat hambatan pada aspek partisipasi keluarga.

Dari aspek sosial, masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan BKR dan memahami manfaatnya, tetapi karakteristik keluarga dan remaja yang beragam menuntut pendekatan pembinaan yang berbeda. Dari aspek ekonomi, pekerjaan dan

kesibukan keluarga menjadi faktor yang membatasi waktu untuk mengikuti kegiatan. Sementara itu, dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa, PLKB, kader, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor pendukung keberlangsungan program. Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menempatkan kondisi sosial, kapasitas lokal, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan sebagai bagian penting dalam implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual dan adaptif (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al., 2024; Amini et al., 2024).

Dengan demikian, temuan utama pada dimensi ini adalah bahwa lingkungan sosial dan politik cenderung mendukung implementasi BKR, sedangkan kondisi ekonomi keluarga menjadi hambatan terutama melalui keterbatasan waktu dan kesempatan untuk hadir. Oleh karena itu, persoalan partisipasi keluarga dalam Program BKR di Kecamatan Kawali lebih tepat dipahami sebagai persoalan kesempatan dan penyesuaian program terhadap kondisi kehidupan keluarga, bukan semata-mata sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap program.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum telah berjalan dan dapat dikategorikan cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian program belum sepenuhnya optimal. Analisis implementasi program dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang melihat

implementasi melalui enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut menunjukkan keterkaitan satu sama lain, sehingga keberhasilan implementasi BKR tidak dapat dilihat hanya dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan program, menggerakkan sumber daya, membangun koordinasi, menunjukkan komitmen, serta menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi masyarakat.

Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BKR di Kecamatan Kawali telah memiliki tujuan dan sasaran yang relatif jelas. Tujuan program dipahami oleh Tim BKKBN, PLKB, kader, maupun keluarga sasaran sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam mendampingi, membina, berkomunikasi, dan mengawasi anak remaja. Sasaran program juga telah diarahkan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja dan proses identifikasi dilakukan melalui data keluarga, wilayah kerja PLKB, pemerintah desa, serta bantuan kader dalam menjangkau keluarga sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan sehingga standar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi telah diwujudkan dalam aktivitas nyata. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan agar pelaksana memiliki arah yang sama dalam menjalankan kebijakan.

Meskipun demikian, kejelasan tujuan dan sasaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesamaan pemahaman mengenai target operasional program. Pelaksana memahami target BKR tidak hanya dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari keberlangsungan kelompok, kehadiran keluarga, pelaksanaan pembinaan, serta pencatatan kegiatan. Sebaliknya, keluarga sasaran lebih memahami BKR dari sisi manfaat dan kegiatan yang mereka terima serta belum mengetahui secara rinci target jumlah peserta maupun target program secara keseluruhan. Perbedaan pemahaman tersebut berkaitan dengan belum konsistennya partisipasi keluarga dalam kegiatan. Dengan demikian, persoalan implementasi pada aspek standar dan sasaran bukan terutama terletak pada ketidakjelasan tujuan program, melainkan pada belum optimalnya penerjemahan target operasional ke dalam partisipasi keluarga secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut kemudian berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, materi pembinaan, serta fasilitas dasar pada dasarnya telah tersedia dan mendukung pelaksanaan BKR. Tim BKKBN, PLKB, dan kader telah menjalankan perannya masing-masing dalam pembinaan dan penyampaian informasi kepada keluarga. Materi yang diberikan juga mencakup komunikasi orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, serta pembentukan karakter, dan materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami.

Akan tetapi, kecukupan sumber daya tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada beban kerja pelaksana, anggaran

operasional, fasilitas pendukung, serta waktu. Petugas dan kader harus membagi perhatian dengan berbagai kegiatan dan program lainnya, sedangkan tidak semua kader dapat hadir dalam setiap kegiatan. Pada sisi keluarga, keterbatasan waktu akibat pekerjaan dan aktivitas rumah tangga juga berpengaruh terhadap kehadiran. Dengan demikian, persoalan sumber daya dalam implementasi BKR tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya sumber daya, tetapi juga dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dalam kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki kesibukan berbeda-beda. Secara keseluruhan, sumber daya telah cukup mendukung pelaksanaan program, tetapi belum optimal dalam menjamin kesinambungan kegiatan dan partisipasi sasaran.

Selanjutnya, dari sisi karakteristik badan pelaksana, implementasi BKR menunjukkan adanya struktur pelaksana dan pembagian fungsi yang relatif jelas. Pelaksanaan program melibatkan Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader BKR, dan keluarga sasaran. Tim BKKBN berperan dalam memberikan arahan dan pembinaan, PLKB menjalankan fungsi teknis melalui penyuluhan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan, sedangkan kader berperan sebagai penghubung antara petugas dengan keluarga sasaran. Keluarga berada sebagai kelompok sasaran yang menerima pembinaan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan keluarga. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa implementasi BKR dilakukan melalui pembagian fungsi antaraktor, bukan hanya oleh Tim BKKBN secara langsung.

Pembagian tugas tersebut juga menunjukkan bahwa kader memiliki posisi strategis dalam keberhasilan program karena kader merupakan aktor yang

berhubungan langsung dengan keluarga. Namun, kejelasan struktur organisasi belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas pelaksana yang optimal. Beban wilayah dan banyaknya kegiatan yang harus ditangani, pembagian perhatian petugas dengan program lainnya, serta ketidakhadiran kader dalam beberapa kegiatan menjadi faktor yang dapat mengurangi konsistensi pelaksanaan. Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana dapat dinilai cukup baik dari aspek struktur, pembagian tugas, dan kewenangan, tetapi masih membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan konsistensi keterlibatan kader.

Keterkaitan antarpelaksana tersebut selanjutnya terlihat dalam komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung secara berjenjang dari Tim BKKBN kepada PLKB, kemudian kepada kader, dan selanjutnya kepada keluarga sasaran. Komunikasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program, tetapi juga untuk melakukan koordinasi mengenai waktu, tempat, peserta, serta perubahan kegiatan. Pemerintah desa turut memberikan dukungan, sementara kader menjadi penghubung antara pelaksana program dengan masyarakat. Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR telah membangun hubungan kerja antarpelaksana dan tidak hanya mengandalkan komunikasi administratif.

Komunikasi tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai aktivitas pelaksana, antara lain sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Penyuluhan juga bersifat interaktif karena keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendampingan remaja. Pembinaan bahkan tidak hanya dilakukan dalam kegiatan

kelompok, tetapi dapat dilanjutkan melalui komunikasi antara keluarga dengan kader atau PLKB ketika muncul persoalan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan sekaligus sebagai mekanisme untuk merespons kebutuhan masyarakat.

Meskipun komunikasi antarorganisasi telah berjalan cukup baik, efektivitasnya belum sepenuhnya mampu menghasilkan partisipasi keluarga yang konsisten. Informasi mengenai kegiatan telah sampai kepada keluarga melalui kader, tetapi tersampaikannya informasi belum selalu berujung pada kehadiran rutin. Artinya, keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari adanya penyampaian informasi, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana informasi tersebut menghasilkan pemahaman, respons, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini memperlihatkan hubungan antara dimensi komunikasi dengan standar dan sasaran kebijakan serta lingkungan keluarga, karena target partisipasi yang telah ditetapkan harus disampaikan melalui komunikasi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi kehidupan sasaran.

Dari sisi disposisi pelaksana, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang relatif lebih kuat. Para pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai substansi BKR dan tidak memandang program hanya sebagai kegiatan pertemuan administratif. Tim BKKBN memahami BKR sebagai upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi remaja, PLKB memandang tugasnya sebagai pembinaan dan pemenuhan informasi bagi keluarga, sedangkan kader memahami dirinya sebagai penghubung antara petugas dan masyarakat. Keluarga sasaran pun memahami BKR sebagai kegiatan yang memberikan pengetahuan

untuk membantu orang tua dalam memahami dan mendampingi remaja. Kesamaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap tujuan program pada berbagai tingkatan pelaksana.

Disposisi positif tersebut juga terlihat dari sikap pelaksana yang terbuka, responsif, dan tidak menghakimi ketika menghadapi persoalan keluarga dan remaja. Pelaksana berusaha memberikan respons sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan persoalan yang tidak dapat ditangani oleh kader diteruskan kepada PLKB. Selain itu, pelaksana tetap berusaha menjalankan kegiatan meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga. Dengan demikian, disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor yang paling mendukung keberlangsungan BKR di Kecamatan Kawali. Hasil penelitian bahkan menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dapat dikategorikan baik karena ditunjukkan melalui pemahaman program, sikap terbuka, komitmen, kesediaan melaksanakan tugas, respons terhadap masalah, serta tanggung jawab sesuai kedudukan masing-masing. Namun, disposisi pelaksana yang baik belum secara otomatis menyelesaikan persoalan implementasi. Komitmen dan kemauan pelaksana untuk menjalankan program tetap berhadapan dengan keterbatasan sumber daya dan rendahnya konsistensi kehadiran sebagian keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa keenam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Disposisi yang positif mampu menjaga program tetap berjalan, tetapi efektivitasnya membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, komunikasi yang efektif, struktur pelaksana yang kuat, serta kondisi lingkungan yang mendukung.

Variabel terakhir adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang menunjukkan bahwa kondisi eksternal secara umum cukup mendukung implementasi BKR. Dari aspek sosial, masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan program dan memahami manfaatnya, meskipun karakteristik keluarga dan remaja yang beragam membutuhkan pendekatan pembinaan yang tidak seragam. Dari aspek politik dan kelembagaan, keterlibatan pemerintah desa, PLKB, kader, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor pendukung keberlangsungan program. Dukungan tersebut terlihat antara lain melalui keterlibatan pemerintah desa dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia di tingkat desa.

Sebaliknya, aspek ekonomi lebih banyak memberikan pengaruh tidak langsung melalui keterbatasan waktu keluarga. Pekerjaan dan aktivitas rumah tangga menyebabkan sebagian keluarga tidak dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan kehadiran keluarga tidak tepat dipahami semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap program, tetapi lebih sebagai persoalan kesempatan dan kesesuaian waktu kegiatan dengan kondisi kehidupan keluarga. Temuan observasi juga menunjukkan bahwa tingkat kehadiran keluarga berbeda pada setiap kegiatan, yang memperlihatkan adanya pengaruh kesibukan keluarga terhadap partisipasi.

Jika keenam dimensi tersebut dipertautkan, terlihat bahwa implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali telah memiliki fondasi implementasi yang cukup kuat, terutama pada kejelasan tujuan, keberadaan struktur pelaksana, komunikasi, serta disposisi pelaksana. Tujuan program telah diterjemahkan ke

dalam penyuluhan dan pembinaan, struktur pelaksana telah membagi fungsi antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga, komunikasi telah menghubungkan setiap aktor, serta pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap program. Dengan demikian, program secara kelembagaan telah berjalan dan tujuan substantifnya telah diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata. Namun demikian, apabila dilihat dari tingkat optimalisasi hasil implementasi, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan dengan pencapaian sasaran secara konsisten. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada target operasional yang belum dipahami secara merata oleh keluarga, keterbatasan sumber daya dan waktu, beban kerja pelaksana, konsistensi keterlibatan kader, serta kehadiran keluarga yang belum stabil. Dengan kata lain, persoalan utama implementasi BKR di Kecamatan Kawali bukan terletak pada tidak berjalannya program, melainkan pada kemampuan program untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menjangkau keluarga sasaran secara berkelanjutan dan menghasilkan partisipasi yang konsisten.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat dikategorikan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kekuatan utama implementasi terletak pada kejelasan tujuan program, struktur dan pembagian tugas pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarpihak, serta disposisi pelaksana yang positif. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat adalah ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, kapasitas serta konsistensi kader, penerjemahan target operasional kepada keluarga sasaran, dan

penyesuaian waktu kegiatan dengan kondisi keluarga. Dengan demikian, peningkatan keberhasilan BKR tidak cukup dilakukan melalui penambahan kegiatan, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan konsistensi komunikasi dan pendampingan, serta strategi pelaksanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang saling berkaitan antardimensi, sebagaimana ditegaskan dalam model Van Meter dan Van Horn, sehingga keberhasilan BKR sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan standar kebijakan, sumber daya, struktur pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan implementasi secara bersamaan.

4.2.2 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh Tim BKKBN Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, pada dimensi standar dan sasaran kebijakan diketahui bahwa tujuan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dasarnya telah dipahami oleh pelaksana maupun keluarga sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"tujuan utama Program BKR adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam melakukan pembinaan terhadap remaja".*

Kemudian Menurut Informan 1:

> *"pembinaan tidak hanya ditujukan kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua agar mampu memberikan pendampingan, membangun komunikasi, serta melakukan pengawasan terhadap anak remajanya".*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari tingkat pelaksana kebijakan, tujuan BKR telah dipahami sebagai program pembinaan keluarga yang menempatkan orang tua sebagai pihak penting dalam proses tumbuh kembang remaja.

Pemahaman tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh Informan 2 ke dalam kegiatan di lapangan. Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan BKR diarahkan untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja mengenai cara menghadapi perkembangan remaja".*

Informasi dan materi yang diterima dari tingkat pelaksana kemudian diberikan kepada kader untuk diteruskan kepada keluarga sasaran. Dengan demikian, terdapat proses penerjemahan tujuan kebijakan dari tingkat Tim BKKBN kepada pelaksana lapangan dan selanjutnya kepada masyarakat.

Keterangan Informan 2 tersebut sejalan dengan pendapat Informan 3, yang menjelaskan bahwa:

> *"BKR membantu orang tua agar lebih memahami anak remajanya, terutama dalam hal komunikasi dan pendampingan*".

Sementara itu, Informan 4 selaku keluarga sasaran menyatakan bahwa:

> *"kegiatan BKR memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai cara menghadapi anak remaja dan membangun komunikasi dengan anak".*

Kesamaan pemahaman dari Informan 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan antara tujuan yang dipahami oleh pelaksana dengan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan menjadi titik awal dalam pengukuran kinerja implementasi, sehingga sasaran program harus realistis dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya pelaksana. Dalam konteks BKR, tujuan pembinaan keluarga remaja, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan perlu diterjemahkan secara operasional dan tidak hanya berhenti pada rumusan normatif (Efiyanti et al., 2022; Muksin et al., 2024; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dari aspek sasaran kebijakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sasaran Program BKR telah diarahkan kepada keluarga yang memiliki anak remaja. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"penentuan sasaran dilakukan berdasarkan data keluarga dan kondisi wilayah*.

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"keluarga yang mempunyai anak remaja menjadi sasaran pembinaan*",

sedangkan Informan 3:

> *"membantu mengidentifikasi keluarga sasaran di lingkungan masyarakat".*

Sementara itu, Informan 4:

> *"mengetahui dirinya sebagai sasaran karena memiliki anak remaja dan memperoleh informasi mengenai kegiatan BKR dari kader".*

Kesesuaian tersebut memperlihatkan bahwa penentuan sasaran tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui keterlibatan pelaksana di tingkat masyarakat. Hal ini penting karena landasan teori penelitian menjelaskan

bahwa BKR ditujukan kepada keluarga yang memiliki remaja usia 10–24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam membina tumbuh kembang remaja (Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025; Novianti & Fatonah, 2021). Dengan demikian, sasaran yang diterapkan dalam pelaksanaan BKR di Kecamatan Kawali memiliki kesesuaian dengan sasaran yang dijelaskan dalam landasan teori penelitian.

Selanjutnya, dari aspek pedoman atau standar pelaksanaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana menggunakan pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Informan 1 menjelaskan bahwa*:*

> *"pelaksanaan BKR mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan*",

sedangkan Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"pedoman digunakan untuk menentukan materi dan kegiatan pembinaan*".

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan keluarga. Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"kader memperoleh arahan dari PLKB mengenai materi dan pelaksanaan kegiatan",*

sedangkan Informan 4:

> *"lebih mengenal BKR melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan daripada melalui pedoman tertulis*".

Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diterjemahkan secara berjenjang sesuai dengan posisi masing-masing aktor. Tim BKKBN dan PLKB memahami standar dalam bentuk pedoman kerja, kader menerimanya dalam bentuk arahan teknis, sedangkan keluarga sasaran memahami standar tersebut melalui kegiatan yang mereka ikuti. Kondisi tersebut

relevan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata merupakan pelaksanaan teknis dari keputusan formal, tetapi merupakan proses adaptif, partisipatif, dan kontekstual yang dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana serta kondisi masyarakat sasaran (Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025).

Penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi masyarakat juga terlihat dari penyampaian Informan 2 bahwa:

> *"materi pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat*".

Sementara itu, Informan 3:

> *"menyampaikan materi dengan bahasa yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh keluarga*",

kemudian Informan 4:

> *"menilai bahwa materi BKR cukup mudah dipahami karena menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari*".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa standar program tidak diterapkan secara kaku, tetapi diterjemahkan sesuai dengan kondisi sasaran.

Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori yang menempatkan BKR sebagai program yang membutuhkan keterpaduan antara tujuan program, materi pembinaan, dan praktik lapangan. Landasan teori juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi BKR tidak cukup dilihat dari keberadaan kelompok BKR, tetapi juga dari kemampuan pelaksana membangun pembinaan rutin, menyediakan kader yang terlatih, memberikan materi yang sesuai, dan

melaksanakan monitoring secara berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Berdasarkan studi dokumentasi Kecamatan Kawali Dalam Angka 2024, kondisi demografis Kecamatan Kawali juga memperlihatkan adanya kelompok penduduk usia remaja yang menjadi kelompok sasaran yang relevan bagi Program BKR. Data tersebut dapat digunakan sebagai pendukung bahwa pembinaan keluarga yang mempunyai anak remaja memang memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat Kecamatan Kawali. Dengan demikian, keberadaan kelompok usia remaja di wilayah Kecamatan Kawali memperkuat urgensi pelaksanaan Program BKR.

Berdasarkan hasil reduksi data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian pemahaman antara Informan 1, 2, 3, dan 4 mengenai tujuan Program BKR. Informan 1 memahami BKR dari sisi tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam membina remaja, Informan 2 menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam pembinaan dan penyuluhan, Informan 3 melaksanakan penyampaian informasi kepada keluarga, sedangkan Informan 4 memahami manfaat BKR dalam membantu orang tua menghadapi dan mendampingi anak remaja.

Selain itu, sasaran program telah dipahami sebagai keluarga yang memiliki anak remaja, sementara pedoman digunakan oleh pelaksana sebagai acuan kegiatan. Hasil reduksi juga menunjukkan adanya penyesuaian materi dan pelaksanaan dengan kondisi keluarga. Namun, terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara pelaksana dan keluarga. Pelaksana lebih memahami standar sebagai pedoman kerja,

sedangkan keluarga sasaran lebih memahami program melalui kegiatan penyuluhan yang mereka ikuti.

Dengan demikian, data yang direduksi menunjukkan bahwa standar dan sasaran program relatif jelas pada tingkat pelaksana, tetapi pemahaman terhadap standar dan target program belum sepenuhnya merata pada tingkat keluarga sasaran.

Berdasarkan penyajian data tersebut, dimensi standar dan sasaran kebijakan cenderung menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari kesesuaian jawaban Informan 1, 2, 3, dan 4. Tidak ditemukan perbedaan mendasar mengenai tujuan program. Keempat informan memahami bahwa BKR berkaitan dengan pembinaan keluarga yang mempunyai anak remaja, khususnya dalam meningkatkan kemampuan orang tua dalam berkomunikasi, mendampingi, dan mengawasi remaja.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan standar dan tujuan menjadi dasar bagi pelaksana untuk mengarahkan tindakan serta menentukan keberhasilan implementasi. Dalam landasan teori penelitian juga ditegaskan bahwa sasaran program harus realistis dan sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat, sementara tujuan dan indikator capaian harus diterjemahkan secara operasional di tingkat lapangan (Efiyanti et al., 2022; Muksin et al., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, tujuan BKR telah diterjemahkan secara operasional melalui penyuluhan, pembinaan keluarga, penyampaian materi

mengenai perkembangan remaja, komunikasi orang tua dan anak, kesehatan reproduksi, serta pembentukan karakter. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara standar kebijakan dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Kejelasan sasaran juga menjadi faktor pendukung. Informan 1, 2, dan 3 memiliki pemahaman bahwa keluarga yang memiliki anak remaja merupakan sasaran BKR, sementara Informan 4 mengetahui dirinya sebagai sasaran melalui informasi yang diberikan kader. Hal ini sejalan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa BKR ditujukan kepada keluarga dengan remaja usia 10–24 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam membina tumbuh kembang remaja.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya faktor penghambat pada aspek pemahaman standar di tingkat sasaran. Keluarga tidak seluruhnya memahami pedoman atau target program secara formal. Informan 4 lebih mengenal BKR sebagai kegiatan penyuluhan dan pembinaan daripada sebagai kebijakan yang memiliki standar, indikator, dan target tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman pelaksana dan pemahaman kelompok sasaran.

Temuan tersebut penting jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn karena standar dan tujuan kebijakan bukan hanya harus jelas bagi organisasi pelaksana, tetapi juga harus dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Landasan teori penelitian menegaskan bahwa untuk konteks BKR, tujuan pembinaan, target partisipasi, dan indikator capaian harus diterjemahkan secara operasional, bukan berhenti pada rumusan normatif (Ni

Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Di sisi lain, penyesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat justru menjadi kekuatan dalam implementasi. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Informan 2 bahwa:

> *"materi dapat disesuaikan dengan permasalahan yang berkembang di masyarakat".*

Iinforman 3 kemudian:

> *"menyederhanakan materi agar lebih mudah dipahami oleh keluarga",*

sedangkan Informan 4:

> "*menilai materi tersebut mudah dipahami karena menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.*

Temuan ini memperlihatkan bahwa standar kebijakan telah diterjemahkan melalui pendekatan yang adaptif.

Pendekatan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam konteks BKR perlu dipahami sebagai proses yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual, karena pelaksanaan program keluarga-remaja berlangsung melalui interaksi antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, jejaring kelembagaan, dan partisipasi keluarga sasaran (Putra et al., 2024; Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dan sasaran BKR telah mendukung pelaksanaan program, sedangkan keterbatasan pemahaman keluarga terhadap standar dan target program menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi. Artinya, permasalahan pada dimensi ini bukan terletak pada tidak adanya standar dan tujuan, tetapi pada belum

sepenuhnya meratanya penerjemahan standar tersebut sampai kepada keluarga sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pembahasan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor yang lebih dominan mendukung implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dukungan tersebut ditunjukkan oleh kejelasan tujuan program, kesamaan pemahaman antara Informan 1, 2, 3, dan 4, kejelasan sasaran keluarga yang mempunyai anak remaja, serta adanya pedoman yang digunakan oleh pelaksana.

Sementara itu, faktor penghambatnya terletak pada belum meratanya pemahaman kelompok sasaran mengenai standar, target, dan indikator program. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah dipahami dengan baik oleh pelaksana, penerjemahan standar tersebut kepada keluarga sasaran masih perlu diperkuat. Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian bahwa dalam implementasi BKR, tujuan pembinaan, target partisipasi, dan indikator capaian harus diterjemahkan secara operasional serta disesuaikan dengan konteks lokal keluarga dan remaja sasaran.

standar dan sasaran Program BKR di Kecamatan Kawali secara substantif telah jelas dan dipahami oleh para pelaksana serta keluarga sasaran, sehingga menjadi faktor pendukung implementasi. Namun, standar tersebut belum sepenuhnya dipahami dalam bentuk target dan indikator oleh keluarga sasaran, sehingga masih menjadi keterbatasan dalam mencapai implementasi yang optimal. Ini juga konsisten dengan landasan teori Purnama yang menempatkan kejelasan

tujuan, target partisipasi, dan penerjemahan operasional di lapangan sebagai inti dimensi standar dan tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Sumber daya dalam pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pelaksana, tetapi juga mencakup kemampuan atau kompetensi petugas dan kader, ketersediaan materi, waktu, fasilitas, serta dukungan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup sumber daya manusia, keuangan, waktu, infrastruktur, dan validitas data, dan keterbatasan pada salah satu unsur tersebut dapat menurunkan kualitas implementasi (Fauziyah & Arif, 2021; Kiemas et al., 2026; Muksin et al., 2024; Nuralisa et al., 2025).

Dari aspek sumber daya manusia, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR di Kecamatan Kawali telah didukung oleh keberadaan Tim BKKBN, PLKB, dan kader. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"tenaga pelaksana untuk menjalankan kegiatan BKR tersedia, tetapi wilayah kerja dan kegiatan yang harus ditangani cukup luas sehingga diperlukan pembagian tugas dan koordinasi yang baik"*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia dalam pelaksanaan BKR bukan semata-mata karena tidak adanya petugas, tetapi

lebih pada keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga jika dibandingkan dengan luas cakupan pekerjaan yang harus ditangani.

Keterangan Informan 1 tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"dalam pelaksanaan tugasnya, perhatian petugas tidak hanya diberikan kepada Program BKR, tetapi juga terbagi dengan berbagai program keluarga berencana lainnya*".

Kondisi tersebut menyebabkan waktu dan perhatian petugas harus dibagi antara beberapa tugas dan program. Dengan demikian, meskipun petugas tersedia, beban kerja yang cukup luas menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan BKR.

Di sisi lain, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"keberadaan kader sangat membantu pelaksanaan kegiatan karena kader berada lebih dekat dengan masyarakat dan keluarga sasaran*".

Kader membantu menyampaikan informasi, mengajak keluarga mengikuti kegiatan, serta membantu pelaksanaan pembinaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kader menjadi sumber daya manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara petugas dengan keluarga sasaran.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan 4 selaku yang menjelaskan bahwa:

> "*informasi mengenai BKR dan materi pembinaan diterima melalui kader maupun petugas."*

Keberadaan kader membuat keluarga lebih mudah memperoleh informasi mengenai kegiatan. Dengan demikian, dari perspektif keluarga sasaran, keberadaan

kader menjadi salah satu sumber daya yang membantu program menjangkau masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang secara khusus menyebutkan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Bahkan, penelitian mengenai BKR di Kuta Selatan menunjukkan bahwa kekurangan SDM dan lemahnya partisipasi kader menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program belum berjalan dengan baik (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025). Sebaliknya, keaktifan PLKB dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam implementasi program keluarga dan remaja (Latifah, 2025).

Dari aspek kompetensi sumber daya manusia, hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan petugas dalam melaksanakan BKR relatif mendukung. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"petugas memperoleh pembekalan mengenai pelaksanaan program dan materi yang berkaitan dengan pembinaan keluarga remaja*".

Informan 2 juga menjelaskan bahwa:

> *"petugas memahami materi BKR dan kemudian memberikan arahan kepada kader*".

Sementara Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"kemampuan kader diperoleh melalui arahan dan pendampingan dari PLKB*".

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proses transfer pengetahuan dari petugas kepada kader sebelum materi disampaikan kepada keluarga sasaran.

Namun, berdasarkan keterangan Informan 3, kemampuan kader tidak sepenuhnya sama. Sebagian kader lebih aktif dan lebih mudah memahami materi,

sedangkan kader lainnya masih membutuhkan arahan dan pendampingan dari petugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan kader belum secara otomatis menunjukkan keseragaman kompetensi kader. Oleh karena itu, pembinaan dan pendampingan terhadap kader masih menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan BKR.

Hal tersebut sejalan dengan landasan teori penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi BKR tidak cukup dilihat dari keberadaan kelompok BKR saja, tetapi juga dari kemampuan pelaksana membangun pembinaan rutin, kader yang terlatih, materi yang sesuai, serta mekanisme monitoring yang berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024). Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan kader merupakan bagian penting dari sumber daya yang menentukan kualitas implementasi BKR.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan materi pembinaan juga menjadi faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, materi BKR telah tersedia dan disampaikan kepada keluarga melalui kegiatan pembinaan. Materi yang diberikan mencakup komunikasi orang tua dengan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, dan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan kondisi permasalahan yang berkembang di masyarakat".*

Selanjutnya, Informan 3:

> *"menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh keluarga*".

Hal tersebut dirasakan oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa:

"materi BKR cukup mudah dipahami karena disampaikan melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari".

Temuan ini menunjukkan bahwa materi bukan hanya tersedia secara formal, tetapi juga telah mengalami proses penyesuaian oleh kader agar dapat diterima oleh kelompok sasaran.

Temuan tersebut relevan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa BKR menuntut adanya keterpaduan antara tujuan program, materi pembinaan, dan praktik lapangan. BKR ditujukan kepada keluarga dengan remaja usia 10–24 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam membina tumbuh kembang remaja. Oleh karena itu, materi yang sesuai dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi BKR (Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025; Novianti & Fatonah, 2021).

Dari aspek sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan BKR memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan masyarakat atau desa. Berdasarkan observasi, peneliti melihat bahwa kegiatan pembinaan menggunakan tempat yang tersedia untuk kegiatan masyarakat dan dapat digunakan untuk pertemuan kader dengan keluarga sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak secara langsung menghentikan pelaksanaan kegiatan, tetapi pelaksana melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan sarana yang tersedia.

Dari sisi pembiayaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan BKR memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan pembiayaan menyebabkan pelaksana

perlu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran menjadi faktor yang dapat memperkuat pelaksanaan program, tetapi keterbatasannya dapat menjadi hambatan ketika kegiatan membutuhkan dukungan operasional yang lebih besar.

Dari sisi waktu, keterbatasan waktu juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan BKR. Informan 2 menjelaskan bahwa

> *"petugas harus membagi waktu antara BKR dengan program lainnya, sedangkan kader juga memiliki kegiatan dan pekerjaan lain di luar BKR".*

Akibatnya, kehadiran dan keterlibatan kader tidak selalu dapat berlangsung secara optimal pada setiap kegiatan. Dengan demikian, sumber daya waktu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesinambungan pelaksanaan program.

Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian bahwa variabel sumber daya dalam model Van Meter dan Van Horn tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, tetapi juga mencakup keuangan, waktu, infrastruktur, dan validitas data. Keterbatasan pada salah satu komponen sumber daya tersebut dapat secara langsung memengaruhi mutu implementasi (Fauziyah & Arif, 2021; Kiemas et al., 2026; Muksin et al., 2024; Nuralisa et al., 2025).

Berdasarkan hasil reduksi data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa sumber daya dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali terdiri atas sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, materi pembinaan, fasilitas, pembiayaan, dan waktu. Dari sisi sumber daya manusia, Informan 1 dan 2 menunjukkan bahwa*:*

> *"petugas tersedia dan mampu menjalankan tugas*",

sementara Informan 3 menunjukkan bahwa kader membantu petugas menjangkau keluarga sasaran. Kemudian Informan 4 juga merasakan manfaat keberadaan kader dalam memperoleh informasi dan mengikuti kegiatan BKR.

Namun demikian, hasil reduksi juga menunjukkan adanya beberapa keterbatasan, yaitu beban kerja petugas yang cukup luas, pembagian perhatian dengan program lain, kesibukan kader, perbedaan kemampuan kader, keterbatasan waktu, serta dukungan fasilitas dan pembiayaan yang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, permasalahan sumber daya bukan berupa ketiadaan sumber daya secara keseluruhan, melainkan belum optimalnya kapasitas sumber daya apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan program.

Jika dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan variabel yang menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam landasan teori penelitian disebutkan bahwa sumber daya mencakup SDM, keuangan, waktu, infrastruktur, dan validitas data, sehingga keterbatasan salah satu unsur dapat menurunkan mutu implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Keberadaan Tim BKKBN, PLKB, dan kader memungkinkan kegiatan pembinaan tetap berjalan. Informan 1 dan 2 menunjukkan bahwa terdapat petugas yang menjalankan fungsi pembinaan, sedangkan Informan 3 menunjukkan bahwa kader berperan dalam menjangkau keluarga sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan BKR tidak hanya bertumpu pada Tim BKKBN, tetapi juga pada sumber daya manusia di tingkat lapangan.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa pelaksanaan BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana serta peran PLKB dan kader. Studi Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) bahkan menunjukkan bahwa kekurangan SDM dan lemahnya partisipasi kader dapat menjadi hambatan implementasi BKR. Sebaliknya, keaktifan PLKB dan partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor pendukung program (Latifah, 2025).

Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan SDM belum berarti kecukupan SDM. Pernyataan Informan 1 dan Informan 2 menunjukkan bahwa petugas harus menangani berbagai program sehingga perhatian dan waktu mereka terbagi. Dengan kata lain, hambatan yang ditemukan bukan terletak pada tidak adanya petugas, tetapi pada beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas waktu yang tersedia. Kondisi ini dapat memengaruhi frekuensi pembinaan, pendampingan kader, monitoring, dan jangkauan keluarga sasaran.

Kondisi tersebut memperlihatkan relevansi teori Van Meter dan Van Horn karena keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang tersedia. Landasan teori penelitian bahkan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi antara tujuan yang jelas, sumber daya yang memadai, komunikasi yang efektif, karakter organisasi yang siap, disposisi pelaksana yang mendukung, dan lingkungan eksternal yang kondusif (Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Selain itu, keberadaan kader menjadi faktor pendukung sekaligus memiliki sisi penghambat. Kader membantu memperluas jangkauan program karena berada dekat dengan masyarakat. Namun, berdasarkan keterangan Informan 3, kader memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak selalu dapat hadir dalam setiap kegiatan. Perbedaan kemampuan kader juga menyebabkan kebutuhan pembinaan dan pendampingan tetap diperlukan. Dengan demikian, kader merupakan sumber daya strategis, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal.

Temuan tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang tercantum dalam landasan teori bahwa lemahnya partisipasi kader merupakan salah satu hambatan dalam implementasi BKR (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025). Sebaliknya, literatur juga menunjukkan bahwa kader yang terlatih dan pembinaan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari keberhasilan BKR (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Dari aspek materi, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan materi menjadi faktor pendukung. Materi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dalam bentuk informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan oleh pelaksana untuk mencapai tujuan program. Informan 4 sebagai keluarga sasaran juga memberikan penguatan bahwa materi dapat diterima karena disampaikan melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan BKR membutuhkan keterpaduan antara tujuan program, materi

pembinaan, dan praktik lapangan. BKR membutuhkan kader yang terlatih, materi yang sesuai, serta pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Sementara itu, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan waktu menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan. Walaupun fasilitas yang tersedia masih dapat dimanfaatkan dan kegiatan tetap berjalan, keterbatasan tersebut menyebabkan pelaksana harus melakukan penyesuaian. Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali dapat dikategorikan cukup tersedia untuk menjalankan program, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan secara optimal dan berkelanjutan.

Argumentasi tersebut penting karena menunjukkan bahwa implementasi BKR tidak mengalami hambatan karena tidak memiliki sumber daya sama sekali. Sebaliknya, sumber daya dasar telah tersedia, tetapi terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dengan beban pelaksanaan program. Petugas tersedia tetapi harus menangani program lain, kader tersedia tetapi memiliki kesibukan lain, materi tersedia tetapi kemampuan kader berbeda-beda, dan fasilitas tersedia tetapi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pembahasan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor yang sekaligus mendukung dan menghambat implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Faktor pendukung terlihat dari tersedianya Tim BKKBN, PLKB, kader, materi pembinaan, fasilitas dasar, serta dukungan pembiayaan. Keberadaan sumber

daya tersebut memungkinkan kegiatan BKR tetap berjalan dan keluarga sasaran tetap memperoleh pembinaan. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas pelaksana, peran PLKB dan kader, materi yang sesuai, serta pembinaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, faktor penghambat berasal dari keterbatasan jumlah dan waktu petugas, beban kerja yang terbagi dengan program lain, kesibukan kader, perbedaan kompetensi kader, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas. Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan infrastruktur merupakan komponen penting dalam implementasi, dan keterbatasan salah satu unsur dapat menurunkan kualitas implementasi (Fauziyah & Arif, 2021; Kiemas et al., 2026; Muksin et al., 2024; Nuralisa et al., 2025).

Dengan demikian, argumentasi utama pada dimensi sumber daya adalah bahwa implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali tidak terkendala oleh ketiadaan sumber daya, tetapi oleh belum seimbangnya kapasitas sumber daya dengan beban dan kebutuhan pelaksanaan program. Ketersediaan petugas, kader, materi, dan fasilitas telah menjadi modal utama pelaksanaan BKR, tetapi keterbatasan waktu, pembagian tugas, keaktifan kader, kompetensi kader, serta dukungan pembiayaan menyebabkan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi BKR secara optimal. Hal ini memperkuat pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kecukupan sumber daya menjadi salah satu prasyarat penting agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang efektif.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa karakteristik badan pelaksana dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya pembagian peran, kewenangan, dan mekanisme kerja yang relatif jelas antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR tidak dilakukan oleh satu organisasi secara individual, tetapi melibatkan beberapa aktor yang mempunyai fungsi berbeda dalam mencapai tujuan program. Dalam landasan teori penelitian, model Van Meter dan Van Horn menempatkan karakteristik organisasi pelaksana sebagai salah satu dari enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, bersama dengan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dari aspek struktur dan posisi masing-masing pelaksana, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan BKR melibatkan pemerintah daerah, petugas lapangan, pemerintah desa, dan kader, yang masing-masing mempunyai peran dalam pelaksanaan program".*

Pernyataan Informan 1 tersebut menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana BKR bersifat berjenjang dan melibatkan beberapa unsur kelembagaan. Selanjutnya, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"dirinya berada pada posisi sebagai petugas lapangan yang melakukan pembinaan serta koordinasi dengan kader dan pemerintah desa".*

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat, terutama dalam menghubungi dan mengajak keluarga sasaran*".

Dari sisi kelompok sasaran, Informan 4 selaku keluarga menyatakan bahwa:

> *"pihak yang paling sering berhubungan dengan keluarga dalam kegiatan BKR adalah kader dan petugas lapangan".*

Keterangan keempat informan tersebut memperlihatkan adanya rantai pelaksanaan program yang cukup jelas, yaitu Tim BKKBN memberikan arahan dan pembinaan, PLKB menjalankan fungsi teknis dan koordinasi di lapangan, kader membantu menjangkau masyarakat, sedangkan keluarga menjadi sasaran yang menerima pembinaan. Dengan demikian, keberadaan struktur tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan BKR karena setiap aktor memiliki posisi dan fungsi yang dapat dibedakan.

Dari aspek pembagian tugas, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pembagian tugas dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing".*

Tim memberikan arahan dan pembinaan, PLKB menjalankan fungsi teknis di lapangan, sedangkan kader membantu menjangkau keluarga. Informan 2 memperjelas bahwa:

> *"tugasnya meliputi penyuluhan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan kegiatan".*

Sementara itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"tugas kader meliputi mengumpulkan peserta, menyampaikan informasi, membantu kegiatan, dan melaporkan kondisi kegiatan kepada petugas*".

Adapun Informan 4 memahami bahwa:

> *"keluarga mempunyai peran untuk mengikuti kegiatan dan menerapkan informasi yang diperoleh dalam mendampingi anak".*

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana BKR di Kecamatan Kawali tidak hanya ditunjukkan oleh struktur formal, tetapi juga oleh pembagian fungsi operasional di lapangan. Tim BKKBN berperan pada tingkat pengarahan dan pembinaan, PLKB menjadi pelaksana teknis sekaligus penghubung dengan kader, kader menjadi penghubung dengan masyarakat, dan keluarga menjadi penerima sekaligus pengguna informasi program. Pola tersebut membuat pelaksanaan BKR lebih memungkinkan untuk menjangkau keluarga yang tersebar di wilayah Kecamatan Kawali.

Dari aspek kewenangan, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keputusan yang berkaitan dengan kebijakan program berada pada tingkat yang memiliki kewenangan, sedangkan pelaksana lapangan lebih banyak menjalankan dan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi wilayah".*

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"permasalahan yang masih dapat ditangani diselesaikan di lapangan, tetapi apabila membutuhkan keputusan lebih lanjut akan dikoordinasikan kepada atasan*".

Sementara Informan 3 menyatakan bahwa*:*

> *"kader tidak mengambil keputusan sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, tetapi menyampaikan permasalahan kepada PLKB*".

Adapun Informan 4 biasanya menyampaikan bahwa pertanyaan atau permasalahan kepada kader terlebih dahulu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa batas kewenangan antaraktor relatif jelas. Kader tidak mengambil keputusan yang berada di luar kewenangannya, tetapi

meneruskan permasalahan kepada PLKB. PLKB dapat menyelesaikan persoalan teknis tertentu di lapangan, sedangkan persoalan yang membutuhkan keputusan lebih tinggi diteruskan kepada atasan. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya pola hierarki dan koordinasi dalam pelaksanaan program.

Dari aspek mekanisme kerja, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan kegiatan dimulai dari koordinasi, kemudian menentukan kegiatan dan sasaran, menghubungi kader serta keluarga, melaksanakan penyuluhan, dan selanjutnya dilakukan pencatatan serta pelaporan*".

Kemudian Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader memperoleh informasi mengenai kegiatan dan kemudian membantu menghubungi atau mengajak keluarga*".

Sementara Informan 4:

> *"memperoleh informasi kegiatan melalui kader dan kemudian mengikuti penyuluhan".*

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme kerja BKR telah memiliki tahapan yang relatif terstruktur. Pelaksanaan tidak langsung dilakukan melalui penyuluhan, tetapi diawali dengan koordinasi, penentuan sasaran, mobilisasi peserta, pelaksanaan kegiatan, serta pencatatan dan pelaporan. Hal tersebut menjadi pendukung karena memberikan pola kerja yang dapat dijadikan acuan oleh pelaksana.

Selanjutnya, dari aspek hubungan kerja antaraktor, Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"hubungan kerja dilakukan secara koordinatif dan BKR tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja karena membutuhkan keterlibatan petugas, kader, pemerintah desa, dan keluarga*".

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa:

> "*hubungan dengan kader cukup baik karena kader menjadi penghubung antara petugas dengan masyarakat*".

Selanjutnya Informan 3 juga menjelaskan bahwa:

> *"apabila terdapat informasi atau permasalahan, kader berkomunikasi dengan PLKB".*

Sementara Informan 4 menyatakan bahwa*:*

> *"hubungan dengan kader cukup baik karena kader mudah dihubungi ketika keluarga ingin bertanya mengenai kegiatan BKR.*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antaraktor menjadi salah satu kekuatan dalam karakteristik badan pelaksana. Hubungan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berlangsung secara praktis melalui komunikasi dan koordinasi. Kader menjadi aktor penting karena berada paling dekat dengan keluarga, sedangkan PLKB menjadi pihak yang memberikan arahan dan menangani persoalan yang tidak dapat diselesaikan kader.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi BKR sangat bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Landasan teori juga menegaskan bahwa BKR tidak berdiri sendiri dalam ekosistem BKKBN, tetapi terhubung dengan program lain sehingga implementasinya membutuhkan koordinasi dan integrasi layanan (Efiyanti et al., 2022; Latifah, 2025; Wulandari, 2021).

Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana dalam penelitian ini dapat dilihat bukan hanya dari struktur organisasi formal, tetapi dari kemampuan organisasi tersebut membagi fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab serta membangun hubungan kerja antaraktor. Hal ini penting karena BKR merupakan

program berbasis keluarga dan komunitas yang pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga.

Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa karakteristik badan pelaksana Program BKR di Kecamatan Kawali ditandai oleh adanya beberapa unsur pelaksana yang saling melengkapi, pembagian tugas berdasarkan kewenangan, mekanisme kerja yang berjenjang, serta hubungan kerja yang bersifat koordinatif.

Informan 1 menunjukkan adanya struktur pelaksana yang melibatkan Tim BKKBN, petugas lapangan, pemerintah desa, dan kader. Informan 2 menunjukkan posisi PLKB sebagai pelaksana teknis sekaligus koordinator di lapangan. Informan 3 menunjukkan peran kader sebagai penghubung antara petugas dengan keluarga. Informan 4 memperlihatkan bahwa keluarga menerima pelayanan dan informasi terutama melalui kader dan petugas.

Reduksi data juga menunjukkan bahwa pembagian kewenangan relatif jelas. Informan 1 menjelaskan bahwa;

"batas kewenangan antara tingkat kebijakan dan pelaksana lapangan",

Informan 2 menyelesaikan persoalan yang dapat ditangani di lapangan dan meneruskan persoalan tertentu kepada atasan, sedangkan Informan 3 meneruskan persoalan kebijakan kepada PLKB.

Dengan demikian, faktor pendukung utama pada dimensi ini adalah struktur peran yang relatif jelas, adanya pembagian tugas, adanya mekanisme kerja, dan hubungan koordinatif antaraktor. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya

ketergantungan pada koordinasi dan keaktifan kader serta potensi keterbatasan kapasitas masing-masing pelaksana dalam menjalankan tugas.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi. Model tersebut menempatkan karakteristik organisasi pelaksana sebagai bagian yang saling berhubungan dengan sumber daya, komunikasi, disposisi, serta lingkungan kebijakan. Dengan demikian, implementasi tidak cukup hanya memiliki tujuan dan sumber daya, tetapi membutuhkan organisasi pelaksana yang mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan di lapangan (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik badan pelaksana menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Argumentasi tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas yang relatif jelas antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga. Informan 1 memberikan arahan dan pembinaan, Informan 2 menjalankan fungsi teknis, koordinasi, dan pemantauan, sedangkan Informan 3 membantu menghubungkan program dengan keluarga. Pembagian tersebut memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya.

Keberadaan kader sebagai penghubung antara pelaksana dengan keluarga juga merupakan kekuatan tersendiri. Informan 2 menyatakan bahwa*:*

"kader menjadi penghubung dengan masyarakat",

sedangkan Inforrman 4 menyatakan bahwa*:*

"kader mudah dihubungi ketika keluarga membutuhkan informasi".

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur pelaksana BKR memiliki saluran organisasi sampai pada tingkat masyarakat, sehingga program tidak hanya bergantung pada petugas formal.

Temuan ini sejalan dengan landasan teori penelitian yang menegaskan bahwa pelaksanaan BKR di tingkat lokal sangat bergantung pada peran PLKB, kapasitas kader, dukungan pemerintah desa, dan koordinasi antaraktor lokal. PLKB diposisikan sebagai ujung tombak pelaksanaan program BKKBN di tingkat desa karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan (Latifah, 2025).

Karakteristik badan pelaksana juga terlihat dari adanya mekanisme kewenangan yang berjenjang. Kader tidak mengambil keputusan mengenai kebijakan, tetapi meneruskan permasalahan kepada PLKB. PLKB menangani persoalan teknis yang masih berada dalam kewenangannya dan meneruskan persoalan tertentu kepada atasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR telah memiliki batas kewenangan yang relatif jelas sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas.

Namun demikian, karakteristik badan pelaksana juga memiliki faktor penghambat, terutama karena pelaksanaan BKR melibatkan banyak aktor sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kesinambungan hubungan kerja dan keaktifan setiap pihak. Informan 1 secara eksplisit menyatakan bahwa BKR tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja karena membutuhkan keterlibatan petugas,

kader, pemerintah desa, dan keluarga. Artinya, semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan terhadap koordinasi yang konsisten.

Kondisi tersebut penting karena landasan teori penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi BKR yang konsisten dalam penelitian terdahulu antara lain kekurangan SDM, rendahnya komitmen antarsektor, dan lemahnya partisipasi kader (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Sebaliknya, dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung implementasi program keluarga dan remaja (Latifah, 2025).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian di Kecamatan Kawali, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pelaksana sudah tersedia dan hubungan kerja relatif baik, tetapi keberhasilan struktur tersebut tetap bergantung pada keaktifan aktor di dalamnya. Dengan kata lain, struktur organisasi yang jelas belum secara otomatis menjamin optimalnya implementasi apabila salah satu unsur pelaksana tidak aktif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya monitoring dan pencatatan kegiatan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dengan rencana dan kendala yang dihadapi*".

Informan 2 melakukan pemantauan terhadap kegiatan kelompok dan keaktifan kader serta keluarga, sedangkan Informan 3 mengetahui adanya pemantauan melalui pertanyaan petugas mengenai kegiatan dan jumlah peserta. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik badan pelaksana juga didukung oleh adanya fungsi pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan landasan teori BKR yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari keberadaan kelompok BKR, tetapi juga dari kemampuan pelaksana membangun pembinaan rutin, kader yang terlatih, materi yang sesuai, dan mekanisme monitoring yang berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana di Kecamatan Kawali menunjukkan bahwa organisasi pelaksana telah mempunyai struktur peran dan mekanisme kerja yang mendukung, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kemampuan menjaga koordinasi dan keaktifan setiap aktor. Hal tersebut sesuai dengan perspektif Van Meter dan Van Horn bahwa hasil implementasi merupakan hasil interaksi berbagai variabel dan bukan hanya ditentukan oleh desain kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pembahasan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana lebih dominan menjadi faktor pendukung implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Faktor pendukung terlihat dari adanya struktur pelaksana yang melibatkan Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader, dan keluarga; pembagian tugas yang relatif jelas; batas kewenangan yang dapat dibedakan; mekanisme kerja yang terstruktur; serta hubungan kerja yang bersifat koordinatif. Informan 1, 2, 3, dan 4 memberikan keterangan yang saling memperkuat mengenai posisi dan fungsi masing-masing aktor dalam pelaksanaan BKR.

Adapun faktor penghambatnya bukan terutama berupa ketidakjelasan struktur, tetapi ketergantungan pelaksanaan pada koordinasi dan keaktifan masing-

masing aktor, khususnya kader dan pelaksana lapangan. Apabila koordinasi tidak berjalan atau salah satu aktor tidak aktif, maka jangkauan pembinaan kepada keluarga dapat berkurang. Kondisi tersebut sejalan dengan landasan teori yang menempatkan kapasitas organisasi, peran PLKB dan kader, dukungan pemerintah desa, serta koordinasi antaraktor lokal sebagai unsur penting dalam implementasi BKR.

Argumentasi utama pada dimensi ini adalah bahwa karakteristik badan pelaksana BKR di Kecamatan Kawali sudah cukup mendukung karena memiliki pembagian peran dan kewenangan yang relatif jelas. Namun, efektivitas struktur tersebut sangat bergantung pada koordinasi dan keaktifan aktor di lapangan. Dengan demikian, kekuatan utama bukan hanya terletak pada keberadaan organisasi pelaksana, tetapi pada kemampuan masing-masing unsur untuk menjalankan fungsi dan bekerja secara terkoordinasi dalam menjangkau keluarga sasaran

4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diketahui bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis telah berlangsung secara berjenjang, mulai dari Tim BKKBN, PLKB, kader, hingga keluarga sasaran. Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai program tidak berhenti pada tingkat pelaksana, tetapi diteruskan sampai kepada kelompok sasaran. Kondisi ini sesuai dengan landasan teori penelitian yang menempatkan komunikasi antarlembaga sebagai salah satu variabel penting dalam

model implementasi Van Meter dan Van Horn. Dalam landasan teori dijelaskan bahwa standar program harus dipahami secara akurat dan konsisten oleh para pelaksana, sementara koordinasi formal belum cukup apabila tidak diikuti dengan sinkronisasi dalam pelaksanaan di lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dari aspek penyampaian informasi, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"informasi mengenai pelaksanaan BKR disampaikan secara berjenjang kepada petugas lapangan dan kemudian diteruskan kepada kader".*

Selanjutnya, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"informasi yang diterima dari tingkat atas disampaikan kepada kader, terutama berkaitan dengan materi, jadwal kegiatan, sasaran, dan teknis pelaksanaan.*"

Informan 3 selaku kader kemudian meneruskan informasi tersebut kepada keluarga sasaran. Sementara itu, Informan 4 selaku keluarga sasaran membenarkan bahwa:

> *"informasi mengenai kegiatan BKR, terutama mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, diperoleh dari kader."*

Keterangan dari Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 tersebut menunjukkan adanya alur komunikasi dari atas ke bawah sekaligus komunikasi dari bawah ke atas. Informasi kebijakan dan kegiatan bergerak dari Tim BKKBN kepada PLKB dan kader, sedangkan informasi mengenai kondisi keluarga, kendala, serta pelaksanaan kegiatan dapat kembali disampaikan oleh kader kepada PLKB dan selanjutnya kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian,

komunikasi dalam pelaksanaan BKR tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme penghubung antaraktor.

Kondisi tersebut sejalan dengan landasan teori penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh hubungan antara berbagai variabel, termasuk komunikasi yang efektif. Implementasi kebijakan tidak hanya bergerak secara linear dari keputusan kepada pelaksana, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh interaksi antarkomponen implementasi tersebut (Muksin et al., 2024; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dari aspek kejelasan informasi, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"sebelum kegiatan dilaksanakan, petugas memberikan arahan kepada kader mengenai kegiatan yang akan dilakukan*."

Informasi tersebut kemudian disederhanakan oleh Informan 3 yang menyampaikan bahwa:

> *"keluarga tidak selalu menerima informasi dalam bentuk bahasa teknis, tetapi diberikan penjelasan yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat."*

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 4, yang menyatakan bahwa:

> *"informasi mengenai kegiatan BKR dapat dipahami karena disampaikan secara langsung oleh kader".*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan, tetapi juga terdapat proses penerjemahan informasi dari bahasa teknis pelaksana menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh keluarga. Hal ini menjadi penting karena keluarga merupakan kelompok sasaran yang tidak selalu memahami istilah atau mekanisme program sebagaimana dipahami oleh pelaksana.

Dalam landasan teori penelitian ditegaskan bahwa komunikasi antar lembaga menjadi penentu implementasi karena standar program harus dipahami secara akurat dan konsisten. Selain itu, koordinasi formal saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sinkronisasi kegiatan di lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023). Oleh karena itu, kemampuan kader menyampaikan kembali informasi kepada keluarga dengan bahasa yang dapat dipahami merupakan bagian penting dari efektivitas komunikasi program.

Dari aspek sosialisasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan BKR disosialisasikan melalui penyuluhan, pembinaan kelompok BKR, serta kegiatan kemasyarakatan. Informan 2 menjelaskan bahwa:

> "*penyuluhan menjadi salah satu cara utama untuk memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pembinaan remaja."*

Informan 3 juga menjelaskan bahwa:

> *"kader membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya BKR dan mengajak keluarga untuk mengikuti kegiatan."*

Sementara itu, Informan 4 memperoleh informasi mengenai BKR melalui kegiatan yang disampaikan oleh kader dan petugas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi BKR menggunakan pendekatan yang tidak hanya formal, tetapi juga berbasis masyarakat. Kader menjadi aktor yang membantu menjembatani komunikasi antara petugas dengan keluarga karena memiliki kedekatan dengan masyarakat. Dengan pola tersebut, informasi program dapat disampaikan secara lebih langsung dan tidak sepenuhnya bergantung pada komunikasi formal antarlembaga.

Hal ini sejalan dengan landasan teori BKR yang menjelaskan bahwa BKR merupakan wadah edukasi dan pertukaran informasi bagi orang tua dan keluarga

untuk memahami dunia remaja, permasalahan yang dihadapi remaja, serta cara berinteraksi yang tepat (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Kosim et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dan penyampaian informasi melalui kader merupakan bagian yang sesuai dengan karakteristik program BKR.

Dari aspek koordinasi, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"koordinasi dilakukan sebelum kegiatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan".*

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"koordinasi dengan kader dilakukan terutama berkaitan dengan waktu, tempat, materi, dan peserta kegiatan"*

selanjutnya Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"kader menerima informasi dari petugas sebelum kegiatan dilaksanakan dan kemudian membantu mempersiapkan keluarga sasaran".*

Dengan demikian, koordinasi berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan memastikan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Berdasarkan temuan tersebut, koordinasi menjadi faktor pendukung karena terdapat proses komunikasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksana tidak hanya memberikan informasi setelah kegiatan berlangsung, tetapi melakukan komunikasi sebelumnya untuk mempersiapkan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara petugas dan kader.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi yang sudah berjalan belum selalu menghasilkan partisipasi keluarga secara konsisten. Informan 4 sebagai keluarga sasaran mengetahui informasi kegiatan melalui kader, tetapi kehadiran keluarga dalam kegiatan dapat dipengaruhi oleh kesibukan dan kondisi

masing-masing. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tersampaikannya informasi dengan terwujudnya partisipasi.

Temuan tersebut menjadi argumentasi penting dalam penelitian ini. Artinya, hambatan pada dimensi komunikasi bukan terutama karena informasi tidak disampaikan, tetapi karena efektivitas komunikasi belum sepenuhnya mampu mengubah informasi menjadi partisipasi keluarga yang berkelanjutan. Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori yang menegaskan bahwa komunikasi formal saja tidak cukup apabila tidak diikuti sinkronisasi dan penerimaan di lapangan.

Selanjutnya, dari aspek monitoring, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai rencana serta untuk mengetahui kendala yang muncul".*

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"monitoring dilakukan terhadap kegiatan kelompok, keaktifan kader, dan keterlibatan keluarga:.*

Sementara Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"kader memperoleh pemantauan atau arahan dari petugas mengenai pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta."*

Hal tersebut menunjukkan bahwa monitoring menjadi bagian dari aktivitas pelaksana setelah komunikasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Monitoring tersebut memperlihatkan adanya komunikasi dua arah karena petugas tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menerima informasi mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan. Apabila terdapat kendala, informasi

tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Dengan demikian, monitoring berfungsi sebagai mekanisme umpan balik dalam implementasi BKR.

Dari aspek pencatatan dan pelaporan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan dan peserta dicatat setelah pelaksanaan. Informan 2 menjelaskan bahwa:

"*hasil kegiatan menjadi bahan laporan".*

Sedangkan Informan 3 membantu pencatatan peserta dan kegiatan sementara itu, kemudian Informan 4 menyatakan bahwa:

"keluarga biasanya mengisi daftar hadir ketika mengikuti kegiatan".

Studi dokumentasi terhadap daftar hadir dan pencatatan kegiatan dapat memperkuat temuan bahwa terdapat administrasi pelaksanaan program.

Dengan demikian, aktivitas pelaksana tidak berhenti pada penyampaian informasi dan pelaksanaan penyuluhan, tetapi dilanjutkan dengan monitoring, pencatatan, dan pelaporan. Rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR telah memiliki siklus kegiatan mulai dari komunikasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan pelaporan.

Berdasarkan **st**udi dokumentasi, pencatatan kegiatan dan daftar hadir dapat digunakan sebagai bukti pendukung bahwa aktivitas BKR dilaksanakan dan terdapat upaya untuk mendokumentasikan keterlibatan peserta. Daftar hadir keluarga menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan dicatat oleh pelaksana, sedangkan pencatatan kegiatan menjadi bagian dari proses pelaporan.

Sementara itu, berdasarkan observasi peneliti, apabila sesuai dengan kondisi lapangan, dapat dijelaskan bahwa komunikasi antara pelaksana dan kader

terlihat dalam proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Kader berperan dalam menghubungi keluarga dan menyampaikan informasi mengenai kegiatan, sedangkan petugas memberikan arahan dan materi pembinaan. Dalam kegiatan tersebut terlihat adanya proses penyampaian materi kepada keluarga sasaran.

Hasil observasi tersebut memperkuat hasil wawancara Informan 2 dan Informan 3 bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi berlangsung secara langsung dalam kegiatan pembinaan. Dengan demikian, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dapat dilihat secara nyata melalui interaksi antara petugas, kader, dan keluarga.

Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa komunikasi dan aktivitas pelaksana BKR di Kecamatan Kawali memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu komunikasi berjenjang, sosialisasi melalui penyuluhan dan kader, koordinasi sebelum kegiatan, monitoring pelaksanaan, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Informan 1 menunjukkan adanya komunikasi dari tingkat Tim BKKBN kepada pelaksana lapangan. Informan 2 menunjukkan fungsi PLKB sebagai penerus informasi sekaligus koordinator kegiatan. Informan 3 menunjukkan fungsi kader sebagai penghubung informasi kepada keluarga. Informan 4 menunjukkan bahwa keluarga memperoleh informasi kegiatan terutama melalui kader.

Dengan demikian, hasil reduksi menunjukkan bahwa alur komunikasi sudah tersedia dan berjalan dari pelaksana sampai kelompok sasaran. Hambatan yang ditemukan bukan terutama pada penyampaian informasi, tetapi pada

kemampuan komunikasi tersebut untuk menghasilkan kehadiran dan partisipasi keluarga secara konsisten.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Landasan teori penelitian menyebutkan bahwa komunikasi diperlukan agar standar program dapat dipahami oleh pelaksana secara akurat dan konsisten, sedangkan koordinasi formal harus diikuti dengan sinkronisasi pelaksanaan di lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antarorganisasi menjadi faktor pendukung utama implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Hal tersebut terlihat dari adanya alur informasi dari Informan 1 kepada Informan 2, kemudian kepada Informan 3, dan selanjutnya sampai kepada Informan 4. Informasi mengenai kegiatan, waktu, tempat, materi, dan peserta dapat diteruskan melalui jaringan pelaksana tersebut. Dengan demikian, komunikasi tidak berhenti pada tingkat organisasi pelaksana, tetapi mencapai keluarga sebagai sasaran program.

Keterangan Informan 4 menjadi penguat terhadap pernyataan Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 karena keluarga mengonfirmasi bahwa informasi kegiatan memang diterima melalui kader. Dengan adanya konfirmasi dari kelompok sasaran, dapat dikatakan bahwa transmisi informasi telah berjalan sampai pada tingkat penerima kebijakan.

Komunikasi melalui kader juga menjadi kekuatan dalam pelaksanaan BKR. Kader memiliki posisi yang dekat dengan keluarga sehingga dapat menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Hal ini

sejalan dengan karakter BKR sebagai wadah edukasi dan pertukaran informasi bagi orang tua dan keluarga mengenai dunia remaja serta cara berinteraksi dengan remaja (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Kosim et al., 2024).

Selain komunikasi, aktivitas pelaksana juga menunjukkan adanya tahapan kegiatan yang relatif teratur, mulai dari koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan pembinaan, monitoring, sampai pencatatan dan pelaporan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi digunakan sebagai bagian dari proses implementasi, bukan hanya sebagai penyampaian informasi awal.

Hal tersebut penting karena landasan teori penelitian menyatakan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung implementasi program keluarga dan remaja (Latifah, 2025).

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya keterbatasan pada efektivitas komunikasi dalam menghasilkan partisipasi keluarga. Keluarga dapat menerima informasi mengenai kegiatan, tetapi penerimaan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kehadiran secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya dapat diukur dari apakah informasi sudah disampaikan, tetapi juga dari apakah informasi tersebut dipahami dan mampu mendorong tindakan kelompok sasaran.

Dengan demikian, permasalahan komunikasi dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali lebih bersifat pada efektivitas hasil komunikasi daripada pada

saluran komunikasinya. Saluran komunikasi sudah tersedia melalui Tim BKKBN, PLKB, kader, dan kegiatan penyuluhan, tetapi masih diperlukan strategi agar komunikasi dapat meningkatkan keterlibatan keluarga secara konsisten.

Temuan ini juga relevan dengan landasan teori yang mencatat bahwa hambatan implementasi BKR yang sering muncul adalah rendahnya komitmen antarsektor dan lemahnya partisipasi kader (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Dalam konteks Kecamatan Kawali, kondisi tersebut belum menunjukkan terputusnya komunikasi, tetapi menjadi catatan bahwa keberlanjutan komunikasi perlu diikuti dengan penguatan partisipasi.

Dari sisi monitoring dan pelaporan, kegiatan pencatatan dan pemantauan menunjukkan bahwa terdapat mekanisme umpan balik dalam pelaksanaan BKR. Hal ini memperkuat bahwa komunikasi berlangsung secara dua arah, karena pelaksana memperoleh informasi dari kegiatan di lapangan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan instruksi, tetapi juga untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pembahasan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan faktor pendukung utama dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Faktor pendukung terlihat dari adanya komunikasi berjenjang antara Tim BKKBN, PLKB, kader, dan keluarga; adanya sosialisasi melalui penyuluhan dan

kegiatan BKR; koordinasi sebelum kegiatan; monitoring; serta pencatatan dan pelaporan. Keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 saling memperkuat bahwa informasi mengenai kegiatan dapat diteruskan sampai kepada keluarga sasaran.

Sementara itu, faktor penghambatnya terletak pada belum optimalnya kemampuan komunikasi dalam mendorong partisipasi keluarga secara berkelanjutan. Dengan kata lain, persoalan utama bukan karena informasi tidak tersedia atau tidak disampaikan, tetapi karena penerimaan informasi belum selalu berujung pada kehadiran dan keterlibatan keluarga secara konsisten.

Hal tersebut sesuai dengan landasan teori bahwa komunikasi antar lembaga menjadi penentu implementasi karena standar program harus dipahami secara akurat dan konsisten, tetapi koordinasi formal saja belum cukup apabila tidak diikuti sinkronisasi pelaksanaan di lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dengan demikian, argumentasi utama pada dimensi ini adalah bahwa komunikasi Program BKR di Kecamatan Kawali secara struktural sudah berjalan dengan baik karena terdapat alur komunikasi dari Tim BKKBN hingga keluarga sasaran dan didukung oleh aktivitas koordinasi, sosialisasi, monitoring, serta pelaporan. Namun, efektivitas komunikasi masih perlu diperkuat karena tersampaikannya informasi belum sepenuhnya menjamin partisipasi keluarga secara rutin dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari kelancaran penyampaian pesan, tetapi juga dari kemampuan komunikasi tersebut menghasilkan tindakan nyata dari kelompok sasaran.

5. Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal tersebut terlihat dari pemahaman pelaksana terhadap tujuan program, sikap dalam melaksanakan tugas, komitmen untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan, serta kemampuan merespons kondisi yang dihadapi di lapangan. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merupakan salah satu dari enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, bersama dengan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Pada indikator pemahaman pelaksana terhadap program, Informan 1 selaku Tim BKKBN menjelaskan bahwa:

> *"BKR bukan sekadar kegiatan pertemuan, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi remaja."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Informan 1 memahami substansi BKR sebagai program pembinaan keluarga, bukan hanya sebagai kegiatan administratif. Sementara itu, Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"tugas utama pelaksana adalah memberikan pembinaan dan memastikan keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan.*"

Kemudian Informan 3 memahami bahwa dirinya berperan sebagai penghubung antara petugas dan keluarga serta membantu pelaksanaan kegiatan. Adapun

Informan 4 selaku keluarga sasaran memahami BKR sebagai kegiatan yang membantu orang tua memahami dan mendampingi anak remaja.

Keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Indorman 4 tersebut menunjukkan adanya kesamaan pemahaman mengenai keberadaan dan manfaat Program BKR, meskipun setiap informan melihat program dari posisi yang berbeda. Informan 1 melihat BKR dari perspektif kebijakan dan pembinaan, Informan 2 dari perspektif pelaksanaan teknis, Informan 3 dari perspektif kader sebagai penghubung masyarakat, sedangkan Informan 4 melihat manfaatnya bagi keluarga. Dengan demikian, pemahaman yang relatif sama tersebut menjadi faktor pendukung dalam implementasi karena para pelaksana memiliki gambaran mengenai tujuan yang hendak dicapai.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus dapat dipahami oleh pelaksana secara tepat, karena pemahaman terhadap kebijakan menjadi bagian penting dalam menentukan proses implementasi. Dalam konteks BKR, tujuan pembinaan keluarga, target partisipasi, dan indikator capaian perlu diterjemahkan secara operasional agar dapat dilaksanakan di lapangan (Efiyanti et al., 2022; Muksin et al., 2024; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Pada indikator sikap pelaksana, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap terbuka dan berupaya menyesuaikan pendekatan dengan kondisi keluarga. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksana diharapkan memiliki sikap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena permasalahan keluarga dan remaja berbeda-beda.*

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa

> *"dalam menjalankan tugas, petugas berusaha memberikan pelayanan dan pembinaan dengan pendekatan yang tidak menghakimi agar keluarga bersedia menyampaikan permasalahannya.*"

Sementara itu, Informan 3 menyatakan bahwa

> *"kader berusaha membantu keluarga semampunya dan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dijawab, maka permasalahan tersebut dikoordinasikan kepada PLKB".*

Selanjutnya Informan 4 juga menyatakan bahwa:

> *"kader cukup terbuka ketika keluarga bertanya dan bersedia membantu memberikan informasi."*

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya ditunjukkan melalui kesediaan menjalankan tugas, tetapi juga melalui cara pelaksana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan yang tidak menghakimi dan sikap terbuka menunjukkan bahwa pelaksana berupaya membangun suasana yang membuat keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan mengenai anak remaja. Hal tersebut penting dalam pelaksanaan BKR karena persoalan keluarga dan remaja bersifat beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang responsif terhadap kondisi masing-masing keluarga.

Sikap positif tersebut juga terlihat dari tindakan kader ketika menghadapi keterbatasan pengetahuan. Informan 3 tidak memaksakan diri memberikan jawaban terhadap permasalahan yang tidak dikuasai, tetapi mengoordinasikannya kepada PLKB. Hal ini menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab dan kesadaran

terhadap batas kemampuan, sehingga persoalan keluarga dapat diteruskan kepada pelaksana yang memiliki kapasitas lebih sesuai.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menempatkan implementasi BKR dalam konteks yang kolaboratif, kontekstual, dan adaptif, serta membutuhkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan penguatan kapasitas organisasi pelaksana. Dalam konteks pembangunan keluarga di tingkat lokal, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh komunikasi efektif, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, umpan balik masyarakat, partisipasi warga, serta monitoring dan evaluasi (Amini et al., 2024; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Pada indikator komitmen pelaksana, hasil wawancara menunjukkan bahwa Informan 1 menyatakan:

> *"komitmen Tim BKKBN ditunjukkan melalui keberlanjutan pembinaan dan koordinasi dengan petugas di lapangan."*

Selanjutnya Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"pihaknya tetap berusaha menjalankan kegiatan BKR meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga".*

Sementara Informan 3 menyatakan bahwa:

> *"tetap berusaha menjalankan kegiatan karena menganggap kegiatan tersebut penting bagi keluarga yang mempunyai anak remaja".* Dari sisi sasaran,

Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"bersedia mengikuti kegiatan selama waktunya memungkinkan karena informasi yang diberikan dianggap bermanfaat."*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa komitmen pelaksana merupakan faktor pendukung yang kuat dalam implementasi BKR. Komitmen Informan 1 terlihat dari keberlanjutan pembinaan dan koordinasi, Informan 2 dari kemauan tetap melaksanakan kegiatan meskipun menghadapi keterbatasan, sedangkan Informan 3 dari kesediaan untuk terus membantu keluarga. Dengan demikian, komitmen tidak hanya berupa pernyataan, tetapi diwujudkan dalam upaya mempertahankan pelaksanaan kegiatan.

Temuan ini menjadi penting jika dikaitkan dengan landasan teori penelitian karena literatur yang digunakan menyebutkan bahwa hambatan yang konsisten dalam pelaksanaan program BKR antara lain kekurangan sumber daya manusia, rendahnya komitmen antarsektor, dan lemahnya partisipasi kader (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan temuan di Kecamatan Kawali, kondisi tersebut menunjukkan keadaan yang relatif berbeda. Dalam penelitian ini tidak ditemukan indikasi rendahnya komitmen dari pelaksana utama. Sebaliknya, Informan 1, Informan 2, dan Iinforman 3 menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kegiatan BKR meskipun terdapat keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga. Dengan demikian, disposisi pelaksana justru menjadi salah satu kekuatan implementasi BKR di Kecamatan Kawali.

Berdasarkan studi dokumentasi, komitmen pelaksana dapat diperkuat melalui adanya dokumen kegiatan, daftar hadir, pencatatan pelaksanaan, serta dokumentasi pembinaan BKR. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan tidak hanya direncanakan, tetapi terdapat aktivitas yang dilaksanakan dan dicatat oleh pelaksana.

Dokumentasi tersebut menjadi pendukung terhadap hasil wawancara Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 karena menunjukkan adanya aktivitas pelaksana dalam menjalankan program. Dengan demikian, disposisi positif tidak hanya diketahui dari pernyataan informan, tetapi juga dapat dilihat melalui keberadaan aktivitas administratif dan kegiatan pembinaan.

Berdasarkan observasi peneliti, apabila disesuaikan dengan kondisi lapangan, petugas dan kader terlihat berupaya memberikan pembinaan kepada keluarga serta memberikan respons terhadap pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan keluarga. Kader juga berfungsi sebagai pihak yang membantu menghubungkan keluarga dengan PLKB ketika terdapat permasalahan yang berada di luar kemampuan kader.

Hasil observasi tersebut memperkuat keterangan Informan 2 dan Informan 3 mengenai sikap terbuka, responsif, dan kesediaan membantu keluarga. Dengan demikian, disposisi positif pelaksana dapat dilihat melalui sikap pelayanan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan BKR.

Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali memiliki empat unsur utama, yaitu pemahaman terhadap program, sikap positif dan responsif, komitmen, serta kesediaan menjalankan tanggung jawab.

Informan 1 menunjukkan pemahaman terhadap substansi BKR dan komitmen Tim BKKBN melalui keberlanjutan pembinaan serta koordinasi. Informan 2 menunjukkan pemahaman terhadap tugas, sikap pelayanan yang tidak menghakimi, serta kesediaan menjalankan kegiatan meskipun terdapat kendala. Informan 3 menunjukkan pemahaman terhadap peran kader, sikap membantu keluarga, serta kesediaan meneruskan permasalahan kepada PLKB apabila tidak dapat ditangani. Informan 4 menunjukkan penerimaan terhadap sikap pelaksana dan manfaat kegiatan BKR.

Hasil reduksi tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana lebih dominan sebagai faktor pendukung. Hambatan yang muncul tidak berasal dari penolakan atau ketidakmauan pelaksana, tetapi lebih berkaitan dengan keterbatasan waktu serta partisipasi keluarga sasaran.

Dalam model Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel utama yang berinteraksi dengan lima variabel lainnya dalam menentukan keberhasilan implementasi. Model tersebut menegaskan bahwa hasil implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi oleh hubungan antarseluruh variabel implementasi (Muksin et al., 2024; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana Program BKR di Kecamatan Kawali dapat dikategorikan positif. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan kecenderungan antara Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 dalam memahami pentingnya program serta kesediaan untuk menjalankannya. Pelaksana tidak

memperlihatkan sikap menolak atau mengabaikan program, tetapi justru berupaya mempertahankan kegiatan meskipun terdapat kendala.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh jawaban Informan 1 dengan cara komitmen ditunjukkan melalui keberlanjutan pembinaan dan koordinasi, Informan 2 yang tetap berusaha menjalankan kegiatan meskipun terdapat keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga, serta Informan 3 yang tetap menjalankan kegiatan karena menganggap BKR penting bagi keluarga yang mempunyai anak remaja.

Dengan demikian, disposisi pelaksana menjadi modal internal yang mendukung implementasi BKR. Ketika sumber daya atau partisipasi masyarakat mengalami keterbatasan, adanya kemauan dan komitmen pelaksana memungkinkan kegiatan tetap dijalankan. Hal ini sejalan dengan landasan teori yang menyebutkan bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu faktor inti keberhasilan program BKKBN, bersama dengan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Selain komitmen, sikap responsif pelaksana juga menjadi faktor pendukung. Informan 2 menuunjukan bahwa pembinaan dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi, sedangkan Informan 3 berusaha membantu keluarga dan mengoordinasikan persoalan kepada PLKB apabila tidak dapat memberikan jawaban. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pelaksana berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menempatkan implementasi program keluarga pada tingkat lokal sebagai proses yang harus responsif terhadap kebutuhan lokal dan dibangun melalui kolaborasi

antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024).

Namun, perlu dibedakan antara disposisi pelaksana dengan respons kelompok sasaran. Hasil wawancara Informan 4 menunjukkan bahwa keluarga sebenarnya bersedia mengikuti kegiatan karena informasi yang diberikan bermanfaat, tetapi kehadiran bergantung pada waktu yang memungkinkan. Oleh karena itu, ketika keluarga tidak selalu hadir, kondisi tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai rendahnya komitmen pelaksana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksana tetap berusaha menjalankan kegiatan meskipun partisipasi keluarga belum selalu optimal. Dengan demikian, hambatan pada dimensi disposisi lebih tepat dipahami sebagai hambatan eksternal yang membatasi hasil dari komitmen pelaksana, bukan sebagai rendahnya disposisi pelaksana itu sendiri.

Hal ini juga relevan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa hambatan BKR dapat berasal dari lemahnya partisipasi kader dan rendahnya komitmen antarsektor (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Dalam konteks penelitian Kecamatan Kawali, berdasarkan wawancara yang tersedia, kondisi tersebut belum terlihat dominan pada pelaksana, karena Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 justru menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan program.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung yang relatif kuat dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali. Pemahaman, sikap responsif, komitmen, dan kesediaan menjalankan tugas menjadi

modal bagi pelaksana untuk mempertahankan program. Sementara itu, kendala partisipasi keluarga lebih tepat ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan ekonomi sasaran, yang akan dianalisis lebih lanjut pada dimensi keenam.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta analisis berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Faktor pendukung tersebut terlihat dari pemahaman Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 terhadap tujuan dan peran masing-masing, sikap yang terbuka dan responsif, komitmen untuk mempertahankan kegiatan, serta kesediaan menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga.

Sementara itu, hambatan pada dimensi ini tidak menunjukkan adanya penolakan atau rendahnya komitmen pelaksana, tetapi lebih berkaitan dengan keterbatasan partisipasi keluarga sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi positif pelaksana belum selalu menghasilkan tingkat partisipasi keluarga yang optimal karena terdapat faktor lain di luar kendali langsung pelaksana.

Dengan demikian, argumentasi utama dimensi disposisi pelaksana adalah bahwa keberhasilan implementasi BKR di Kecamatan Kawali didukung oleh sikap positif, pemahaman, komitmen, dan responsivitas pelaksana. Temuan ini memperkuat perspektif Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada standar kebijakan dan sumber daya, tetapi juga pada

kecenderungan pelaksana dalam menerima dan menjalankan kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, disposisi pelaksana dapat dikatakan lebih dominan sebagai kekuatan internal program, sedangkan hambatan utama justru perlu dianalisis pada faktor partisipasi keluarga serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan dimensi yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu variabel yang memengaruhi kinerja implementasi karena kebijakan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda-beda. Dalam landasan teori penelitian, model Van Meter dan Van Horn menempatkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai salah satu dari enam variabel utama implementasi, bersama standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi pelaksana (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dari aspek lingkungan sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa Program BKR memperoleh penerimaan yang relatif baik dari masyarakat. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"*masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan BKR sebagai program pembinaan keluarga yang mempunyai anak remaja".*

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa:

> *"BKR merupakan program pemerintah yang dilaksanakan melalui petugas dan kader*".

Dengan demikian, keberadaan BKR telah dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai program yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dan remaja. Keterangan Informan 4 tersebut menunjukkan bahwa secara sosial tidak terdapat penolakan terhadap keberadaan program.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap program belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi yang konsisten. Informan 1 menyampaikan bahwa:

> *"sebagian keluarga masih memiliki keterbatasan dalam mengikuti kegiatan",*

sedangkan Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang aktif mengikuti kegiatan dan ada pula yang hanya hadir sesekali*".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BKR. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan BKR tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya kegiatan, tetapi juga oleh keterlibatan keluarga sebagai sasaran program.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi BKR dapat berbeda antarwilayah dan dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua, kehadiran peserta, serta konsistensi pembinaan. Studi Dewi et al. (2022), sebagaimana tercantum dalam landasan teori, menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR didukung oleh kehadiran peserta dan tindak lanjut monitoring-evaluasi. Dengan demikian, partisipasi keluarga merupakan bagian penting dalam keberhasilan implementasi program.

Selain partisipasi, kondisi sosial keluarga juga terlihat dari perbedaan karakteristik keluarga dan remaja. Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang mudah diajak berkomunikasi, tetapi ada pula yang kurang terbuka".*

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"setiap keluarga mempunyai kondisi yang berbeda, termasuk perbedaan tingkat keaktifan orang tua dalam bertanya mengenai anaknya*".

Sementara itu, Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"karakter remaja juga berbeda-beda; terdapat remaja yang mudah diajak berbicara dan terdapat pula remaja yang lebih tertutup sehingga orang tua membutuhkan pendekatan yang berbeda".*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial keluarga tidak bersifat homogen. Perbedaan keterbukaan orang tua, karakter remaja, dan kemampuan komunikasi dalam keluarga dapat memengaruhi proses pembinaan BKR. Oleh sebab itu, pelaksana tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama terhadap seluruh keluarga, tetapi perlu menyesuaikan pembinaan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan landasan teori penelitian yang menempatkan implementasi BKR sebagai proses yang perlu disesuaikan dengan konteks lokal keluarga dan remaja sasaran. Landasan teori juga menegaskan bahwa keberhasilan program BKR sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan lokal, kapasitas kader, peran PLKB, dukungan pemerintah desa, serta koordinasi antaraktor lokal.

Dari aspek ekonomi keluarga, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi lebih banyak terlihat melalui ketersediaan waktu keluarga,

bukan karena adanya beban biaya untuk mengikuti BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keluarga yang mempunyai aktivitas pekerjaan cukup padat mengalami keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan*".

Informan 2 juga menyatakan bahwa:

> *"sebagian keluarga harus bekerja sehingga waktu untuk mengikuti kegiatan menjadi terbatas*".

Sementara itu, Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang tidak dapat hadir karena jadwal pekerjaan bersamaan dengan kegiatan BKR*".

Kemudian informan 4 juga menguatkan bahwa:

> *"hal tersebut dengan menyatakan bahwa ketika sedang bekerja, keluarga sulit meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti kegiatan"*

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor ekonomi tidak secara langsung menghambat karena biaya keikut sertaan, tetapi secara tidak langsung memengaruhi partisipasi melalui aktivitas pekerjaan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Informan 4 yang menjelaskan bahwa:

> *"keluarga tidak terlalu mempermasalahkan biaya karena kegiatan BKR pada umumnya tidak membebankan biaya kepada peserta".*

Dengan demikian, persoalan ekonomi dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali lebih tepat dipahami sebagai persoalan opportunity cost atau kesempatan waktu. Ketika keluarga harus memilih antara bekerja dan menghadiri kegiatan BKR, pekerjaan menjadi prioritas karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga yang sebenarnya menerima dan membutuhkan program belum tentu dapat hadir secara rutin.

Dari aspek politik dan kelembagaan, hasil wawancara menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa diperlukan agar BKR dapat berjalan di masyarakat, khususnya dalam hal koordinasi, penyediaan fasilitas, dan keberlanjutan kegiatan*".

Informan 2 juga menyatakan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa penting karena kegiatan BKR banyak dilaksanakan pada tingkat masyarakat*".

Sementara Informan 3 menyatakan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa memudahkan kader dalam melaksanakan kegiatan dan mengajak masyarakat*".

Kemudian Informan 4 juga mengetahui bahwa:

> *"BKR merupakan program pemerintah yang dilaksanakan melalui petugas dan kader".*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan pemerintah menjadi faktor pendukung dalam lingkungan politik implementasi BKR. Pemerintah desa tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi pihak yang dapat membantu menyediakan ruang, mempermudah koordinasi, dan mendukung mobilisasi masyarakat.

Hal tersebut sangat sesuai dengan landasan teori penelitian. Literatur yang digunakan menyatakan bahwa implementasi BKR di tingkat lokal bergantung pada peran PLKB, kapasitas kader, dukungan pemerintah desa, dan koordinasi antaraktor lokal. PLKB juga disebut sebagai ujung tombak pelaksanaan program BKKBN di tingkat desa karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan (Latifah, 2025).

Lebih lanjut, landasan teori menjelaskan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga setelah desentralisasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan lokal serta dibangun melalui kolaborasi antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024). Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, partisipasi warga, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Berdasarkan studi dokumentasi melalui Kecamatan Kawali Dalam Angka 2024, Kecamatan Kawali memiliki struktur penduduk yang beragam dan terdapat kelompok usia remaja yang menjadi kelompok relevan bagi pelaksanaan Program BKR. Kondisi demografis tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap pembinaan keluarga yang mempunyai anak remaja memang memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat Kecamatan Kawali.

Selain itu, dokumentasi mengenai pemerintahan wilayah menunjukkan adanya perangkat kelembagaan kecamatan dan desa yang dapat menjadi bagian dari lingkungan kelembagaan pelaksanaan program. Kondisi tersebut memperkuat hasil wawancara Informan 1, 2, dan 3 mengenai pentingnya dukungan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan BKR.

Studi dokumentasi tersebut sejalan dengan landasan teori yang menegaskan bahwa keberhasilan BKR di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan lokal, peran pemerintah desa, kapasitas pelaksana, dan koordinasi antaraktor.

Berdasarkan observasi peneliti, lingkungan sosial tempat pelaksanaan BKR memungkinkan adanya interaksi langsung antara kader dengan keluarga sasaran. Kedekatan kader dengan masyarakat mempermudah penyampaian informasi mengenai kegiatan dan pembinaan keluarga. Kondisi tersebut mendukung hasil wawancara Informan 3 yang menunjukkan bahwa kader berperan dalam mengajak masyarakat mengikuti kegiatan.

Namun, observasi juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di luar kegiatan BKR menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan. Kesibukan pekerjaan dan kegiatan keluarga menyebabkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tidak sama pada setiap keluarga. Dengan demikian, hasil observasi memperkuat keterangan Informan 1, 2, 3, dan 4 bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil reduksi data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali terdiri atas beberapa kondisi utama, yaitu penerimaan masyarakat terhadap program, tingkat partisipasi keluarga, karakteristik keluarga dan remaja, kondisi pekerjaan keluarga, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pada aspek sosial, Informan 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan BKR, tetapi tingkat partisipasinya belum konsisten. Perbedaan karakter keluarga dan remaja juga memengaruhi proses pembinaan.

Pada aspek ekonomi, Informan 1, 2, 3, dan 4 secara konsisten menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi salah satu faktor yang membatasi waktu keluarga untuk mengikuti kegiatan. Hambatan tersebut bukan terutama karena biaya, tetapi karena kegiatan BKR dapat bertepatan dengan waktu bekerja.

Pada aspek politik dan kelembagaan, Informan 1, 2, dan 3 menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa, khususnya dalam koordinasi, fasilitas, pelaksanaan kegiatan, dan mobilisasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil reduksi menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mengandung faktor pendukung sekaligus faktor penghambat.

Jika dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan kebijakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Model Van Meter dan Van Horn menempatkan keenam variabel implementasi sebagai faktor yang saling berhubungan sehingga kondisi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari sumber daya, komunikasi, disposisi, maupun karakteristik badan pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan sosial di Kecamatan Kawali secara umum menjadi faktor pendukung, karena masyarakat tidak menunjukkan penolakan terhadap Program BKR. Informan 4 mengetahui BKR sebagai program pemerintah, sedangkan Informan 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa masyarakat dapat diajak berinteraksi melalui kader dan kegiatan pembinaan.

Akan tetapi, faktor sosial sekaligus menjadi hambatan ketika dikaitkan dengan konsistensi partisipasi. Keluarga yang telah menerima manfaat BKR belum tentu dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Dengan demikian, penelitian ini

menemukan adanya perbedaan antara penerimaan terhadap program dan partisipasi dalam program. Keluarga dapat menerima dan menganggap BKR bermanfaat, tetapi tetap tidak hadir apabila terdapat pekerjaan atau kegiatan lain.

Temuan tersebut memperkuat landasan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan BKR tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada keterlibatan orang tua secara aktif. Dewi et al. (2022) dan Kosim et al. (2024) menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, kesiapan kader, serta kualitas materi dalam mendukung efektivitas BKR.

Pada aspek ekonomi, penelitian ini menghasilkan temuan yang cukup penting, yaitu kondisi ekonomi keluarga lebih berpengaruh terhadap waktu daripada biaya. Informan 1, 2, 3, dan 4 memberikan keterangan yang konsisten bahwa pekerjaan menjadi alasan sebagian keluarga tidak dapat hadir.

Artinya, rendahnya kehadiran sebagian keluarga tidak dapat langsung diartikan sebagai kurangnya kepedulian terhadap BKR. Sebagaimana dijelaskan Informan 3:

> *"ada keluarga yang tidak hadir bukan karena tidak mau mengikuti BKR, tetapi karena waktu kegiatan bertepatan dengan pekerjaan*".

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa hambatan implementasi berasal dari kondisi struktural kehidupan keluarga, khususnya keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi.

Sementara itu, dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa menjadi faktor pendukung yang cukup penting. Informan 1 menyebutkan bahwa:

> *"dukungan pemerintah daerah dan desa diperlukan dalam koordinasi, fasilitas, dan keberlanjutan kegiatan*".

Informan 2 juga menegaskan bahwa:

> *"kegiatan banyak dilakukan di tingkat masyarakat sehingga dukungan desa diperlukan*",

sedangkan Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan desa mempermudah kader dalam melaksanakan kegiatan dan mengajak masyarakat".*

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang secara khusus menyebutkan bahwa implementasi BKR di Kecamatan Kawali perlu dipahami sebagai proses yang bergantung pada dukungan pemerintah desa dan koordinasi antaraktor lokal.

Dari perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh BKKBN. Program membutuhkan tata kelola kolaboratif antara BKKBN, pemerintah daerah, pemerintah desa, PLKB, kader, dan masyarakat. Landasan teori penelitian juga menegaskan bahwa program keluarga di tingkat lokal membutuhkan kolaborasi erat antara BKKBN, pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat serta harus responsif terhadap kebutuhan lokal (Amini et al., 2024).

Dengan demikian, dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan dua sisi yang saling berlawana**n**. Di satu sisi, penerimaan masyarakat dan dukungan pemerintah desa menjadi modal yang memperkuat implementasi. Di sisi lain, heterogenitas keluarga, kesibukan pekerjaan, dan keterbatasan waktu menjadi hambatan yang menyebabkan partisipasi belum konsisten.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada penolakan masyarakat terhadap program, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk menyediakan waktu dan terlibat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi implementasi BKR perlu mempertimbangkan kondisi kehidupan keluarga sasaran, termasuk waktu kerja dan karakteristik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor yang sekaligus mendukung dan menghambat implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Faktor pendukung terlihat dari adanya penerimaan masyarakat terhadap Program BKR, manfaat program yang dirasakan oleh keluarga, kedekatan kader dengan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam koordinasi, fasilitas, pelaksanaan kegiatan, dan keberlanjutan program. Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah desa, koordinasi antaraktor lokal, keterlibatan orang tua, dan dukungan lingkungan lokal dalam keberhasilan BKR.

Sementara itu, faktor penghambat terutama berasal dari partisipasi keluarga yang belum konsisten, perbedaan karakteristik keluarga dan remaja, serta kondisi pekerjaan yang membatasi waktu keluarga untuk mengikuti kegiatan. Informan 1, 2, 3, dan 4 secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian keluarga tidak dapat hadir bukan karena menolak BKR, tetapi karena kegiatan bertepatan dengan pekerjaan.

Dengan demikian, argumentasi utama pada dimensi ini adalah bahwa lingkungan sosial dan politik di Kecamatan Kawali relatif mendukung implementasi BKR, sedangkan lingkungan ekonomi keluarga menjadi salah satu hambatan utama karena memengaruhi ketersediaan waktu untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, permasalahan implementasi BKR bukan terutama terletak pada penerimaan masyarakat terhadap program, melainkan pada bagaimana pelaksana menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga sasaran.

Temuan tersebut sekaligus memperkuat pandangan dalam landasan teori bahwa keberhasilan implementasi BKR sangat ditentukan oleh konsistensi pembinaan, kecukupan sumber daya, kualitas kader, komunikasi lintas sektor, dan dukungan lingkungan lokal.

Kesimpulan akhirnya dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik lebih tepat dikategorikan sebagai faktor pendukung sekaligus faktor penghambat, dengan dukungan sosial dan politik/kelembagaan sebagai kekuatan, sedangkan keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi keluarga dan partisipasi yang belum konsisten sebagai hambatan utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dasarnya telah dilaksanakan dan memperoleh dukungan dari berbagai unsur pelaksana maupun lingkungan masyarakat. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kondisi yang menjadi faktor pendukung sekaligus faktor

penghambat. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui enam dimensi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi BKR tidak ditentukan oleh satu aspek saja, tetapi merupakan hasil keterkaitan antara kejelasan program, kapasitas pelaksana, proses komunikasi, komitmen pelaksana, dan kondisi masyarakat sebagai sasaran program.

Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dan sasaran menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Berdasarkan keterangan Informan 1 , tujuan utama BKR adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Informan 2 melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan kepada kader maupun keluarga sasaran. Selanjutnya, Informan 3 memahami bahwa BKR merupakan kegiatan yang membantu kader menyampaikan informasi kepada keluarga, sedangkan Informan 4 memahami bahwa kegiatan tersebut memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai cara menghadapi dan mendampingi anak remaja. Adanya pemahaman yang relatif searah antara pelaksana dan keluarga menunjukkan bahwa tujuan program telah dapat diterima dan diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, pada dimensi standar dan sasaran masih terdapat hambatan berupa belum optimalnya pencapaian sasaran program. Keluarga sasaran

pada dasarnya telah mengetahui manfaat BKR, tetapi belum seluruhnya dapat mengikuti kegiatan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keberadaan sasaran secara administratif dengan keterjangkauan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, standar dan sasaran kebijakan dapat dikatakan menjadi faktor pendukung dari sisi kejelasan tujuan, tetapi masih menjadi faktor penghambat apabila dilihat dari konsistensi keterlibatan seluruh keluarga sasaran.

Pada dimensi sumber daya, implementasi BKR didukung oleh tersedianya petugas, PLKB, kader, materi pembinaan, fasilitas dasar, serta dukungan yang memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan. Informan 1 mmenunjukan bahwa tenaga pelaksana tersedia, sementara Informan 2 menunjukkan bahwa PLKB memiliki peran dalam pembinaan kader, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan. Informan 3 juga berperan dalam membantu petugas menjangkau keluarga sasaran. Ketersediaan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR tidak hanya bergantung pada Tim BKKBN, tetapi didukung oleh pelaksana hingga tingkat masyarakat. Keberadaan kader menjadi penting karena kader memiliki kedekatan dengan keluarga sehingga dapat membantu menyampaikan informasi dan menjangkau sasaran yang lebih luas.

Namun, ketersediaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya optimal. Informan 1 dan 2 menunjukkan bahwa petugas memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas dan harus membagi perhatian dengan kegiatan atau program lainnya. Selain itu, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"tidak semua kader dapat mengikuti kegiatan secara konsisten karena memiliki kesibukan masing-masing*, *kemampuan kader juga tidak*

> *sepenuhnya sama sehingga masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan*".

Dengan demikian, hambatan sumber daya di Kecamatan Kawali bukan terutama disebabkan oleh tidak adanya pelaksana, melainkan oleh keterbatasan kapasitas, waktu, dan beban kerja dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan program. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor pendukung dari sisi ketersediaannya, tetapi sekaligus menjadi faktor penghambat dari sisi optimalisasi.

Pada dimensi karakteristik badan pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR melibatkan beberapa pihak, yaitu Tim BKKBN, PLKB, pemerintah desa, kader, dan keluarga sasaran. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan program. Informan 1 berperan dalam memastikan program berjalan serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Informan 2 bertanggung jawab terhadap pembinaan kader, koordinasi kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sementara itu, I3 membantu pelaksanaan kegiatan dan menjadi penghubung antara petugas dengan keluarga. Pembagian peran tersebut menjadi faktor pendukung karena menunjukkan adanya struktur pelaksanaan yang memungkinkan tugas tidak dibebankan hanya kepada satu pihak.

Keberadaan kader juga menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan BKR karena kader berada lebih dekat dengan masyarakat. Kader dapat membantu menyampaikan informasi, mengajak keluarga mengikuti kegiatan, serta menyampaikan permasalahan keluarga kepada PLKB apabila permasalahan tersebut berada di luar kemampuan kader. Akan tetapi, keterlibatan beberapa aktor juga menyebabkan implementasi membutuhkan koordinasi yang konsisten. Apabila keaktifan kader berkurang atau koordinasi antarpelaksana tidak berjalan dengan

baik, maka jangkauan program kepada keluarga sasaran dapat berkurang. Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana lebih dominan sebagai faktor pendukung, tetapi masih memiliki hambatan berupa keterbatasan kapasitas dan ketergantungan terhadap keaktifan masing-masing pelaksana.

Pada dimensi komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung utama. Komunikasi dalam pelaksanaan BKR berlangsung secara berjenjang, yaitu informasi dari Tim BKKBN diteruskan kepada PLKB dan kader, kemudian disampaikan kepada keluarga sasaran. Informan 3 selaku kader memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi tujuan kegiatan, waktu, tempat, materi pembinaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan BKR. Komunikasi juga dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan kelompok, dan kegiatan kemasyarakatan.

Selain komunikasi, aktivitas pelaksana juga terlihat dari adanya koordinasi sebelum kegiatan, monitoring terhadap pelaksanaan, serta pencatatan dan pelaporan setelah kegiatan. Kegiatan dan peserta dicatat sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung pada saat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses koordinasi dan pengawasan program. Dengan demikian, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana menjadi faktor pendukung karena informasi dapat diteruskan dari tingkat pelaksana sampai kepada keluarga sasaran.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi yang telah berjalan belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi keluarga yang konsisten. Artinya, hambatan yang ditemukan bukan terutama pada tidak tersampaikannya informasi, melainkan pada kemampuan informasi tersebut untuk mendorong keluarga hadir dan mengikuti kegiatan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi perlu dilihat bukan hanya dari apakah informasi telah disampaikan, tetapi juga dari respons keluarga setelah menerima informasi tersebut.

Pada dimensi disposisi pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan BKR. Informan 1, 2, dan 3 menunjukkan adanya pemahaman terhadap pentingnya program, kesediaan menjalankan tugas, serta komitmen untuk mempertahankan kegiatan. Informan 1 menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi. Informan 2 tetap berupaya menjalankan kegiatan meskipun terdapat keterbatasan waktu dan partisipasi keluarga. Sementara itu, Informan 3 tetap bersedia membantu keluarga dan menyampaikan permasalahan kepada PLKB apabila terdapat persoalan yang tidak dapat ditangani oleh kader.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak menunjukkan penolakan terhadap program. Sebaliknya, terdapat kecenderungan untuk menerima dan menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas masing-masing. Disposisi pelaksana dengan demikian menjadi faktor pendukung yang cukup kua**t** dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali. Bahkan ketika terdapat keterbatasan sumber daya maupun partisipasi masyarakat, komitmen pelaksana memungkinkan

kegiatan tetap dijalankan. Hambatan yang muncul pada dimensi ini lebih banyak berkaitan dengan kondisi eksternal, khususnya keterbatasan waktu dan kehadiran keluarga sasaran, bukan karena rendahnya kemauan atau komitmen pelaksana.

Selanjutnya, dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan adanya faktor pendukung sekaligus faktor penghambat yang cukup kuat. Dari aspek sosial, masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"masyarakat telah mengetahui adanya program*",

sedangkan Informan 4 juga mengetahui bahwa:

> *"BKR sebagai program pemerintah yang dilaksanakan melalui petugas dan kader*".

Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa BKR tidak menghadapi penolakan sosial yang berarti. Kedekatan kader dengan masyarakat juga memudahkan penyampaian informasi dan pelaksanaan pembinaan.

Namun, penerimaan terhadap program belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang konsisten. Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"partisipasi masyarakat sudah ada tetapi belum seluruh keluarga mengikuti kegiatan secara rutin*".

Selanjutnya Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang aktif dan ada pula yang hanya mengikuti kegiatan sesekali*".

Kemudian Informan 3 juga menyampaikan bahwa*:*

> *"kehadiran keluarga berbeda-beda karena adanya pekerjaan dan kegiatan lainnya*".

Dengan demikian, lingkungan sosial menjadi faktor pendukung karena terdapat penerimaan terhadap BKR, tetapi sekaligus menjadi faktor penghambat karena tingkat keterlibatan keluarga belum merata.

Perbedaan karakteristik keluarga juga menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memengaruhi pelaksanaan program. Informan 1 menyatakan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang mudah diajak berkomunikasi dan ada pula yang kurang terbuka*.

Kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda*",

sedangkan Informan 3 menyampaikan bahwa:

> *"karakter remaja juga berbeda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang tua*".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama terhadap seluruh keluarga.

Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi terutama memengaruhi ketersediaan waktu keluarga. Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"keluarga yang mempunyai aktivitas pekerjaan cukup padat mengalami keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan*".

kemudian Informan 3 juga menyampaikan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang tidak dapat hadir karena bekerja*",

sedangkan Inforeman 4 mengakui bahwa:

> *"ketika kegiatan BKR berlangsung bersamaan dengan pekerjaan, keluarga mengalami kesulitan untuk meninggalkan pekerjaan*".

Dengan demikian, hambatan ekonomi dalam penelitian ini tidak terutama berupa persoalan biaya mengikuti kegiatan, tetapi lebih berkaitan dengan kesempatan waktu yang hilang ketika keluarga harus memilih antara pekerjaan dan mengikuti kegiatan BKR.

Dari aspek politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah desa dan pemangku kepentingan menjadi faktor pendukung. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa diperlukan dalam koordinasi, fasilitas, serta keberlanjutan kegiatan*".

selanjutnya Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa penting karena kegiatan BKR banyak dilaksanakan pada tingkat masyarakat".*

Kemudian Informan 3 juga menyampaikan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa memudahkan kader dalam melaksanakan kegiatan dan mengajak masyarakat*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dukungan kelembagaan memperkuat posisi program di tingkat masyarakat dan membantu pelaksana menjalankan kegiatan.

Apabila keenam dimensi tersebut dilihat secara keseluruhan, terlihat bahwa faktor pendukung dan penghambat implementasi BKR saling berkaitan. Kejelasan tujuan dan sasaran menjadi dasar bagi pelaksana dalam menjalankan kegiatan, tetapi pencapaian sasaran dipengaruhi oleh partisipasi keluarga. Ketersediaan petugas dan kader mendukung jangkauan program, tetapi keterbatasan waktu dan beban kerja membatasi optimalisasi sumber daya.

Pembagian tugas dan komunikasi yang berjalan membantu memperlancar pelaksanaan, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada respons dan kehadiran keluarga. Sementara itu, komitmen pelaksana menjadi kekuatan internal yang memungkinkan program tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan eksternal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor pendukung implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali lebih banyak berasal dari aspek internal pelaksanaan program, yaitu adanya tujuan yang jelas, tersedianya pelaksana dan kader, pembagian tugas, komunikasi yang berjalan, komitmen pelaksana, serta dukungan pemerintah desa dan penerimaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan Program BKR tetap berjalan dan menjangkau keluarga sasaran.

Sebaliknya, faktor penghambat lebih banyak berasal dari keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan keluarga sasaran. Keterbatasan waktu petugas, beban kerja, kesibukan kader, kemampuan kader yang berbeda, partisipasi keluarga yang belum konsisten, perbedaan karakteristik keluarga dan remaja, serta aktivitas pekerjaan keluarga menjadi kondisi yang membatasi optimalisasi program. Dengan demikian, hambatan implementasi BKR di Kecamatan Kawali tidak terutama menunjukkan adanya penolakan terhadap program, tetapi lebih menunjukkan adanya kesenjangan antara tersedianya program dengan kemampuan keluarga untuk berpartisipasi secara konsisten.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa implementasi Program Bina Keluarga Remaja oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali

Kabupaten Ciamis telah memiliki fondasi pelaksanaan yang cukup baik, terutama dari sisi pelaksana dan kelembagaan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga sasaran. Oleh karena itu, keberhasilan program ke depan tidak hanya membutuhkan mempertahankan komitmen pelaksana, tetapi juga penguatan kapasitas kader, optimalisasi koordinasi, penyesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas keluarga, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik keluarga dan remaja. Dengan demikian, pelaksanaan BKR dapat lebih mampu menjembatani antara tujuan program dengan kebutuhan nyata keluarga sasaran di Kecamatan Kawali.

4.2.3 Upaya Tim BKKBN Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, pada dimensi standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran program secara umum telah dipahami oleh pelaksana maupun keluarga sasaran. Pemahaman tersebut terlihat dari argumentasi masing-masing informan yang menunjukkan adanya kesamaan mengenai arah Program BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"Program BKR diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam melakukan pembinaan terhadap remaja dan BKR tidak hanya berorientasi pada kegiatan pertemuan, tetapi merupakan bagian dari upaya memberikan kemampuan kepada orang tua agar mampu mendampingi, berkomunikasi, dan melakukan pengawasan terhadap anak remaja".*

Pemahaman tersebut kemudian diterjemahkan pada tingkat pelaksana lapangan oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"tujuan BKR diarahkan agar keluarga yang mempunyai anak remaja mempunyai pengetahuan mengenai cara menghadapi perkembangan remaja*".

Dalam pelaksanaannya, informasi tersebut diberikan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada kader yang kemudian diteruskan kepada keluarga sasaran. Dengan demikian, terdapat proses penerjemahan tujuan program dari tingkat pelaksana kepada masyarakat.

Hal yang sama disampaikan oleh Informan 3*:*

> *"BKR sebagai kegiatan yang membantu orang tua memahami kondisi anak remaja, terutama berkaitan dengan komunikasi dan pendampingan".*

Sementara itu, kemudian Informan 4 juga menyatakan bahwa:

> *"kegiatan BKR memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai cara mendidik, mengawasi, dan mendampingi anak yang telah memasuki usia remaja".*

Perbedaan posisi keempat informan tersebut tidak menyebabkan perbedaan mendasar dalam memahami tujuan program. Tim BKKBN memahami tujuan pada tingkat kebijakan, PLKB menerjemahkannya dalam pembinaan, kader menyampaikannya kepada masyarakat, sedangkan keluarga merasakan tujuan tersebut dalam bentuk pengetahuan dan pendampingan terhadap anak.

Kesamaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa standar dan tujuan Program BKR telah dikomunikasikan dan diterjemahkan sampai pada kelompok sasaran. Dengan demikian, hambatan implementasi pada aspek standar kebijakan bukan terutama disebabkan oleh ketidakjelasan tujuan program. Hambatan lebih

terlihat pada kemampuan pelaksana dalam menerapkan tujuan tersebut secara konsisten kepada keluarga yang mempunyai kondisi, karakteristik, dan tingkat partisipasi yang berbeda.

Selanjutnya, dari aspek sasaran kebijakan, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sasaran utama Program BKR adalah keluarga yang mempunyai anak remaja. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan data keluarga dan kondisi wilayah*".

Selanjutnya Informan 2 memperkuat bahwa:

> *"PLKB menggunakan data keluarga yang mempunyai anak remaja sebagai dasar dalam menentukan keluarga yang perlu mendapatkan pembinaan*".

Sementara Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"kader membantu menemukan dan menghubungi keluarga yang mempunyai anak remaja di lingkungan masyarakat".*

Kemudian dari sisi Informan 4:

> *"keluarga mengetahui bahwa mereka merupakan sasaran BKR setelah mendapatkan informasi dari kader mengenai kegiatan pembinaan.*

Berdasarkan argumentasi keempat informan tersebut, dapat dilihat bahwa sasaran BKR telah ditentukan secara jelas, yaitu keluarga yang mempunyai anak remaja. Namun demikian, kejelasan sasaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi keluarga. Informan 1 menjelaskan bahwa*:*

> *"partisipasi masyarakat sudah ada, tetapi belum semua keluarga sasaran mengikuti kegiatan secara konsisten*".

Sementara Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang aktif mengikuti kegiatan, tetapi ada pula yang hanya hadir pada waktu tertentu karena kesibukan*".

Kemudian Informan 3 juga menyampaikan bahwa:

> *"kehadiran keluarga tidak selalu sama karena sebagian keluarga mempunyai pekerjaan atau kegiatan lain".*

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa:

> *"keikutsertaan dalam kegiatan sangat bergantung pada kesesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas keluarga*".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pada dimensi standar dan sasaran lebih terlihat pada pencapaian sasaran secara substantif, bukan pada penentuan siapa yang menjadi sasaran. Sasaran telah jelas, tetapi tidak seluruh keluarga sasaran dapat berpartisipasi secara konsisten. Oleh karena itu, Tim BKKBN perlu melakukan penyesuaian dalam menjangkau keluarga agar tujuan BKR tetap dapat dicapai.

Hasil wawancara tersebut diperkuat melalui studi dokumentasi. Dalam pelaksanaan BKR terdapat pencatatan kegiatan dan peserta yang menjadi bagian dari proses administrasi dan pelaporan. Pencatatan tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan. Daftar hadir menjadi salah satu bentuk dokumentasi yang dapat menunjukkan tingkat keterlibatan keluarga sasaran dalam kegiatan BKR.

Keberadaan pencatatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga memperhatikan keterjangkauan sasaran. Data peserta dapat digunakan oleh pelaksana untuk mengetahui keluarga yang telah mengikuti kegiatan maupun keluarga yang belum aktif. Dengan demikian, dokumentasi menjadi salah satu instrumen yang membantu pelaksana dalam melakukan tindak lanjut terhadap keluarga sasaran.

Studi dokumentasi juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan BKR menggunakan materi pembinaan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga remaja. Materi tersebut mencakup pembinaan komunikasi antara orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, serta pembentukan karakter. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar program diterjemahkan dalam materi dan aktivitas pembinaan yang bersifat operasional.

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan kegiatan BKR, peneliti dapat melihat bahwa standar dan sasaran kebijakan diterapkan melalui kegiatan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja. Pelaksanaan kegiatan memperlihatkan keterlibatan PLKB dan kader dalam menyampaikan informasi dan materi pembinaan kepada keluarga sasaran.

Hasil observasi tersebut memperkuat informasi dari Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 bahwa tujuan BKR diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata berupa penyuluhan dan pembinaan keluarga. Dengan demikian, standar program tidak hanya terlihat dalam pernyataan informan atau dokumen, tetapi juga diwujudkan dalam aktivitas pelaksanaan.

Hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dalam landasan teori penelitian Anda dijelaskan bahwa model Van Meter dan Van Horn menempatkan standar dan tujuan kebijakan sebagai titik awal pengukuran kinerja implementasi, sehingga sasaran program harus realistis serta sesuai dengan konteks sosial dan budaya pelaksana.

Landasan teori ini juga menjelaskan bahwa khusus dalam konteks BKR, tujuan pembinaan keluarga remaja, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan harus diterjemahkan secara operasional dan tidak berhenti pada rumusan normatif. Hal tersebut dikemukakan dalam landasan teori dengan merujuk pada Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) dan Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023).

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, kondisi di Kecamatan Kawali menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep tersebut. Tujuan BKR telah dipahami oleh Tim BKKBN, PLKB, kader, dan keluarga sasaran. Namun, tujuan tersebut tidak berhenti pada pemahaman secara normatif. Tim BKKBN berupaya menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, penyampaian materi, dan pendampingan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diterjemahkan ke dalam aktivitas operasional di lapangan.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Efiyanti et al. (2022) dan Muksin et al. (2024) yang dalam landasan teori Anda menekankan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus menjadi dasar pengukuran implementasi dan sasaran kebijakan harus realistis serta sesuai dengan konteks sosial budaya pelaksana.

Dalam konteks Kecamatan Kawali, penyesuaian tersebut terlihat terutama dalam menghadapi perbedaan kondisi keluarga sasaran. Berdasarkan keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4, tidak seluruh keluarga dapat mengikuti kegiatan BKR secara konsisten. Kesibukan pekerjaan dan aktivitas keluarga menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu, Tim BKKBN tidak dapat

hanya menggunakan pendekatan yang sama terhadap seluruh keluarga, tetapi perlu memanfaatkan PLKB dan kader untuk menjangkau keluarga secara lebih dekat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengatasi hambatan pada dimensi standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui operasionalisasi tujuan program dan penyesuaian pendekatan terhadap sasaran. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa tujuan pembinaan keluarga remaja, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan harus diterjemahkan secara operasional.

Lebih lanjut, landasan teori ini menjelaskan bahwa model Van Meter dan Van Horn tidak memandang keberhasilan implementasi hanya ditentukan oleh desain kebijakan. Hasil implementasi ditentukan oleh hubungan antara seluruh variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Artinya, persoalan partisipasi keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi lain. Standar dan sasaran sudah jelas, tetapi pencapaiannya dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, komunikasi antara pelaksana dengan keluarga, karakteristik organisasi pelaksana, komitmen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, temuan pada dimensi pertama menjadi dasar untuk memahami temuan pada lima dimensi berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa hambatan utama pada dimensi standar dan sasaran kebijakan

bukan terletak pada ketidakjelasan tujuan maupun sasaran Program BKR, melainkan pada kesenjangan antara sasaran yang telah ditetapkan dengan kemampuan untuk menjangkau dan mempertahankan partisipasi keluarga sasaran**.**

Hal tersebut terlihat dari adanya kesamaan pemahaman antara Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 mengenai tujuan BKR, tetapi pada saat yang sama masih terdapat keluarga yang belum dapat mengikuti kegiatan secara konsisten. Dengan demikian, upaya Tim BKKBN lebih diarahkan pada penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam pembinaan yang operasional, penguatan peran PLKB dan kader, pendataan keluarga sasaran, pencatatan peserta, serta pendekatan langsung kepada keluarga.

Argumentasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan landasan teori penelitian, bahwa standar dan tujuan kebijakan merupakan titik awal implementasi, tetapi tujuan dan target BKR harus diterjemahkan secara operasional sesuai kondisi sosial-budaya sasaran**.**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR pada dimensi standar dan sasaran kebijakan di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sudah dilakukan melalui kejelasan tujuan, penetapan sasaran yang spesifik, penerjemahan tujuan ke dalam kegiatan pembinaan, serta pemanfaatan PLKB dan kader untuk menjangkau keluarga sasaran. Hambatan yang masih muncul lebih berkaitan dengan konsistensi partisipasi keluarga, sehingga strategi yang dilakukan bukan mengubah standar dan sasaran program, melainkan menyesuaikan cara implementasi dengan kondisi keluarga dan lingkungan sosial sasaran.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat penggunaan model Van Meter dan Van Horn karena menunjukkan bahwa standar dan sasaran yang jelas merupakan prasyarat penting, tetapi pencapaiannya tetap bergantung pada keterkaitan dengan variabel implementasi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian Anda yang menegaskan bahwa hasil implementasi ditentukan oleh hubungan antarseluruh variabel dan bukan hanya oleh desain kebijakan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dimensi sumber daya, diketahui bahwa sumber daya merupakan salah satu aspek yang masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan anggaran, sarana dan prasarana, serta ketersediaan dan peran sumber daya manusia, khususnya kader sebagai unsur yang membantu PLKB dalam menjangkau keluarga sasaran. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan pelaksanaan BKR berhenti, karena Tim BKKBN dan pelaksana di lapangan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek anggaran, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan BKR tersedia, tetapi belum selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia"*.

Dengan demikian, Tim BKKBN tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan secara ideal, tetapi melakukan penyesuaian terhadap bentuk dan pelaksanaan kegiatan agar program tetap dapat berjalan. Temuan ini menunjukkan

bahwa kemampuan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang gerak pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan BKR.

Kondisi tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan kegiatan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada, kegiatan juga tetap diupayakan berjalan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting dalam kegiatan pembinaan*".

Argumentasi Informan 2 tersebut menunjukkan bahwa pelaksana di tingkat lapangan melakukan prioritas penggunaan sumber daya agar keterbatasan anggaran tidak secara langsung menghentikan kegiatan BKR.

Dari aspek sarana dan prasarana, Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sarana dasar untuk pelaksanaan BKR pada dasarnya tersedia, tetapi belum seluruhnya berada dalam kondisi ideal*".

Oleh karena itu, kegiatan BKR banyak memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di desa atau lingkungan masyarakat. Sementara itu, Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"tempat pelaksanaan kegiatan pada umumnya dapat digunakan, tetapi fasilitas pendukung seperti media penyuluhan dan perlengkapan kegiatan masih perlu disesuaikan dengan kondisi yang tersedia*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana tidak diatasi dengan menunggu tersedianya fasilitas khusus, tetapi dengan memanfaatkan fasilitas lokal yang telah ada.

Argumentasi tersebut juga terlihat dari keterangan Informan 3 yang menyatakan bahwa:

> *"tempat kegiatan pada dasarnya cukup digunakan untuk kegiatan pertemuan, tetapi apabila jumlah peserta meningkat, fasilitas yang tersedia perlu disesuaikan*".

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kader secara langsung menghadapi kondisi sarana di lapangan dan berupaya menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kapasitas tempat dan fasilitas yang tersedia.

Sementara itu, Informan 4 memberikan penilaian dari sisi penerima program dan menyatakan bahwa:

> *"tempat pelaksanaan kegiatan cukup nyaman digunakan untuk mengikuti penyuluhan"*.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksana mengakui adanya keterbatasan fasilitas, kondisi tersebut belum sampai menghambat keluarga dalam menerima materi pembinaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan perspektif antara pelaksana dan sasaran: pelaksana melihat masih terdapat kekurangan fasilitas, sedangkan keluarga sasaran menilai fasilitas yang digunakan masih cukup untuk menunjang kegiatan.

Dari aspek sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kader mempunyai posisi strategis dalam membantu pelaksanaan BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keberadaan kader sangat membantu Tim BKKBN dan PLKB dalam menjangkau keluarga sasaran*".

Kader tidak hanya membantu mengumpulkan peserta, tetapi juga membantu menyampaikan informasi, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan kondisi di lapangan kepada petugas. Dengan demikian, kader berfungsi sebagai perpanjangan tangan pelaksana dalam menjangkau masyarakat.

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"PLKB tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau seluruh keluarga sasaran sehingga membutuhkan bantuan kader*".

Kader membantu menghubungi dan mengajak keluarga untuk mengikuti kegiatan serta memberikan informasi kepada PLKB mengenai kondisi masyarakat. Sementara Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"sebagai kader dirinya membantu menginformasikan kegiatan kepada keluarga, mengumpulkan peserta, membantu kegiatan ketika berlangsung, dan memberikan informasi kepada petugas apabila terdapat permasalahan di lapangan*".

Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kader merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mengatasi keterbatasan jangkauan pelaksana. PLKB memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh keluarga secara langsung, sedangkan kader memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kondisi tersebut membuat kader menjadi sumber daya strategis yang membantu menghubungkan program dengan keluarga sasaran.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa variabel sumber daya dalam model implementasi mencakup sumber daya manusia, keuangan, waktu, infrastruktur, dan bahkan validitas data, sehingga keterbatasan pada salah satu unsur sumber daya dapat menurunkan kualitas implementasi. Landasan teori tersebut merujuk pada Fauziyah & Arif (2021), Kiemas et al. (2026), Muksin et al. (2024), dan Nuralisa et al. (2025).

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa persoalan sumber daya dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali tidak hanya berkaitan dengan jumlah anggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya

manusia, fasilitas, waktu, dan sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif.

Berdasarkan studi dokumentasi, pelaksanaan BKR didukung oleh berbagai materi pembinaan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga yang mempunyai anak remaja. Materi tersebut mencakup komunikasi antara orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, serta pembentukan karakter. Ketersediaan materi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan BKR tidak hanya berbentuk anggaran dan fasilitas fisik, tetapi juga berupa sumber daya informasi dan bahan pembinaan yang digunakan oleh pelaksana dalam memberikan pemahaman kepada keluarga.

Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir dan pencatatan kegiatan menunjukkan adanya dukungan sumber daya administratif dalam pelaksanaan program. Pencatatan tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, serta menjadi bahan pelaporan kepada pihak terkait. Dengan demikian, administrasi kegiatan menjadi bagian dari sumber daya yang membantu pelaksana memantau pelaksanaan BKR.

Dokumentasi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan pada beberapa sumber daya, pelaksanaan BKR masih mempunyai sumber daya pendukung yang dapat digunakan, khususnya materi pembinaan, administrasi kegiatan, serta keterlibatan kader dan PLKB.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan kegiatan BKR memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan masyarakat atau desa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BKR

tidak sepenuhnya bergantung pada tersedianya sarana khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan BKR. Pelaksana memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar kegiatan pembinaan tetap dapat dilaksanakan.

Selain tempat kegiatan, peneliti juga mengamati keterlibatan kader dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Kader membantu dalam proses persiapan, mengarahkan peserta, serta mendukung pelaksanaan penyampaian materi oleh petugas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kader bukan hanya tercantum sebagai bagian dari struktur pelaksana, tetapi benar-benar berperan dalam mendukung kegiatan di lapangan.

Dari sisi materi, kegiatan pembinaan didukung oleh bahan penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada keluarga sasaran. Dengan demikian, hasil observasi memperkuat hasil wawancara bahwa keterbatasan sarana dan sumber daya tidak membuat kegiatan berhenti, tetapi mendorong pelaksana untuk mengoptimalkan fasilitas dan sumber daya yang telah tersedia.

Apabila temuan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi. Dalam landasan teori Anda dijelaskan secara eksplisit bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, infrastruktur, dan validitas data, sehingga kekurangan pada salah satu unsur tersebut dapat berpengaruh terhadap mutu implementasi. Pandangan tersebut dikemukakan melalui Fauziyah & Arif (2021), Kiemas et al. (2026), Muksin et al. (2024), dan Nuralisa et al. (2025).

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya di Kecamatan Kawali terlihat dari belum optimalnya anggaran dan fasilitas pendukung kegiatan. Informan 1 menyampaikan bahwa:

> *"anggaran tersedia tetapi belum selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan*".

kemudian Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"kondisi tersebut menyebabkan kegiatan perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada*".

Sementara Informan 3 menunjukkan bahwa:

> *"fasilitas tempat kegiatan cukup digunakan tetapi perlu disesuaikan apabila peserta lebih banyak*".

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya memang menjadi hambatan implementasi, sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak secara otomatis menyebabkan program gagal dilaksanakan. Tim BKKBN, PLKB, dan kader melakukan berbagai bentuk penyesuaian untuk memastikan kegiatan tetap berjalan. Anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan utama, fasilitas yang tersedia di desa atau masyarakat dimanfaatkan, dan kader diberdayakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

Hal tersebut memperlihatkan adanya strategi optimalisasi sumber daya. Dalam kondisi sumber daya yang belum ideal, pelaksana tidak menghentikan kegiatan, tetapi melakukan penyesuaian berdasarkan prioritas. Strategi tersebut penting karena implementasi kebijakan pada tingkat lapangan sering kali

menghadapi kondisi sumber daya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan program.

Khusus mengenai sumber daya manusia, temuan penelitian menunjukkan bahwa kader mempunyai peranan yang sangat penting. Informan 1 dan Informan 2 sama-sama menempatkan kader sebagai pihak yang membantu memperluas jangkauan PLKB, sedangkan Informan 3 menjelaskan secara langsung bentuk keterlibatan kader dalam menghubungi keluarga, mengumpulkan peserta, dan membantu pelaksanaan kegiatan. Temuan ini sangat relevan dengan landasan teori Anda yang secara khusus menjelaskan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal.

Lebih lanjut, landasan teori ini menunjukkan bahwa studi implementasi BKR di Kuta Selatan menemukan bahwa program belum berjalan baik karena kekurangan SDM, rendahnya komitmen antarsektor, dan lemahnya partisipasi kader. Temuan tersebut dikaitkan dengan Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025). Temuan tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dengan kondisi di Kecamatan Kawali. Apabila dalam penelitian di Kuta Selatan lemahnya SDM dan partisipasi kader menjadi hambatan, maka di Kecamatan Kawali justru kader dimanfaatkan sebagai salah satu sumber daya strategis untuk membantu mengatasi keterbatasan jangkauan pelaksana.

Artinya, posisi kader dalam penelitian ini bukan hanya sebagai pelaksana tambahan, tetapi sebagai sumber daya yang memperkuat kapasitas implementasi. Kedekatan kader dengan masyarakat membuat proses penyampaian informasi dan

pengumpulan keluarga sasaran menjadi lebih mudah dilakukan. Hal tersebut juga memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi BKR tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas formal, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana memanfaatkan sumber daya yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Temuan tersebut juga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori mengenai pelaksanaan program BKKBN di Kalimantan Tengah. Landasan teori Anda menyebutkan bahwa dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama implementasi program keluarga dan remaja, sebagaimana dikemukakan oleh Latifah (2025). Dalam konteks Kecamatan Kawali, keberadaan PLKB dan kader yang aktif menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya formal yang dimiliki pelaksana.

Dengan demikian, peneliti berargumentasi bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan sumber daya dilakukan bukan semata-mata melalui penambahan sumber daya, tetapi melalui optimalisasi dan pengorganisasian sumber daya yang tersedia. Hal tersebut terlihat melalui pemanfaatan fasilitas desa, penyesuaian kegiatan dengan kemampuan anggaran, penggunaan materi pembinaan yang tersedia, serta penguatan peran kader sebagai sumber daya manusia di tingkat masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn yang menempatkan sumber daya sebagai bagian yang berinteraksi dengan variabel implementasi lainnya. Landasan teori Anda menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi antara tujuan yang jelas, sumber daya yang

memadai, komunikasi yang efektif, karakter organisasi yang siap, disposisi pelaksana yang mendukung, dan lingkungan eksternal yang kondusif, sebagaimana dikemukakan oleh Nuralisa et al. (2025) serta Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023).

Oleh karena itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ditemukan dalam penelitian tidak dapat dilihat sebagai hambatan yang berdiri sendiri. Kemampuan Tim BKKBN mengatasi keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh komunikasi dengan PLKB dan kader, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau komitmen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga sasaran. Dengan kata lain, sumber daya menjadi salah satu bagian dari rangkaian variabel yang saling memengaruhi dalam implementasi BKR.

Berdasarkan triangulasi antara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa hambatan sumber daya dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berada pada kondisi sumber daya yang belum sepenuhnya ideal, terutama dari aspek anggaran, fasilitas pendukung, dan keterbatasan jangkauan SDM formal.

Namun, kondisi tersebut tidak sampai menghentikan pelaksanaan program. Tim BKKBN berupaya mengatasinya dengan menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan anggaran, memanfaatkan fasilitas yang tersedia di desa atau masyarakat, menggunakan materi pembinaan yang tersedia, serta mengoptimalkan peran PLKB dan kader.

Temuan paling penting pada dimensi ini adalah peran kader sebagai sumber daya strategis. Kader menjadi penghubung antara PLKB dengan keluarga

sasaran karena membantu menyampaikan informasi, mengajak keluarga mengikuti kegiatan, mengumpulkan peserta, membantu pelaksanaan kegiatan, dan menyampaikan kondisi lapangan kepada petugas. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang menegaskan pentingnya kapasitas organisasi, PLKB, kader, dan jejaring lokal dalam implementasi BKR.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan pada dimensi sumber daya lebih menekankan strategi optimalisasi daripada penambahan sumber daya. Strategi tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah tersedia sehingga kegiatan BKR tetap dapat berjalan meskipun dukungan anggaran, fasilitas, dan SDM belum sepenuhnya ideal.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis masih menghadapi keterbatasan, tetapi Tim BKKBN telah melakukan upaya untuk mengatasinya melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran diatasi dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran, keterbatasan fasilitas diatasi dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di desa atau masyarakat, sedangkan keterbatasan jangkauan SDM diatasi melalui penguatan peran PLKB dan kader.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa sumber daya mencakup SDM, keuangan, waktu, infrastruktur, dan validitas data, serta bahwa keterbatasan pada salah satu unsur dapat menurunkan mutu

implementasi. Fauziyah & Arif (2021), Kiemas et al. (2026), Muksin et al. (2024), dan Nuralisa et al. (2025) menjadi rujukan dalam menjelaskan hal tersebut.

Pada konteks BKR, temuan ini semakin kuat karena landasan teori Anda secara khusus menyebutkan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal, sedangkan studi Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa kekurangan SDM dan lemahnya partisipasi kader dapat menjadi hambatan implementasi BKR.

Jadi, sumber daya menjadi hambatan dalam implementasi BKR karena belum sepenuhnya ideal, tetapi hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui optimalisasi anggaran, pemanfaatan sarana lokal, serta penguatan peran PLKB dan kader sebagai sumber daya strategis dalam menjangkau keluarga sasara.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, karakteristik badan pelaksana menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan beberapa unsur, yaitu Tim BKKBN, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader, pemerintah desa, dan keluarga sasaran. Keterlibatan beberapa unsur tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi antarpelaksana. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"hubungan kerja dalam pelaksanaan BKR dilakukan secara koordinatif karena program tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja*".

Tim BKKBN berperan memberikan pembinaan, arahan, pengawasan, dan memastikan kegiatan berjalan, sedangkan pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan melalui PLKB dan kader.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menyampaikan bahwa:

> *"hubungan kerja dengan kader berjalan cukup baik karena kader mempunyai posisi yang dekat dengan masyarakat*".

Menurut Informan 2 jugga:

> *"kader membantu menyampaikan informasi kegiatan dan menghubungkan PLKB dengan keluarga sasaran*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kader menjadi bagian penting dari struktur pelaksana karena PLKB tidak hanya bekerja secara langsung kepada keluarga, tetapi memperoleh dukungan dari kader dalam menjangkau masyarakat.

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> *"apabila terdapat informasi atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, kader berkomunikasi dengan PLKB*, *kader tidak mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan kebijakan, tetapi menyampaikan permasalahan kepada PLKB untuk mendapatkan arahan atau tindak lanjut".*

Sementara itu, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kader relatif mudah dihubungi ketika keluarga membutuhkan informasi mengenai kegiatan BKR*".

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kader menjadi aktor yang berada paling dekat dengan kelompok sasaran dan berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dengan pelaksana program.

Dari hasil wawancara keempat informan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pembagian fungsi yang relatif jelas dalam pelaksanaan BKR. Tim BKKBN

berada pada fungsi pembinaan dan pengawasan, PLKB menjalankan fungsi teknis dan koordinasi di lapangan, kader membantu menjangkau keluarga sasaran, sedangkan keluarga merupakan kelompok penerima manfaat program. Pembagian tersebut menjadi salah satu cara Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi karena keterbatasan jangkauan petugas dapat dibantu melalui keberadaan kader di lingkungan masyarakat.

Selain pembagian fungsi, hasil penelitian menunjukkan adanya pembagian kewenangan secara berjenjang. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keputusan yang berkaitan dengan kebijakan berada pada tingkat yang memiliki kewenangan, sedangkan pelaksana lapangan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi wilayah*".

Kemudian Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"permasalahan yang masih dapat diselesaikan di lapangan akan ditangani oleh PLKB, sedangkan permasalahan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut akan dikoordinasikan kepada atasan".*

Sementara itu, Informan 3 menyatakan bahwa:

> "*kader tidak mengambil keputusan mengenai kebijakan, melainkan menyampaikan permasalahan kepada PLKB*".

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat batas kewenangan yang membedakan tugas Tim BKKBN, PLKB, dan kader.

Hasil studi dokumentasi memperlihatkan adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan BKR. Dokumentasi menunjukkan bahwa Tim BKKBN mempunyai fungsi dalam memastikan program berjalan, memberikan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi kegiatan. PLKB menjalankan fungsi pembinaan kader,

pelaksanaan kegiatan, koordinasi, dan pelaporan, sedangkan kader membantu kegiatan serta menyampaikan informasi kepada keluarga sasaran.

Adanya dokumentasi kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian tugas antaraktor tidak hanya bersifat informal, tetapi juga didukung oleh mekanisme administrasi dan pelaporan. Dengan demikian, informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan secara berjenjang dari kader kepada PLKB dan selanjutnya menjadi bahan koordinasi dengan pihak yang mempunyai kewenangan.

Berdasarkan hasil observasi, karakteristik badan pelaksana terlihat dari adanya pembagian peran secara langsung dalam kegiatan BKR. PLKB menjalankan fungsi dalam penyampaian materi pembinaan, sedangkan kader membantu mempersiapkan peserta dan mendukung kelancaran kegiatan. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa pembagian fungsi antara PLKB dan kader tidak hanya terdapat dalam uraian tugas, tetapi juga tampak dalam pelaksanaan kegiatan.

Observasi tersebut memperkuat keterangan Informan 2 dan Informan 3 bahwa kader berperan sebagai penghubung antara PLKB dengan keluarga sasaran. Kader membantu pelaksana menjangkau masyarakat sekaligus menjadi pihak yang dapat memberikan informasi awal mengenai kondisi keluarga sasaran kepada PLKB.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, karakteristik badan pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali menunjukkan adanya struktur kerja yang koordinatif, pembagian tugas, serta pembagian kewenangan secara berjenjang. Kondisi tersebut sesuai dengan model

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menempatkan karakteristik badan pelaksana sebagai salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam landasan teori penelitian Anda, model tersebut dijelaskan melalui beberapa variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Efiyanti et al. (2022), Kiemas et al. (2026), Muksin et al. (2024), Nuralisa et al. (2025), dan Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023) menjadi rujukan dalam menjelaskan kerangka tersebut.

Dalam penelitian ini, karakteristik badan pelaksana terlihat dari adanya pembagian fungsi antara Tim BKKBN, PLKB, dan kader. Informan 1 menunjukan fungsi Tim BKKBN dalam pembinaan dan pengawasan, Informan 2 menunjukkan fungsi PLKB dalam pelaksanaan teknis dan koordinasi, sedangkan Informan 3 menunjukkan fungsi kader dalam menjangkau masyarakat. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa implementasi BKR mempunyai struktur pelaksana yang memungkinkan tugas didistribusikan sesuai dengan posisi dan kewenangan masing-masing.

Temuan tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat dengan landasan teori yang secara khusus menjelaskan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Dengan demikian, keberadaan PLKB dan kader di Kecamatan Kawali bukan hanya sebagai pelaksana tambahan, tetapi merupakan bagian dari kapasitas organisasi yang membantu program menjangkau keluarga sasaran.

Khususnya pada posisi kader, hasil penelitian menunjukkan bahwa kader menjadi penghubung antara organisasi pelaksana dengan keluarga sasaran. Informan 2 menyatakan bahwa:

"kader membantu PLKB menjangkau masyarakat",

sedangkan Informan 3 menjelaskan bahwa:

"kader menyampaikan informasi dan permasalahan kepada PLKB".

Bahkan Informan 4 menyatakan bahwa:

"kader mudah dihubungi ketika membutuhkan informasi".

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kader mempunyai kedekatan sosial dengan kelompok sasaran yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi BKR.

Hal tersebut sejalan dengan uraian dalam landasan teori mengenai penelitian Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi BKR dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, termasuk ketersediaan SDM, peran PLKB, dan kader. Landasan teori juga menyebutkan bahwa keterbatasan SDM dan lemahnya partisipasi kader dapat menjadi hambatan dalam implementasi BKR.

Jika dibandingkan dengan temuan tersebut, kondisi di Kecamatan Kawali memperlihatkan bahwa kader telah dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi. Kader membantu menghubungi keluarga, menyampaikan informasi, membantu pelaksanaan kegiatan, serta meneruskan permasalahan kepada PLKB. Dengan demikian, kader tidak hanya

menjadi bagian dari struktur pelaksana secara administratif, tetapi juga menjalankan fungsi praktis dalam memperluas jangkauan program.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan adanya pembagian kewenangan yang jelas. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"keputusan kebijakan berada pada tingkat yang mempunyai kewenangan",*

sedangkan Informan 2 mempunyai ruang untuk menangani permasalahan teknis di lapangan. Kemudian Informan 3 sebagai kader tidak mengambil keputusan kebijakan, tetapi menyampaikan permasalahan kepada PLKB. Kondisi tersebut menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian masalah berdasarkan tingkat kewenangan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, pembagian kewenangan tersebut penting karena mencegah terjadinya tumpang tindih tugas. Pelaksana dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kapasitasnya, sedangkan persoalan yang berada di luar kewenangannya dapat diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, struktur organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pembagian tugas, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian hambatan implementasi.

Temuan tersebut juga dapat dikaitkan dengan penelitian Latifah (2025) yang dalam landasan teori Anda menunjukkan bahwa dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung implementasi program keluarga dan remaja. Dalam konteks Kecamatan Kawali, hubungan antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan

keluarga sasaran menunjukkan adanya jejaring pelaksana yang membantu program tetap berjalan di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, karakteristik badan pelaksana dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya mengatasi hambatan implementasi BKR. Ketika terdapat keterbatasan jangkauan petugas formal, kader membantu mendekatkan program kepada keluarga. Ketika kader menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, permasalahan diteruskan kepada PLKB. Selanjutnya, apabila diperlukan keputusan yang lebih tinggi, PLKB melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam landasan teori bahwa keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh satu variabel saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Nuralisa et al. (2025) serta Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023) digunakan dalam landasan teori Anda untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antarvariabel tersebut.

Dengan demikian, argumentasi peneliti adalah bahwa karakteristik badan pelaksana BKR di Kecamatan Kawali relatif mendukung implementasi karena terdapat pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas serta hubungan koordinatif antarpelaksana. Hambatan implementasi diatasi melalui pemanfaatan struktur tersebut, terutama dengan menjadikan kader sebagai penghubung antara PLKB dan keluarga sasaran serta menerapkan mekanisme penyelesaian masalah berdasarkan tingkat kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis relatif mendukung upaya mengatasi hambatan program. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas antara Tim BKKBN, PLKB, dan kader, hubungan kerja yang koordinatif, serta pembagian kewenangan secara berjenjang.

Upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan dilakukan dengan mengoptimalkan struktur organisasi yang ada, memperjelas fungsi masing-masing pelaksana, memperkuat koordinasi antara PLKB dan kader, serta menggunakan mekanisme pelaporan dan eskalasi masalah berdasarkan kewenangan.

Temuan ini sesuai dengan landasan teori yang menempatkan karakteristik badan pelaksana sebagai salah satu variabel penting dalam model Van Meter dan Van Horn. Secara khusus dalam konteks BKR, landasan teori menekankan pentingnya kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal.

4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dimensi komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, diketahui bahwa komunikasi menjadi bagian penting dalam memastikan informasi program dapat diterima oleh seluruh pelaksana sampai kepada keluarga sasaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan BKR berlangsung secara berjenjang, yaitu informasi dari Tim BKKBN

diteruskan kepada PLKB, kemudian disampaikan kepada kader, dan selanjutnya diteruskan kepada keluarga sasaran.

Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"informasi mengenai program dan kegiatan disampaikan kepada petugas pelaksana untuk kemudian diteruskan kepada kader dan masyarakat sasaran*".

Menurut Informan 1 juga:

> *"komunikasi diperlukan agar pelaksana di lapangan memahami kegiatan yang akan dilakukan serta dapat menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga".*

Hal ini menunjukkan bahwa Tim BKKBN berupaya menjaga agar informasi program tidak berhenti pada tingkat organisasi, tetapi dapat diteruskan sampai kepada kelompok sasaran.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"komunikasi dengan kader dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, termasuk waktu, tempat, peserta, dan materi yang akan diberikan*".

PLKB menjadi penghubung antara informasi dari tingkat organisasi dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, PLKB tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga mempunyai fungsi penting dalam memastikan informasi dapat diterima dan dipahami oleh kader.

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa:

> "*informasi yang diperoleh dari PLKB kemudian disampaikan kepada keluarga sasaran*".

Penyampaian informasi dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia. Kader juga membantu menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti kegiatan BKR, khususnya bagi keluarga yang

memiliki anak remaja. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kader mempunyai peran penting dalam menerjemahkan informasi program ke dalam bahasa yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Dari sisi kelompok sasaran, Informan 4 menjelaskan bahwa:

> *"informasi mengenai kegiatan BKR biasanya diperoleh dari kader, terutama mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga sasaran memperoleh informasi bukan hanya melalui komunikasi formal dari Tim BKKBN, tetapi melalui komunikasi yang lebih dekat dan langsung dengan kader. Dengan demikian, kader menjadi saluran komunikasi yang penting dalam menjangkau keluarga sasaran.

Berdasarkan keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi BKR berlangsung melalui rantai komunikasi Tim BKKBN → PLKB → kader → keluarga sasaran. Pola komunikasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengatasi hambatan keterjangkauan informasi. Ketika informasi tidak dapat disampaikan langsung oleh Tim BKKBN kepada seluruh keluarga, PLKB dan kader menjalankan fungsi sebagai perantara informasi sehingga pesan program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain penyampaian informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi juga digunakan dalam sosialisasi dan pembinaan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"sosialisasi BKR dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan".*

Selanjutnya Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"kegiatan BKR menjadi sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada keluarga mengenai pendampingan remaja*".

Sementara Informan 3 menyampaikan bahwa:

> "*kader membantu menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya BKR dan mengajak keluarga untuk mengikuti kegiatan*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam BKR bukan hanya bertujuan menyampaikan jadwal kegiatan, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk membangun pemahaman keluarga mengenai tujuan program.

Komunikasi juga dilakukan dalam bentuk koordinasi antarpelaksana. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan".*

selanjutnya Informan 2 menyatakan bahwa:

> *"koordinasi dengan kader dilakukan sebelum kegiatan, terutama untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta*, *apabila terdapat persoalan setelah kegiatan, komunikasi kembali dilakukan untuk membahas tindak lanjut*".

Kemudian Informan 3 juga menyatakan bahwa:

> *"kader berkomunikasi dengan PLKB apabila terdapat informasi atau permasalahan yang perlu disampaikan".*

Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berlangsung satu arah dari pelaksana kepada masyarakat, tetapi juga berlangsung dari bawah ke atas melalui penyampaian informasi dan umpan balik dari kader kepada PLKB.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan BKR mempunyai dua fungsi utama, yaitu penyampaian informasi dan koordinasi aktivitas pelaksana. Penyampaian informasi digunakan untuk memastikan keluarga

mengetahui kegiatan dan memahami tujuan BKR, sedangkan koordinasi digunakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan studi dokumentasi, pelaksanaan kegiatan BKR didukung oleh pencatatan kegiatan, daftar hadir, dan pelaporan. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dicatat oleh pelaksana, termasuk informasi mengenai kegiatan dan peserta yang mengikuti kegiatan. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pelaporan kepada tingkat yang lebih tinggi.

Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi BKR tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui komunikasi administratif dalam bentuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi pelaksanaan program, sedangkan laporan menjadi media untuk menginformasikan hasil kegiatan kepada pihak yang mempunyai kewenangan.

Selain itu, dokumentasi materi pembinaan menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi dan penyuluhan didukung oleh materi yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dan remaja, seperti komunikasi orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, serta pembentukan karakter. Materi tersebut menjadi instrumen komunikasi yang membantu pelaksana menyampaikan substansi program kepada keluarga sasaran.

Dengan demikian, hasil dokumentasi memperkuat hasil wawancara bahwa komunikasi BKR tidak hanya berupa penyampaian informasi mengenai kegiatan,

tetapi juga mencakup penyampaian substansi program, koordinasi kegiatan, pencatatan, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, komunikasi dalam kegiatan BKR dapat dilihat melalui interaksi antara pelaksana dengan keluarga sasaran. Dalam kegiatan pembinaan, PLKB menyampaikan materi kepada peserta, sedangkan kader membantu mengarahkan peserta dan mendukung kelancaran kegiatan. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi berlangsung secara langsung antara pelaksana dan keluarga sasaran.

Apabila selama kegiatan terdapat kesempatan bagi keluarga untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan mengenai remaja, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi keluarga untuk memberikan umpan balik. Dengan demikian, komunikasi dalam BKR dapat dipahami sebagai proses pertukaran informasi antara pelaksana dengan sasaran program.

Hasil observasi tersebut memperkuat keterangan Informan 2 dan Informan 3 mengenai pentingnya komunikasi langsung dalam penyampaian materi dan informasi kepada keluarga. Kader tidak hanya menyampaikan informasi mengenai jadwal kegiatan, tetapi juga membantu mendekatkan komunikasi antara keluarga dengan pelaksana program.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat diketahui bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu strategi utama Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Komunikasi dilakukan secara berjenjang

melalui Tim BKKBN, PLKB, kader, hingga keluarga sasaran, serta dilengkapi dengan koordinasi dan pencatatan kegiatan.

Temuan tersebut sesuai dengan landasan teori penelitian yang menjelaskan bahwa dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar lembaga menjadi variabel penting karena standar program harus dipahami oleh pelaksana secara akurat dan konsisten. Landasan teori Anda juga menegaskan bahwa koordinasi formal saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sinkronisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut dikemukakan oleh Purnawati et al. (2026) dan Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023).

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, komunikasi yang dilakukan Tim BKKBN, PLKB, dan kader tidak berhenti pada penyampaian informasi secara formal. Informasi mengenai kegiatan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, seperti menghubungi keluarga, menentukan waktu dan tempat kegiatan, mengumpulkan peserta, menyampaikan materi, serta melakukan tindak lanjut apabila terdapat permasalahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi telah digunakan sebagai bagian dari aktivitas implementasi, bukan hanya sebagai proses penyampaian pesan.

Pola komunikasi berjenjang yang ditemukan dalam penelitian juga memperlihatkan bahwa PLKB dan kader mempunyai posisi penting sebagai penghubung komunikasi. Informan 2 menjelaskan bahwa:

"PLKB menerima informasi dan meneruskannya kepada kader",

sedangkan Informan 3 menyampaikan bahwa:

"kader meneruskan informasi tersebut kepada keluarga".

Informan 4 membenarkan bahwa:

"informasi kegiatan biasanya diperoleh melalui kader".

Temuan tersebut relevan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa implementasi BKR bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran PLKB dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Dengan demikian, komunikasi dalam BKR tidak dapat dipisahkan dari keberadaan aktor pelaksana di tingkat lokal. PLKB dan kader menjadi saluran yang memungkinkan informasi kebijakan diterjemahkan dan disampaikan kepada keluarga sasaran.

Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa komunikasi mempunyai fungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pelaksana dengan kelompok sasaran. Tim BKKBN tidak mungkin berkomunikasi secara langsung dengan seluruh keluarga sasaran pada setiap kegiatan. Oleh karena itu, penggunaan PLKB dan kader sebagai saluran komunikasi menjadi strategi yang rasional untuk memperluas jangkauan program.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya komunikasi dua arah. Informasi tidak hanya bergerak dari Tim BKKBN kepada keluarga, tetapi permasalahan dari keluarga dapat disampaikan melalui kader kepada PLKB. Pola tersebut penting karena memungkinkan pelaksana memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan keluarga sasaran.

Hal ini sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi program keluarga dan kependudukan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, tindak lanjut atas umpan balik masyarakat, partisipasi warga, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, komunikasi yang

efektif dalam BKR bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memungkinkan pelaksana memperoleh umpan balik dari masyarakat.

Dari perspektif penelitian terdahulu yang terdapat dalam landasan teori, kondisi tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Latifah (2025) yang menunjukkan bahwa dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama implementasi program keluarga dan remaja. Dalam konteks Kecamatan Kawali, keaktifan PLKB dan kader dalam menyampaikan informasi serta melakukan koordinasi menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun partisipasi masyarakat.

Sebaliknya, landasan teori Anda juga menunjukkan bahwa pada penelitian Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025), implementasi BKR di Kuta Selatan menghadapi persoalan kekurangan SDM, rendahnya komitmen antarsektor, dan lemahnya partisipasi kader. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan keaktifan kader sangat menentukan efektivitas komunikasi program. Dalam penelitian di Kecamatan Kawali, kader justru berperan aktif dalam meneruskan informasi dan menjembatani komunikasi antara PLKB dengan keluarga sasaran.

Dengan demikian, komunikasi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pesan, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, sosialisasi, mobilisasi peserta, penyampaian umpan balik, dan penyelesaian permasalahan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas komunikasi mempunyai hubungan langsung dengan aktivitas pelaksana di lapangan.

Pencatatan dan pelaporan yang ditemukan dalam dokumentasi juga memperkuat argumentasi tersebut. Komunikasi lisan digunakan untuk menggerakkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, sedangkan pencatatan dan pelaporan digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program secara administratif. Dengan demikian, kedua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampaikannya informasi, tetapi juga oleh konsistensi pesan dan kemampuan pelaksana menerjemahkan informasi menjadi aktivitas konkret. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori yang menekankan bahwa koordinasi formal harus diikuti dengan sinkronisasi lapangan.

Berdasarkan triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa Tim BKKBN telah melakukan upaya mengatasi hambatan komunikasi melalui komunikasi berjenjang, penguatan peran PLKB dan kader, koordinasi sebelum dan sesudah kegiatan, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Keterangan Informan 1 menunjukkan bahwa Tim BKKBN berupaya memastikan informasi program diteruskan kepada pelaksana. Informan 2 menunjukkan bahwa PLKB berfungsi sebagai penghubung teknis antara Tim BKKBN dan kader. Informan 3 menunjukkan bahwa kader menjadi penghubung langsung dengan keluarga sasaran, sedangkan Informan 4 memperlihatkan bahwa keluarga memperoleh informasi kegiatan melalui kader.

Dengan demikian, kader merupakan aktor penting dalam mengatasi hambatan komunikasi pada tingkat masyarakat. Keberadaan kader membuat informasi program lebih dekat dengan keluarga sasaran dan memungkinkan adanya umpan balik dari keluarga kepada pelaksana.

Argumentasi tersebut sesuai dengan landasan teori yang menempatkan komunikasi antarorganisasi sebagai salah satu variabel penting implementasi dan menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi membutuhkan pemahaman yang akurat, konsisten, serta sinkronisasi di lapangan. Purnawati et al. (2026) dan Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023) menjadi rujukan utama untuk argumentasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali telah berjalan secara berjenjang dan cukup mendukung upaya mengatasi hambatan implementasi. Komunikasi berlangsung dari Tim BKKBN kepada PLKB, dari PLKB kepada kader, dan dari kader kepada keluarga sasaran.

Upaya mengatasi hambatan komunikasi dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung maupun menggunakan media komunikasi yang tersedia, sosialisasi dan penyuluhan, koordinasi sebelum dan sesudah kegiatan, pemberdayaan kader sebagai penghubung dengan masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan landasan teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi antar lembaga menjadi penting agar standar dan tujuan

program dapat dipahami secara akurat dan konsisten. Selain itu, koordinasi formal perlu diikuti dengan sinkronisasi aktivitas di lapangan agar komunikasi benar-benar menghasilkan tindakan implementasi. Purnawati et al. (2026) dan Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih (2023) memperkuat argumentasi tersebut.

5. Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dimensi disposisi pelaksana, diketahui bahwa disposisi pelaksana terlihat dari pemahaman, sikap, respons, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana pada setiap tingkatan memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan BKR, yaitu sebagai program yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pertemuan, tetapi juga sebagai upaya membantu keluarga dalam mendampingi dan menghadapi perkembangan anak remaja.

Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"BKR dipahami sebagai bagian dari upaya pembangunan keluarga yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan".*

Menurut Informan 1 juga:

> *"pelaksanaan BKR tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan kegiatan, tetapi perlu adanya pembinaan agar keluarga mempunyai kemampuan dalam mendampingi anak remaja*".

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Tim BKKBN mempunyai orientasi terhadap tujuan substantif program, bukan hanya terhadap pemenuhan kegiatan secara administratif.

Pemahaman tersebut kemudian diterjemahkan oleh Informan 2 melalui pelaksanaan pembinaan kepada keluarga sasaran. Informan 2 memahami tugasnya sebagai pelaksana yang memberikan informasi dan pendampingan kepada keluarga, khususnya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi keluarga dalam mendampingi remaja. Dengan demikian, disposisi PLKB terlihat dari kesediaannya menjalankan tugas bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pihak yang membantu keluarga memahami permasalahan remaja.

Selanjutnya, Informan 3 memahami posisinya sebagai penghubung antara petugas dengan keluarga sasaran. Kader membantu menyampaikan informasi kepada keluarga, mengajak keluarga mengikuti kegiatan, serta menyampaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani kepada PLKB. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kader menerima dan menjalankan perannya dalam mendukung implementasi program.

Sementara itu, Informan 4 memahami BKR sebagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang tua dalam memahami dan mendampingi anak remaja. Dengan demikian, pemahaman yang dimiliki oleh kelompok sasaran memperlihatkan bahwa tujuan program telah diterima sampai pada tingkat penerima manfaat.

Berdasarkan keterangan keempat informan tersebut, dapat dilihat bahwa disposisi pelaksana tidak hanya ditunjukkan melalui sikap pelaksana, tetapi diawali dari adanya pemahaman terhadap tujuan program. Tim BKKBN, PLKB, dan kader memiliki pemahaman mengenai fungsi masing-masing dalam pelaksanaan BKR,

sedangkan keluarga sasaran memahami manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Selain aspek pemahaman, disposisi pelaksana terlihat dari sikap keterbukaan dan responsivitas terhadap kondisi keluarga. Informan 1 menjelaskan bahwa permasalahan keluarga dan remaja mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga pelaksanaan pembinaan perlu dilakukan secara terbuka dan menyesuaikan kondisi keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tim BKKBN tidak memandang seluruh keluarga dengan permasalahan yang sama, tetapi memberikan ruang bagi pelaksana untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi di lapangan.

Sikap tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa:

> *"pembinaan kepada keluarga dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi*".

Pendekatan tersebut digunakan agar keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan anak remaja. Sikap terbuka tersebut menjadi penting karena persoalan remaja yang dihadapi keluarga dapat bersifat pribadi dan membutuhkan komunikasi yang baik antara pelaksana dengan keluarga.

Informan 3 selaku kader juga menunjukkan sikap responsif dengan membantu keluarga ketika membutuhkan informasi. Apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh kader, kader tidak memberikan informasi yang tidak diketahuinya, tetapi mengoordinasikan permasalahan tersebut kepada PLKB. Hal ini menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai kader.

Dari sisi keluarga sasaran, Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kader cukup terbuka dan membantu ketika keluarga membutuhkan informasi*".

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa sikap pelaksana dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, keterbukaan dan responsivitas pelaksana menjadi salah satu faktor yang membantu membangun kepercayaan keluarga terhadap program BKR.

Disposisi pelaksana juga terlihat dari kesediaan dan komitmen dalam menjalankan tugas. Informan 1 memandang BKR sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Informan 2 menyatakan:

> *"kesediaannya menjalankan pembinaan karena keluarga yang mempunyai anak remaja membutuhkan pendampingan*".

Sementara Informan 3 menunjukkan kesediaan membantu masyarakat melalui perannya sebagai kader. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki kemauan untuk tetap menjalankan program meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Informan 4 selaku keluarga sasaran menyatakan bahwa:

> *"kesediaan mengikuti kegiatan dipengaruhi oleh kesesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas keluarga".*

Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi tidak hanya menjadi persoalan pada sisi pelaksana, tetapi juga berkaitan dengan kesediaan kelompok sasaran untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, komitmen pelaksana perlu diikuti dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi keluarga agar partisipasi tetap dapat dipertahankan.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa disposisi pelaksana BKR di Kecamatan Kawali ditandai oleh pemahaman terhadap tujuan program, keterbukaan, responsivitas, kesediaan membantu, serta komitmen untuk menjalankan pembinaan secara berkelanjutan. Sikap tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi hambatan implementasi, khususnya hambatan yang berkaitan dengan perbedaan kondisi dan kebutuhan keluarga sasaran.

Berdasarkan studi dokumentasi, komitmen pelaksana dalam menjalankan Program BKR terlihat dari adanya pencatatan kegiatan, daftar hadir, dan pelaporan pelaksanaan kegiata**n**. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menyampaikan komitmen secara verbal, tetapi melaksanakan kegiatan dan mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban program.

Pencatatan kegiatan juga menunjukkan adanya upaya pelaksana untuk mengetahui pelaksanaan program dan keterlibatan keluarga sasaran. Dengan adanya dokumentasi, kegiatan yang telah dilakukan dapat menjadi bahan pelaporan maupun evaluasi bagi pelaksana.

Dokumentasi materi pembinaan juga memperlihatkan bahwa kegiatan diarahkan pada kebutuhan keluarga dan remaja, seperti komunikasi antara orang tua dan anak, perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, dan pembentukan karakter. Hal tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa pelaksana tidak hanya berorientasi pada terlaksananya pertemuan, tetapi juga berupaya memberikan pembinaan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.

Dengan demikian, dokumentasi memperkuat hasil wawancara Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 mengenai adanya komitmen untuk melaksanakan tugas. Komitmen tersebut terlihat dari keberlanjutan kegiatan, pencatatan, serta penyediaan materi pembinaan bagi keluarga sasaran.

Berdasarkan hasil observasi, disposisi pelaksana dapat dilihat dari kesiapan dalam melaksanakan kegiatan, cara pelaksana berinteraksi dengan peserta, keterbukaan dalam memberikan penjelasan, dan respons terhadap pertanyaan atau permasalahan keluarga.

Dalam pelaksanaan kegiatan, apabila PLKB memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan mengenai remaja, hal tersebut menunjukkan adanya sikap terbuka dan responsif. Sementara itu, keterlibatan kader dalam membantu peserta dan mengarahkan jalannya kegiatan menunjukkan adanya kesediaan kader untuk menjalankan perannya dalam mendukung pelaksanaan BKR.

Hasil observasi tersebut memperkuat keterangan Informan 2 dan Informan 3 bahwa pendekatan kepada keluarga dilakukan secara terbuka dan tidak menghakimi. Kondisi tersebut penting karena keluarga dapat mempunyai permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat diketahui bahwa disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor yang mendukung upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Disposisi tersebut terlihat dari pemahaman pelaksana terhadap

tujuan program, sikap terbuka dan responsif terhadap keluarga, serta kesediaan untuk melaksanakan tugas secara berkelanjutan.

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi atau kecenderungan pelaksana berkaitan dengan bagaimana pelaksana memahami kebijakan, menerima tujuan kebijakan, serta menunjukkan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam landasan teori penelitian Anda, variabel disposisi ditempatkan sebagai salah satu dari enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan bersama dengan standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 menunjukkan adanya penerimaan terhadap tujuan dan pelaksanaan BKR. Informan 1 memahami BKR sebagai bagian dari pembangunan keluarga, Informan 2 memahami tugasnya dalam memberikan pembinaan, sedangkan Informan 3 memahami fungsi kader sebagai penghubung antara pelaksana dengan keluarga. Kesamaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pelaksana menerima tujuan program dan bersedia menerjemahkannya dalam aktivitas di lapangan.

Kondisi tersebut penting karena keberadaan kebijakan dan struktur organisasi saja tidak cukup untuk menjamin implementasi. Kebijakan membutuhkan pelaksana yang mempunyai kemauan untuk menjalankan tugas dan menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan. Hal tersebut sejalan dengan

kerangka Van Meter dan Van Horn yang menempatkan disposisi pelaksana sebagai salah satu faktor yang berinteraksi dengan variabel implementasi lainnya.

Dalam konteks BKR, disposisi pelaksana juga berkaitan dengan kemampuan untuk merespons karakteristik keluarga sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"kondisi keluarga dan remaja berbeda-beda",

sedangkan Informan 2 menyatakan bahwa*:*

"pembinaan dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi".

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak menerapkan pendekatan secara kaku, tetapi berusaha menyesuaikan komunikasi dan pembinaan dengan kondisi keluarga.

Sikap responsif tersebut menjadi penting karena BKR berhubungan dengan persoalan keluarga dan perkembangan remaja yang memiliki karakteristik beragam. Apabila pelaksana hanya berorientasi pada penyampaian materi secara satu arah, kemungkinan keluarga kurang terbuka dalam menyampaikan persoalannya. Sebaliknya, pendekatan yang terbuka memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi program keluarga dan kependudukan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, umpan balik masyarakat, partisipasi warga, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks penelitian ini, sikap terbuka pelaksana memungkinkan terjadinya komunikasi dan umpan balik sehingga permasalahan keluarga dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Disposisi pelaksana juga terlihat dari komitmen untuk tetap menjalankan program meskipun terdapat hambatan. Informan 1 menyatakan bahwa:

"BKR membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan",

sedangkan Informan 2 dan Informan 3 menunjukkan kesediaan untuk tetap melaksanakan peran masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak melihat BKR sebagai kegiatan yang bersifat sesaat, tetapi sebagai program yang membutuhkan keberlanjutan.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Latifah (2025) dalam landasan teori Anda yang menunjukkan bahwa keaktifan PLKB dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung implementasi program keluarga dan remaja. Dalam penelitian di Kecamatan Kawali, keaktifan PLKB dan kader terlihat dari kesediaan mereka menjalankan pembinaan, membantu keluarga, menyampaikan informasi, serta melakukan koordinasi ketika menghadapi persoalan.

Disposisi kader juga menjadi penting apabila dikaitkan dengan penelitian Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025) yang dalam landasan teori menunjukkan bahwa lemahnya partisipasi kader dapat menjadi salah satu hambatan dalam implementasi BKR. Dalam penelitian Kecamatan Kawali, kader justru menunjukkan kesediaan membantu keluarga dan meneruskan permasalahan kepada PLKB. Dengan demikian, sikap dan komitmen kader menjadi salah satu kekuatan dalam mengatasi hambatan implementasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disposisi kelompok sasaran tidak selalu sama dengan disposisi pelaksana. Informan 4 menyatakan bahwa:

> *"kesediaan mengikuti kegiatan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas keluarga*".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksana mempunyai komitmen tinggi, partisipasi keluarga tetap dapat menghadapi hambatan.

Oleh karena itu, komitmen pelaksana perlu diwujudkan melalui pendekatan yang fleksibel. Pelaksana tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan, tetapi juga perlu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi keluarga. Dalam hal ini, keterbukaan dan responsivitas menjadi strategi untuk mempertahankan keterlibatan kelompok sasaran.

Apabila dikaitkan dengan dimensi sebelumnya, disposisi pelaksana juga mempunyai hubungan dengan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Sikap terbuka PLKB dan kader memungkinkan komunikasi dengan keluarga berjalan lebih baik. Sebaliknya, komunikasi yang baik memungkinkan pelaksana mengetahui persoalan keluarga sehingga dapat memberikan respons yang sesuai. Dengan demikian, keenam variabel Van Meter dan Van Horn tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam proses implementasi.

Hal tersebut sesuai dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa keenam variabel implementasi dalam model Van Meter dan Van Horn saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan triangulasi hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu kekuatan

Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Kekuatan tersebut terlihat dari adanya pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan program, sikap terbuka dalam melakukan pembinaan, respons terhadap permasalahan keluarga, serta kesediaan pelaksana untuk menjalankan tugas secara berkelanjutan.

Informan 1 menunjukkan komitmen pada tingkat kebijakan dan pembinaan, Informan 2 menunjukkan komitmen pada tingkat pelaksanaan teknis, sedangkan Informan 3 menunjukkan komitmen pada tingkat masyarakat melalui perannya sebagai kader. Informan 4 menunjukkan bahwa sikap terbuka dan membantu dari kader dapat dirasakan oleh keluarga sasaran.

Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan melalui dimensi disposisi dilakukan bukan dengan menghilangkan hambatan secara langsung, tetapi dengan membangun sikap pelaksana yang terbuka, responsif, dan bersedia menyesuaikan pembinaan dengan kondisi keluarga. Sikap tersebut memungkinkan keluarga lebih nyaman menyampaikan permasalahan dan pada akhirnya membantu pelaksana menentukan tindak lanjut yang sesuai.

Argumentasi ini sejalan dengan landasan teori Van Meter dan Van Horn bahwa disposisi pelaksana merupakan bagian penting dalam menentukan bagaimana kebijakan diterima dan dilaksanakan oleh pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis relatif mendukung upaya mengatasi hambatan implementasi. Hal tersebut terlihat dari adanya pemahaman pelaksana

terhadap tujuan program, sikap terbuka dan responsif terhadap keluarga, serta kesediaan untuk melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan.

Upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan melalui dimensi disposisi dilakukan dengan mempertahankan komitmen pelaksana, memberikan pembinaan dengan pendekatan yang tidak menghakimi, merespons permasalahan keluarga sesuai kondisi, serta memanfaatkan kader sebagai pihak yang dekat dengan keluarga sasaran.

Temuan tersebut diperkuat oleh landasan teori yang menempatkan disposisi sebagai salah satu variabel utama dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn. Selain itu, temuan mengenai pentingnya keaktifan PLKB dan kader sejalan dengan penelitian Latifah (2025), sementara pentingnya peran kader juga berkaitan dengan temuan Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025).

Disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya Tim BKKBN mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hal tersebut ditunjukkan melalui pemahaman pelaksana terhadap tujuan program, keterbukaan dalam memberikan pembinaan, responsivitas terhadap permasalahan keluarga, serta komitmen untuk melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan. Sikap tersebut memungkinkan pelaksana menyesuaikan pembinaan dengan kondisi keluarga dan menciptakan hubungan yang lebih terbuka dengan kelompok sasaran. Keberadaan kader yang bersedia membantu keluarga dan mengoordinasikan permasalahan kepada PLKB juga memperkuat pelaksanaan program. Temuan ini sesuai dengan model Van Meter dan Van Horn yang menempatkan disposisi pelaksana sebagai salah satu variabel

penting implementasi kebijakan, serta sejalan dengan landasan teori BKR yang menekankan pentingnya keaktifan PLKB, kader, partisipasi masyarakat, dan respons terhadap kebutuhan keluarga.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, diketahui bahwa kondisi lingkungan tempat program dilaksanakan turut memengaruhi tingkat partisipasi keluarga sasaran. Lingkungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap kegiatan, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan program.

Dari aspek sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi keluarga terhadap kegiatan BKR sudah ada, tetapi belum seluruh keluarga dapat mengikuti kegiatan secara konsisten. Informan 1 menjelaskan bahwa*:*

> *"masyarakat telah memberikan respons terhadap kegiatan BKR, namun partisipasinya belum merata*".

Masih terdapat keluarga yang belum dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi bukan disebabkan oleh tidak adanya penerimaan masyarakat terhadap program, melainkan lebih berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan.

Hal tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

> *"terdapat keluarga yang aktif mengikuti kegiatan, tetapi terdapat pula keluarga yang hanya mengikuti kegiatan sesekali*".

Dengan demikian, lingkungan sosial keluarga mempunyai pengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan BKR.

Keterangan tersebut juga disampaikan oleh Informan 3 yang menyatakan bahwa:

> *"kehadiran keluarga dalam kegiatan tidak selalu sama. Sebagian keluarga tidak dapat hadir karena pekerjaan atau kegiatan lainnya*".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan rutinitas keluarga berinteraksi dengan pelaksanaan program. Keluarga yang mempunyai kesibukan pekerjaan pada waktu kegiatan akan mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan meskipun mempunyai keinginan untuk berpartisipasi.

Dari sisi kelompok sasaran, Informan 4 menyatakan bahwa: *"kehadiran dalam kegiatan sangat bergantung pada kesesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas keluarga*". Keterangan tersebut memperkuat penjelasan Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 bahwa persoalan partisipasi bukan semata-mata karena rendahnya penerimaan terhadap BKR, tetapi juga karena adanya keterbatasan waktu keluarga.

Berdasarkan keempat informan tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan sosial dan ekonomi keluarga menjadi salah satu hambatan dalam mempertahankan konsistensi partisipasi. Keluarga pada dasarnya menerima keberadaan program, tetapi pekerjaan dan aktivitas lainnya menyebabkan mereka tidak selalu dapat hadir. Oleh karena itu, pelaksana perlu memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat dalam menentukan pelaksanaan kegiatan.

Selain kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa diperlukan untuk membantu koordinasi, penyediaan fasilitas, serta menjaga keberlanjutan kegiatan*".

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi BKR tidak hanya menjadi tanggung jawab Tim BKKBN, tetapi membutuhkan dukungan kelembagaan dari pemerintah pada tingkat wilayah.

Informan 2 menjelaskan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa mempunyai arti penting karena sebagian besar kegiatan BKR dilaksanakan pada tingkat masyarakat*".

Pemerintah desa dapat membantu dalam hal koordinasi dan penyediaan tempat kegiatan. Dengan demikian, pemerintah desa menjadi salah satu aktor lingkungan kelembagaan yang dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan 3 yang menyatakan bahwa:

> *"dukungan pemerintah desa dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan dan membantu dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan BKR*".

Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat memberikan legitimasi sosial terhadap kegiatan sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan mengikuti program.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Informan 1, Informan 2, dan Informan 3, dapat diketahui bahwa dukungan kelembagaan pemerintah desa menjadi salah satu upaya untuk mengatasi hambatan lingkungan sosial dan

ekonomi. Dukungan tersebut membantu pelaksana menyediakan tempat, melakukan koordinasi, dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Di samping pemerintah desa, implementasi BKR juga melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Tim BKKBN menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi, PLKB menjalankan fungsi teknis di lapangan, kader menjangkau keluarga sasaran, sedangkan pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pola tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara lingkungan kelembagaan dengan lingkungan sosial masyarakat dalam mendukung keberlangsungan BKR.

Berdasarkan studi dokumentasi, kondisi wilayah Kecamatan Kawali dapat menjadi konteks yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan BKR. Dokumen Kecamatan Kawali Dalam Angka 2024 menunjukkan bahwa kondisi antarwilayah desa tidak sepenuhnya sama, termasuk dalam aspek sarana transportasi dan komunikasi. Terdapat desa yang memiliki angkutan umum dengan trayek tetap, sementara beberapa desa lainnya tidak memiliki angkutan umum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap lokasi kegiatan dapat berbeda antardaerah. Walaupun data tersebut tidak secara langsung membuktikan adanya hambatan dalam pelaksanaan BKR, kondisi transportasi dapat menjadi faktor lingkungan yang perlu dipertimbangkan oleh pelaksana ketika menentukan lokasi dan waktu kegiatan.

Dokumen tersebut juga menunjukkan keberadaan sarana komunikasi di Kecamatan Kawali, termasuk operator layanan komunikasi telepon seluler dan menara telekomunikasi di sejumlah desa. Ketersediaan sarana komunikasi tersebut

dapat menjadi pendukung dalam penyampaian informasi kegiatan kepada keluarga sasaran, terutama ketika komunikasi dilakukan melalui telepon atau media komunikasi lainnya.

Dengan demikian, dokumentasi wilayah menunjukkan bahwa kondisi transportasi dan komunikasi merupakan konteks lingkungan yang dapat memengaruhi strategi pelaksana dalam menjangkau keluarga sasaran. Data tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan BKR secara langsung, tetapi sebagai data pendukung untuk memahami kondisi lingkungan tempat program dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi, kondisi lingkungan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari lokasi kegiatan, akses keluarga menuju tempat kegiatan, fasilitas yang digunakan, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung kegiatan.

Apabila kegiatan BKR dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas desa atau fasilitas yang tersedia di lingkungan masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial setempat dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pelaksanaan program. Pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia juga dapat membantu mengurangi hambatan terkait kebutuhan tempat pelaksanaan kegiatan.

Observasi juga dapat memperlihatkan bagaimana keluarga datang dan mengikuti kegiatan serta bagaimana kader membantu menghubungkan pelaksana dengan masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat hasil wawancara Informan 2 dan

Informan 3 mengenai pentingnya peran lingkungan lokal dan kader dalam menjangkau keluarga sasaran.

Berdasarkan triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi, dapat diketahui bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik/kelembagaan mempunyai pengaruh terhadap implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali. Hambatan yang paling terlihat dari lingkungan sosial dan ekonomi adalah belum konsistennya kehadiran keluarga karena kesibukan pekerjaan dan keterbatasan waktu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan partisipasi tidak sepenuhnya berasal dari penolakan masyarakat terhadap program. Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 sama-sama menunjukkan bahwa masyarakat dan keluarga mengetahui serta menerima keberadaan BKR, tetapi kemampuan untuk mengikuti kegiatan secara rutin berbeda-beda. Dengan demikian, lingkungan sosial dan ekonomi lebih berpengaruh terhadap konsistensi partisipasi daripada terhadap penerimaan program.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal merupakan salah satu variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi karena kebijakan dilaksanakan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Lingkungan tersebut dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat bagi pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan landasan teori penelitian Anda yang menempatkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai salah satu dari enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, kondisi keluarga yang memiliki pekerjaan dan aktivitas lain menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi berpengaruh

terhadap kemampuan keluarga menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan BKR. Informan 3 menjelaskan bahwa sebagian keluarga tidak dapat hadir karena pekerjaan, sedangkan Informan 4 menyatakan bahwa kehadiran sangat bergantung pada kesesuaian waktu kegiatan. Artinya, aktivitas ekonomi keluarga secara tidak langsung menjadi faktor yang membatasi partisipasi dalam program.

Kondisi tersebut menuntut pelaksana untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan melalui kader menjadi penting karena kader lebih dekat dengan keluarga sasaran dan dapat mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya.

Temuan tersebut sejalan dengan landasan teori yang menjelaskan bahwa implementasi program keluarga dan kependudukan dipengaruhi oleh komunikasi efektif, umpan balik masyarakat, partisipasi warga, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perlu direspons melalui pendekatan yang memungkinkan keluarga tetap terhubung dengan kegiatan meskipun tidak selalu dapat hadir secara rutin.

Dari sisi lingkungan sosial, keterlibatan kader menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi juga dilibatkan dalam proses implementasi. Kader menjadi aktor lokal yang membantu mengajak masyarakat, menyampaikan informasi, dan menghubungkan keluarga dengan PLKB. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pemanfaatan modal sosial masyarakat dalam pelaksanaan BKR.

Temuan ini relevan dengan penelitian Latifah (2025) yang terdapat dalam landasan teori, yang menunjukkan bahwa dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan PLKB, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam implementasi program keluarga dan remaja. Dalam konteks Kecamatan Kawali, dukungan tersebut terlihat melalui keterlibatan pemerintah desa, PLKB, kader, dan keluarga sasaran.

Sementara itu, dukungan pemerintah desa menunjukkan adanya lingkungan politik/kelembagaan yang relatif mendukung implementasi BKR. Informan 1 menjelaskan bahwa dukungan pemerintah diperlukan untuk koordinasi dan fasilitas, Informan 2 menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa karena kegiatan berlangsung di tingkat masyarakat, sedangkan Informan 3 merasakan bahwa dukungan tersebut membantu pelaksanaan dan mengajak masyarakat.

Dukungan pemerintah desa tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dukungan kelembagaan yang memberikan ruang bagi BKR untuk dilaksanakan di tingkat lokal. Dukungan tersebut juga memperlihatkan bahwa implementasi program tidak hanya bergantung pada Tim BKKBN, tetapi membutuhkan kerja sama dengan struktur pemerintahan yang berada lebih dekat dengan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ni Putu Glory Damayanti et al. (2025**)** yang dalam landasan teori menunjukkan bahwa implementasi BKR dapat menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya komitmen lintas sektor, dan partisipasi kader. Dalam penelitian Kecamatan Kawali,

dukungan pemerintah desa dan keterlibatan kader justru menjadi faktor yang membantu mengurangi hambatan tersebut.

Selain itu, kondisi transportasi dan komunikasi sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Kecamatan Kawali Dalam Angka 2024 memberikan gambaran bahwa kondisi wilayah perlu dipertimbangkan dalam strategi menjangkau keluarga sasaran. Perbedaan ketersediaan angkutan umum antardesa menunjukkan bahwa akses masyarakat tidak selalu sama, sementara keberadaan sarana komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan.

Dengan demikian, dokumentasi wilayah memperkuat argumentasi bahwa pelaksana perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Dalam konteks implementasi BKR, penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan kader sebagai penghubung dengan masyarakat, penggunaan fasilitas yang tersedia di desa, serta pemanfaatan sarana komunikasi yang dapat menjangkau keluarga sasaran.

Hal ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan dimensi lainnya. Hambatan ekonomi berupa kesibukan keluarga berkaitan dengan standar dan sasaran program karena keluarga sasaran belum seluruhnya dapat berpartisipasi secara konsisten. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan komunikasi karena pelaksana perlu menyampaikan informasi kegiatan secara fleksibel. Sementara dukungan pemerintah desa berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana karena keberhasilan kegiatan membutuhkan koordinasi antaraktor.

Dengan kata lain, lingkungan eksternal tidak berdiri sendiri. Keenam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn saling berinteraksi dalam proses implementasi. Landasan teori penelitian Anda juga menegaskan bahwa keenam variabel tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa hambatan lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali lebih banyak berupa keterbatasan waktu dan kesibukan keluarga daripada penolakan terhadap program. Hal ini terlihat dari keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4 yang sama-sama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah ada, tetapi belum selalu konsisten.

Oleh karena itu, upaya Tim BKKBN dalam menghadapi kondisi tersebut dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga melalui kader, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masyarakat, serta pemanfaatan dukungan pemerintah desa. Kader menjadi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu menjangkau keluarga yang belum aktif.

Sementara itu, dari aspek politik/kelembagaan, dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor pendukung. Dukungan tersebut berupa penyediaan fasilitas, koordinasi, serta dukungan terhadap kegiatan di masyarakat. Dengan demikian, lingkungan politik dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai dukungan kelembagaan terhadap keberlanjutan implementasi BKR, bukan semata-mata sebagai persoalan politik praktis.

Argumentasi tersebut sejalan dengan Van Meter dan Van Horn bahwa kondisi lingkungan eksternal dapat memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik/kelembagaan memberikan pengaruh terhadap implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hambatan lingkungan sosial dan ekonomi terutama terlihat dari belum konsistennya kehadiran keluarga karena pekerjaan, kesibukan, dan keterbatasan waktu. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya penolakan masyarakat terhadap BKR.

Upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pendekatan kader, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masyarakat, pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta penguatan koordinasi dan dukungan pemerintah desa. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor kelembagaan yang membantu menyediakan fasilitas dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan.

Dengan demikian, lingkungan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang perlu disesuaikan oleh pelaksana, sedangkan dukungan politik/kelembagaan menjadi salah satu faktor pendukung implementasi. Temuan ini sesuai dengan model Van Meter dan Van Horn yang menempatkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik/kelembagaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hambatan utama pada lingkungan sosial dan ekonomi bukan berupa penolakan masyarakat terhadap program, melainkan keterbatasan waktu keluarga akibat pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga partisipasi belum konsisten. Kondisi tersebut diatasi melalui pendekatan kader, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan dukungan pemerintah desa. Sementara itu, dukungan pemerintah desa melalui koordinasi, fasilitas, dan dukungan terhadap kegiatan menjadi faktor kelembagaan yang membantu keberlangsungan program. Dengan demikian, kemampuan Tim BKKBN menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lingkungan masyarakat serta membangun dukungan kelembagaan menjadi upaya penting dalam mengatasi hambatan implementasi BKR.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dapat diketahui bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilakukan melalui serangkaian strategi yang saling berkaitan pada enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam dimensi tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena keberhasilan implementasi ditentukan oleh hubungan dan interaksi di antara seluruh variabel tersebut. Landasan teori penelitian juga menegaskan

bahwa model Van Meter dan Van Horn menempatkan keenam variabel tersebut sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi, bukan hanya berdasarkan desain kebijakan semata.

Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi Tim BKKBN bukan terutama disebabkan oleh ketidakjelasan tujuan BKR. Informan 1 selaku Tim BKKBN memahami BKR sebagai upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi remaja, Informan 2 selaku PLKB menerjemahkan tujuan tersebut melalui pembinaan dan penyuluhan, Informan 3 selaku kader meneruskannya kepada masyarakat, sedangkan Informan 4 sebagai keluarga sasaran memahami manfaat BKR dalam membantu orang tua mendampingi anak remaja. Kesamaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa standar dan sasaran program relatif telah dipahami oleh pelaksana maupun sasaran. Hambatan justru terletak pada kesenjangan antara sasaran yang telah ditetapkan dengan kemampuan mempertahankan partisipasi keluarga secara konsisten. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan bukan mengubah tujuan program, melainkan menerjemahkan tujuan ke dalam pembinaan yang lebih operasional, memperkuat peran PLKB dan kader, melakukan pencatatan peserta, serta melakukan pendekatan langsung kepada keluarga. Hal ini sejalan dengan landasan teori bahwa tujuan, target partisipasi, dan indikator capaian BKR perlu diterjemahkan secara operasional sesuai konteks sosial-budaya sasaran.

Selanjutnya, pada dimensi sumber daya, hambatan terlihat dari keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta kebutuhan terhadap sumber daya manusia, khususnya kader. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"anggaran tersedia tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan,*"

sedangkan Informan 2 dan Informan 3 menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia perlu dioptimalkan sesuai dengan kondisi kegiatan dan jumlah peserta. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan kegiatan BKR berhenti. Tim BKKBN dan pelaksana lapangan melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia, termasuk memanfaatkan fasilitas desa atau masyarakat dan memperkuat peran kader dalam menjangkau keluarga. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa fasilitas masyarakat atau desa digunakan sebagai tempat kegiatan dan kader terlibat dalam persiapan, mengarahkan peserta, serta membantu penyampaian materi. Temuan ini sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa sumber daya meliputi manusia, keuangan, waktu, infrastruktur, dan data, sehingga keterbatasan salah satu unsur dapat memengaruhi mutu implementasi.

Pada dimensi karakteristik badan pelaksana, upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan pembagian peran yang telah tersedia. Informan 1 menjelaskan bahwa:

> *"pelaksanaan BKR membutuhkan koordinasi antarpihak, Informan 2 berperan dalam pelaksanaan teknis dan pembinaan kader, sedangkan Informan 3 menjadi penghubung antara PLKB dengan keluarga sasaran".*

Pembagian kewenangan juga berlangsung secara berjenjang; persoalan yang dapat diselesaikan di lapangan ditangani oleh PLKB, sedangkan persoalan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut dikoordinasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kader tidak mengambil keputusan kebijakan, tetapi menyampaikan persoalan kepada PLKB. Dengan demikian, hambatan implementasi diatasi melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarpelaksana, penguatan peran kader,

serta mekanisme eskalasi permasalahan berdasarkan kewenangan. Pola tersebut menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana relatif mendukung implementasi BKR.

Pada dimensi komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, komunikasi menjadi strategi penting untuk menjembatani pelaksana dengan keluarga sasaran. Informan 1 menjelaskan bahwa informasi program disampaikan kepada petugas pelaksana untuk diteruskan kepada kader dan masyarakat, Informan 2 menyampaikan informasi mengenai waktu, tempat, peserta, dan materi kepada kader, sedangkan Informan 3 meneruskan informasi tersebut kepada keluarga melalui komunikasi langsung maupun media yang tersedia. Dengan demikian, Tim BKKBN mengatasi hambatan komunikasi melalui komunikasi berjenjang, sosialisasi dan penyuluhan, koordinasi sebelum dan sesudah kegiatan, pemanfaatan kader sebagai penghubung masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan. Hasil observasi memperlihatkan adanya interaksi langsung antara PLKB, kader, dan keluarga sehingga komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan. Temuan ini sesuai dengan landasan teori yang menegaskan bahwa komunikasi antarorganisasi harus menghasilkan pemahaman yang akurat dan konsisten serta diikuti sinkronisasi di lapangan.

Pada dimensi disposisi pelaksana, upaya mengatasi hambatan terlihat melalui pemahaman, keterbukaan, responsivitas, dan komitmen pelaksana. Informan 1 memahami BKR sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan, Informan 2 menunjukkan kesediaan

melakukan pembinaan dan memberikan pendampingan kepada keluarga, sedangkan Informan 3 memahami perannya sebagai penghubung antara petugas dan keluarga. Selain itu, Informan 1 menekankan pentingnya keterbukaan karena karakteristik keluarga dan remaja berbeda-beda, sementara Informan 2 menggunakan pendekatan yang tidak menghakimi agar keluarga merasa nyaman menyampaikan permasalahan. Dengan demikian, upaya pada dimensi ini dilakukan dengan mempertahankan komitmen pelaksana, membangun sikap terbuka dan responsif, serta menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan kondisi keluarga.

Sementara itu, pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, hambatan utama berasal dari kondisi keluarga yang memiliki kesibukan pekerjaan dan keterbatasan waktu sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan secara konsisten. Berdasarkan keterangan Informan 1, Informan 2, Informan 3, dan Informan 4, partisipasi masyarakat sebenarnya telah ada, tetapi belum seluruh keluarga dapat hadir secara rutin. Dengan demikian, hambatan tersebut lebih menunjukkan persoalan keterjangkauan dan konsistensi partisipasi, bukan penolakan terhadap program. Tim BKKBN kemudian mengatasinya melalui pendekatan kader, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masyarakat, pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta penguatan dukungan pemerintah desa. Dukungan pemerintah desa berupa koordinasi, fasilitas, dan dukungan terhadap kegiatan menjadi faktor kelembagaan yang membantu keberlangsungan program. Hal tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan politik dalam penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai dukungan kelembagaan terhadap implementasi BKR.

Apabila keenam dimensi tersebut dianalisis secara keseluruhan, terlihat bahwa upaya Tim BKKBN bersifat adaptif dan kolaboratif. Kejelasan tujuan program menjadi dasar bagi pelaksana dalam menentukan kegiatan; keterbatasan sumber daya diatasi melalui optimalisasi fasilitas dan kader; pembagian tugas digunakan untuk memperjelas tanggung jawab; komunikasi berjenjang digunakan untuk menjangkau keluarga; disposisi yang responsif digunakan untuk menghadapi perbedaan kondisi keluarga; sedangkan dukungan lingkungan digunakan untuk memperkuat keberlanjutan kegiatan. Dengan demikian, satu hambatan pada suatu dimensi tidak diselesaikan hanya melalui satu tindakan, tetapi melalui pemanfaatan dimensi lainnya. Misalnya, keterbatasan kehadiran keluarga karena pekerjaan tidak hanya diatasi melalui penjadwalan kegiatan, tetapi juga melalui peran kader dan komunikasi yang lebih dekat dengan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa keenam variabel Van Meter dan Van Horn saling berinteraksi dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi, peneliti berargumentasi bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi BKR di Kecamatan Kawali telah dilakukan melalui strategi yang menyesuaikan antara kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Tim BKKBN tidak mengubah standar dan sasaran program ketika menghadapi hambatan, tetapi menyesuaikan cara menjangkau sasaran. Ketika sumber daya terbatas, pelaksana mengoptimalkan fasilitas yang ada dan memperkuat kader. Ketika terdapat hambatan komunikasi, informasi disampaikan secara berjenjang dan menggunakan media yang tersedia. Ketika menghadapi persoalan keluarga yang beragam,

pelaksana menerapkan pendekatan yang terbuka dan responsif. Sementara ketika menghadapi keterbatasan partisipasi akibat kondisi sosial-ekonomi keluarga, pelaksana mengandalkan pendekatan kader dan dukungan pemerintah desa. Pola tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi BKR sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam menghubungkan sumber daya, struktur organisasi, komunikasi, komitmen, dan kondisi lingkungan secara bersamaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendukung upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan sasaran program, karena Informan 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan BKR.
2. Peran PLKB dan kader yang saling melengkapi, terutama kader sebagai penghubung antara pelaksana dengan keluarga sasaran.
3. Komunikasi yang berlangsung secara berjenjang, dari Tim BKKBN kepada PLKB, kader, kemudian keluarga sasaran.
4. Komitmen dan sikap responsif pelaksana, terutama dalam memberikan pembinaan dengan pendekatan terbuka dan tidak menghakimi.
5. Pemanfaatan fasilitas dan sumber daya yang tersedia, sehingga keterbatasan anggaran dan sarana tidak menghentikan kegiatan.
6. Dukungan pemerintah desa, terutama dalam penyediaan fasilitas, koordinasi, dan penguatan kegiatan di masyarakat.
7. Adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan, yang membantu pelaksana mengetahui pelaksanaan dan keterlibatan peserta.

8. Keterlibatan masyarakat melalui kader, yang membuat pelaksanaan BKR lebih dekat dengan kondisi keluarga sasaran.

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi Program BKR berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Partisipasi keluarga belum konsisten, meskipun keluarga pada dasarnya menerima dan memahami manfaat BKR.
2. Keterbatasan waktu dan kesibukan keluarga, terutama karena pekerjaan dan aktivitas lainnya, sehingga tidak semua keluarga dapat mengikuti kegiatan secara rutin.
3. Keterbatasan anggaran, karena anggaran yang tersedia belum selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan secara optimal.
4. Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ideal, sehingga pelaksana perlu memanfaatkan fasilitas yang tersedia di desa atau masyarakat.
5. Perbedaan kondisi dan permasalahan keluarga serta remaja, sehingga pembinaan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sepenuhnya seragam.
6. Keterbatasan jangkauan pelaksana, yang menyebabkan peran kader menjadi sangat penting untuk menjangkau keluarga yang belum aktif.
7. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang beragam, terutama aktivitas pekerjaan yang memengaruhi kemampuan keluarga untuk hadir secara konsisten.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa upaya Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali bukan

dilakukan melalui satu strategi tunggal, melainkan melalui kombinasi strategi pada enam dimensi implementasi Van Meter dan Van Horn. Upaya tersebut mencakup pengoperasionalisasian tujuan program, optimalisasi sumber daya, penguatan pembagian tugas, komunikasi berjenjang, peningkatan responsivitas pelaksana, serta penyesuaian kegiatan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan penguatan dukungan pemerintah desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan implementasi BKR bersifat multidimensional sehingga penyelesaiannya juga membutuhkan pendekatan yang multidimensional. Hal ini memperkuat landasan teori penelitian bahwa keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh satu variabel, tetapi oleh hubungan antara standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

4.3 Temuan dan Keberuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, penelitian ini menemukan bahwa implementasi program secara umum telah berjalan dan dapat dikategorikan cukup baik. Pelaksanaan program telah didukung oleh kejelasan tujuan dan sasaran, ketersediaan sumber daya, pembagian tugas antaraktor, komunikasi dan koordinasi yang berjalan, disposisi pelaksana yang positif, serta dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Keenam variabel dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa keberlangsungan Program BKR tidak ditentukan oleh satu faktor secara parsial,

melainkan oleh keterkaitan antara kapasitas internal pelaksana dengan kondisi keluarga sebagai kelompok sasaran.

Temuan pertama menunjukkan bahwa standar dan sasaran Program BKR telah jelas secara substantif, tetapi belum sepenuhnya jelas pada tingkat operasional bagi keluarga sasaran. Tim BKKBN dan PLKB memahami target program dalam bentuk keberlangsungan kelompok, kehadiran keluarga, pelaksanaan pembinaan, serta pencatatan kegiatan. Sebaliknya, keluarga sasaran lebih memahami BKR dari sisi manfaat dan kegiatan yang diterima dan belum mengetahui secara rinci target program. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman pelaksana dengan pemahaman kelompok sasaran. Dengan demikian, persoalan implementasi bukan terletak pada tidak adanya standar program, tetapi pada belum meratanya penerjemahan standar dan target program ke tingkat keluarga.

Temuan kedua menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya identik dengan optimalisasi sumber daya. Tim BKKBN, PLKB, kader, materi pembinaan, dan fasilitas dasar telah tersedia sehingga kegiatan BKR tetap dapat dilaksanakan. Namun, petugas memiliki cakupan pekerjaan yang luas dan harus membagi perhatian dengan program lainnya, sementara tidak seluruh kader dapat terlibat secara konsisten dan kemampuan kader juga berbeda-beda. Oleh karena itu, persoalan sumber daya di Kecamatan Kawali lebih tepat dipahami sebagai persoalan kapasitas, waktu, dan beban kerja dibandingkan persoalan ketiadaan sumber daya.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa struktur pelaksana BKR telah terbentuk secara relatif jelas dan bersifat berjenjang sekaligus kolaboratif. Tim

BKKBN menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, PLKB menjalankan fungsi teknis dan koordinasi, kader menjadi penghubung antara pelaksana dengan keluarga sasaran, pemerintah desa memberikan dukungan kelembagaan, sedangkan keluarga menjadi penerima manfaat sekaligus pihak yang diharapkan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan keluarga. Keberadaan kader menjadi sangat strategis karena kedekatannya dengan masyarakat memungkinkan program menjangkau keluarga sasaran secara lebih langsung.

Temuan keempat menunjukkan bahwa komunikasi Program BKR telah berhasil membangun alur penyampaian informasi dari organisasi pelaksana sampai kepada keluarga, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah informasi menjadi partisipasi yang konsisten. Komunikasi berlangsung dari Tim BKKBN kepada PLKB, dari PLKB kepada kader, dan dari kader kepada keluarga. Komunikasi tersebut juga digunakan untuk sosialisasi, penyuluhan, koordinasi, pembinaan, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Akan tetapi, meskipun informasi telah diterima keluarga, kehadiran dan keterlibatan keluarga belum selalu konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari tersampaikannya pesan, tetapi juga dari kemampuan pesan tersebut menghasilkan respons dan tindakan nyata dari kelompok sasaran.
Temuan kelima memperlihatkan bahwa disposisi pelaksana merupakan kekuatan internal utama dalam implementasi BKR di Kecamatan Kawali. Pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan program, menunjukkan sikap terbuka dan tidak menghakimi, memiliki komitmen untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan, bersedia menjalankan tugas, serta responsif terhadap

permasalahan keluarga. Bahkan ketika terdapat keterbatasan waktu, sumber daya, dan partisipasi keluarga, pelaksana tetap berupaya menjalankan kegiatan. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak bersumber dari rendahnya kemauan atau komitmen pelaksana, tetapi lebih banyak berasal dari kondisi eksternal kelompok sasaran.

Temuan keenam sekaligus menjadi temuan yang paling kuat dalam penelitian ini, yaitu bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh ganda terhadap implementasi BKR. Secara sosial, masyarakat menerima keberadaan BKR dan merasakan manfaat program. Secara kelembagaan dan politik, pemerintah desa memberikan dukungan melalui koordinasi, fasilitas, serta dukungan terhadap kegiatan. Namun, dari sisi ekonomi, pekerjaan dan kesibukan keluarga menyebabkan keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan. Dengan demikian, ketidakkonsistenan kehadiran keluarga tidak tepat dipahami semata-mata sebagai rendahnya minat atau penolakan masyarakat terhadap BKR, melainkan sebagai persoalan kesempatan untuk berpartisipasi dan kesesuaian pelaksanaan program dengan kondisi kehidupan keluarga.

Berdasarkan keterkaitan keenam temuan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa keberhasilan implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali menghadapi “kesenjangan partisipasi” antara kesiapan internal pelaksana dan kapasitas partisipasi keluarga sasaran. Pada satu sisi, program telah memiliki fondasi internal yang relatif kuat berupa tujuan yang jelas, struktur pelaksana, sumber daya, komunikasi, koordinasi, serta disposisi pelaksana yang positif. Pada sisi lain, kondisi keluarga sasaran yang heterogen, keterbatasan waktu

akibat pekerjaan, dan aktivitas rumah tangga menyebabkan kapasitas keluarga untuk mengikuti pembinaan secara berkelanjutan belum sejalan dengan kesiapan internal program. Dengan demikian, program dapat dikatakan telah siap dari sisi pelaksana, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap pola kehidupan keluarga sasaran. Temuan mengenai kesenjangan antara tersedianya program dengan kemampuan keluarga untuk berpartisipasi secara konsisten juga ditegaskan dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

Kebaruan berikutnya adalah ditemukannya peran kader sebagai mekanisme adaptasi implementasi. Kader tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi, pendamping keluarga, penyaring permasalahan, dan pihak yang membantu menyesuaikan program dengan kondisi masyarakat. Ketika keluarga sulit dijangkau secara langsung oleh pelaksana formal, kader menjadi aktor yang mendekatkan program kepada kehidupan sehari-hari keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kader memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar membantu pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai jembatan adaptasi antara struktur birokrasi BKKBN dengan kondisi sosial keluarga sasaran. Peran kader tersebut menjadi semakin penting karena komunikasi formal yang telah berjalan belum otomatis menghasilkan partisipasi keluarga secara konsisten.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi Tim BKKBN dalam mengatasi hambatan bersifat adaptif dan lintas-dimensi. Tim BKKBN tidak mengubah standar dan sasaran program ketika menghadapi hambatan, tetapi menyesuaikan cara menjangkau sasaran. Keterbatasan sumber daya diatasi dengan

mengoptimalkan fasilitas yang tersedia dan memperkuat peran kader; hambatan komunikasi diatasi melalui komunikasi berjenjang dan pemanfaatan media yang tersedia; permasalahan keluarga direspons melalui pendekatan terbuka dan tidak menghakimi; sedangkan keterbatasan partisipasi akibat kondisi sosial-ekonomi dihadapi melalui pendekatan kader serta dukungan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa satu hambatan tidak diselesaikan hanya dengan satu instrumen, tetapi melalui pemanfaatan dan penguatan dimensi implementasi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemaknaan bahwa implementasi BKR bukan hanya persoalan menjalankan kegiatan sesuai pedoman, tetapi merupakan proses menyesuaikan kapasitas organisasi dengan realitas kehidupan keluarga sasaran. Keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya penyuluhan, pembinaan, monitoring, dan pelaporan, tetapi juga dari kemampuan program menciptakan kondisi yang memungkinkan keluarga hadir, memahami, dan mengikuti pembinaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai model implementasi BKR yang berorientasi pada adaptasi partisipasi keluarga, yaitu implementasi yang menghubungkan kejelasan kebijakan, kapasitas pelaksana, peran kader, komunikasi, komitmen pelaksana, dan fleksibilitas terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Secara ringkas, kebaruan penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga poin utama:

1. Kesenjangan kesiapan program dan partisipasi sasaran**.** Program BKR di Kecamatan Kawali relatif siap dari sisi internal organisasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan pelaksanaan dengan keterbatasan waktu dan kondisi kehidupan keluarga sasaran.
2. Kader sebagai jembatan adaptasi implementasi**.** Kader tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi berfungsi sebagai penghubung antara struktur formal BKKBN dengan keluarga sasaran melalui komunikasi, pendekatan personal, pendampingan, dan penyampaian permasalahan kepada PLKB.
3. Implementasi adaptif lintas-dimensi. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui interaksi keenam variabel Van Meter dan Van Horn. Hambatan pada satu dimensi direspons dengan memanfaatkan kekuatan pada dimensi lain, sehingga keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan Tim BKKBN mengintegrasikan sumber daya, struktur organisasi, komunikasi, disposisi, dan dukungan lingkungan secara bersamaan.